



# RPJPD

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 - 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN 2013**

**RPJPD**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2005- 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 seri D );
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
dan  
**BUPATI PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.

12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan polatata ruang Kabupaten Pamekasan.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD Tahun 2005 — 2025 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 3**

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun kedepan,yaitu sejak tahun2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

#### **Pasal 4**

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Timur.

#### **Pasal 5**

(1) Sistematika penulisan Dokumen RPJPD terdiri dari:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan
BAB III	:	AnalisisIsu Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Pamekasan

- BAB IV : Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025
- BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025
- BAB VI : Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan

- (2) Uraian dokumen secara rinci dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : di Pamekasan  
pada tanggal : 31 Oktober 2013

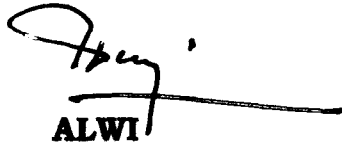
**BUPATI PAMEKASAN,**



**ACHMAD SYAFFI**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 9 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN**



**ALWI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASANTAHUN 2013 NOMOR 14

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2005-2025**

**I. UMUM**

RPJP Daerah Kabupaten Pamekasan adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Pamekasan dan strategi untuk mencapainya. RPJP Daerah Kabupaten Pamekasan disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, RPJP 2005-2025 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Tahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan kedalam rencan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025.** Namun, periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka menjaga kontinuitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, salah satu produk dan dokumen perencanaan pembangunan yang harus segera disusun adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan 2005-2025. RPJPD ini pada dasarnya adalah dokumen komprehensif dua puluh tahunan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif, dalam arti melibatkan masukan dan dukungan dari seluruh stakeholder terkait. RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ini bukanlah dokumen program pembangunan daerah yang disusun secara top-down, sekedar menerjemahkan orientasi, visi-misi politik pimpinan daerah terpilih, namun RPJPD ini adalah rencana pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan yang disusun secara bottom-up, dan merupakan akumulasi dari kristalisasi aspirasi sosial-politik masyarakat dan masukan dari seluruh stakeholder.

RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan umum bagi pelaksanaan proses pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan berbagai dinas, badan, lembaga lain, dan seluruh stakeholders di Kabupaten Pamekasan, serta sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ini adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025, (2) Memetakan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan 2005-2025, (3) Merumuskan sasaran dan arah pembangunan jangka panjang serta indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pamekasan, (4) Merumuskan kaidah pelaksanaan program pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pamekasan, (5) Mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dan masyarakat

Kabupaten Pamekasan dalam proses perencanaan program pembangunan jangka panjang, (6) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat, (7) Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (8) Menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan per-lima tahunan.

RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ini telah berhasil disusun dengan baik sudah tentu berkat dukungan dari pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan masukan selama proses penyusunan RPJPD ini.
2. Seluruh Tim Penyusun RPJPD yang telah bekerja keras dan memberikan masukan dan kritik terhadap draft RPJPD.
3. Para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Seluruh stakeholder yang telah memberikan kritik, masukan dan menyampaikan aspirasinya untuk melengkapi RPJPD ini.
5. Seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Pamekasan ini.

Kami berharap RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga perangkat daerah, stakeholder, pihak swasta, dan seluruh komponen masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan jangka panjang yang lebih terfokus dan kontekstual, terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu: " Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT"

Pamekasan, 31 - Oktober - 2013

BUPATI PAMEKASAN

ACHMAD SYAFII

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I : PENDAHULUAN	BAB I - 1
1.1. Latar Belakang	BAB I - 1
1.2. Dasar Hukum	BAB I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJP Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	BAB I - 5
1.4. Sistematika Penulisan	BAB I - 6
1.5. Maksud dan Tujuan	BAB I - 7
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN	BAB II - 1
A. Visi dan Misi	BAB II - 1
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	BAB II - 3
C. Prioritas Daerah	BAB II - 5
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BAB III - 1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAB III - 1
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	BAB III 1

	Daerah		
2.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	BAB III	2
3.	Permasalahan dan Solusi	BAB III	3
B.	Pengelolaan Belanja Daerah	BAB III	4
1.	Kebijakan Umum Keuangan Daerah	BAB III	4
2.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	BAB III	6
3.	Permasalahan dan Solusi	BAB III	7
BAB IV	: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BAB IV	1
A.	Urusan Wajib Yang Dilaksanankan	BAB IV	1
1.	Dinas Pendidikan	BAB IV	1-41
2.	Dinas Kesehatan	BAB IV	1-23
3.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. SLAMET MARTODIRDJO	BAB IV	1-21
4.	Dinas Pekerjaan Umum	BAB IV	1-22
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAB IV	1-19
6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	BAB IV	1-23
7.	Badan Lingkungan Hidup	BAB IV	1-18
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	BAB IV	1-21
9.	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	BAB IV	1-23
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BAB IV	1-15
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	BAB IV	1-16

Menengah			
12. Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal	— — — — —	BAB IV -	1- 10
13. Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan	— — — — —	BAB IV -	1- 18
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	— — — — —	BAB IV -	1- 10
15. Satuan Polisi Pamong Praja	— — — — —	BAB IV -	1- 12
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	— — — — —	BAB IV -	1-5



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB PENDAHULUAN.....	1
I	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencan Pembangunan Lainnya.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
1.5. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
II KABUPATEN PAMEKASAN.....	8
2.1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	35
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	53
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	96
BAB ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	116
III	
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	117
3.2. Isu-Isu Strategis.....	128
BAB VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	134
IV DAERAH	
4.1. Visi.....	135
4.2. Misi.....	135

BAB	SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	
V	PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.....	137
5.1.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.....	141
5.2.	Tahapan dan Prioritas.....	164
BAB	KAIDAH PELAKSANAAN.....	171
VI		
6.1.	Kaidah.....	172
6.2.	Langkah Pelaksanaan.....	173
	DAFTAR PUSTAKA.....	176

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Keadaan Umum Geografis.....	8
Tabel II.2	Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per Kecamatan 2011.....	9
Tabel II.3	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kemiringan Tanah (Hektar).....	10
Tabel II.4	Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut, 2008-2011 (meter).....	11
Tabel II.5	Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha).....	12
Tabel II.6	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (Ha).....	13
Tabel II.7	Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya.....	14
Tabel	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun	

II.8	2011.....	14
Tabel II.9	Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) 2010.....	16
Tabel II.10	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan (Ton).....	20
Tabel II.11	Perkembangan Populasi Ternak (ekor).....	22
Tabel II.12	Perkembangan Produksi Ternak (kg).....	23
Tabel II.13	Penangkapan di Laut (Ton).....	24
Tabel II.14	Perikanan di Perairan Umum (Ton).....	26
Tabel II.15	Budidaya Perikanan dan Kelautan (Ton).....	21
Tabel II.16	Hasil dan Luas Tanaman Perkebunan.....	28
Tabel II.17	Perkembangan Produksi hasil Hutan.....	30
Tabel II.18	Perkembangan Areal Hutan.....	30
Tabel II.19	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan (Juta Rupiah).....	32
Tabel II.20	Banyaknya Rumahtangga, Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Rata-Rata Anggota Rumahtangga Hasil Sensus Penduduk 2010.....	33
Tabel II.21	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010.....	34
Tabel II.22	Banyaknya Penduduk menurut Agama per Kecamatan, 2011.....	35
Tabel II.23	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan (Juta Rupiah)	37
Tabel II.24	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan (Juta rupiah)	38
Tabel II.25	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Tahun 2000 (persen) Kabupaten Pamekasan.....	40
Tabel II.26	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Pamekasan.....	42
Tabel II.27	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, 2011.....	43
Tabel II.28	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, 2011.....	44
Tabel II.29	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, 2011.....	45
Tabel II.30	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d. 2012 Kabupaten Pamekasan.....	54

Tabel II.31	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan.....	55
Tabel II.32	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pamekasan.....	57
Tabel II.33	Banyaknya Tenaga Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan.....	58
Tabel II.34	Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	61
Tabel II.35	Data Jumlah Kepala Keluarga per Tahapan KS Hasil Pendataan Keluarg.....	89
Tabel II.36	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2011 Dari PDRB ADHK 2000 (Persen).....	91
Tabel II.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pamekasan 2007-2011.....	96
Tabel II.38	Banyaknya Tindakan Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan 2010-2011....	114
Tabel II.39	Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2011 Kabupaten Pamekasan.....	115
Tabel III.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	122
Tabel III.2	Isu Strategis Jangka Panjang yang Dihadapi Kabupaten Pamekasan.....	131

## DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Angka Putus Sekolah.....	46
Grafik II.2	Balita Gizi Buruk.....	47
Grafik II.3	Angka Kematian Bayi.....	49
Grafik II.4	Angka Harapan Hidup.....	49
Grafik II.5	Jumlah Imunisasi Bayi di Puskesmas.....	50
Grafik II.6	Jumlah Sanggar Seni.....	52
Grafik II.7	Jumlah Atlet dan cabang Olahraga Prestasi.....	53
Grafik II.8	Jumlah Akseptor KB Tahun 2008-2012	87
Grafik II.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2011.....	92
Grafik II.10	Jumlah Penduduk Miskin di Pamekasan tahun 2008-2011.....	93
Grafik II.11	IPM Kabupaten Pamekasan	94
Grafik II.12	Perkembangan Produksi Padi Sawah dan Lahan Kering.....	97
Grafik II.13	Perkembangan Produksi Jagung Pamekasan.....	98
Grafik II.14	Perkembangan Produksi Bawang Merah di Kabupaten Pamekasan.....	100
Grafik II.15	Perkembangan Produksi Durian di Kabupaten Pamekasan.....	101
Grafik II.16	Produksi Cabe Rawit Kabupaten Pamekasan.....	102
Grafik II.17	Perkembangan Produksi Tembakau Madura di Kabupaten Pamekasan	103

Grafik II.18	Produksi Garam Rakyat Kabupaten Pamekasan.....	106
Grafik II.19	Perkembangan Produksi Rumput Laut di Kabupaten Pamekasan.....	107
Grafik II.20	Perkembangan Produksi Teri di Kabupaten Pamekasan.....	108
Grafik II.21	Perkembangan Populasi Sapi Potong Kabupaten Pamekasan.....	109
Grafik II.22	Perkembangan Populasi Ayam Buras Kabupaten Pamekasan.....	110
Grafik II.23	Perkembangan Populasi Ayam Petelur Kabupaten Pamekasan.....	111

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1.      Latar Belakang .....	1
1.2.      Dasar Hukum .....	3
1.3.      Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana .....	5
Pembangunan Lainnya	
1.4.      Sistematika Penulisan .....	7
1.5.      Maksud dan Tujuan .....	8
BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN .....	1
PAMEKASAN	
2.1.      Aspek Geografis dan Demografis .....	1
2.2.      Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	33
2.3.      Aspek Pelayanan Umum .....	50
2.4.      Aspek Daya Saing Daerah .....	97
BAB III    ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....	1
3.1      Permasalahan Pembangunan Daerah .....	2
3.2.      Isu-Isu Strategis .....	16
BAB IV    VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG .....	1
DAERAH	
4.1.      Visi .....	2
4.2.      Misi .....	3

BAB V	SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	1
	JANGKA PANJANG	
5.1.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang .....	6
5.2.	Tahapan dan Prioritas .....	37
BAB VI	KAI DAH PELAKSANAAN .....	1
6.1.	Kaidah.....	2
6.2.	Langkah Pelaksanaan .....	4

DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Keadaan Umum Geografis.....	2
Tabel II.2	Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per Kecamatan 2011.....	2
Tabel II.3	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kemiringan Tanah (Hektar).....	4
Tabel II.4	Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut, 2008-2012 (meter).....	4
Tabel II.5	Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha).....	6
Tabel II.6	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (Ha).....	7
Tabel II.7	Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya.....	8
Tabel II.8	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2011.....	9
Tabel II.9	Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) 2010.....	11
Tabel II.10	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan (Ton).....	16
Tabel II.11	Perkembangan Populasi Ternak (ekor).....	18
Tabel II.12	Perkembangan Produksi Ternak (kg).....	19
Tabel II.13	Penangkapan di Laut (Ton).....	20
Tabel II.14	Perikanan di Perairan Umum (Ton).....	21
Tabel II.15	Budidaya Perikanan dan Kelautan (Ton).....	22
Tabel II.16	Hasil dan Luas Tanaman Perkebunan.....	25
Tabel II.17	Perkembangan Produksi hasil Hutan.....	27
Tabel II.18	Perkembangan Areal Hutan.....	27
Tabel II.19	Potensi Bencana Alam Kabupaten Pamekasan .....	29
Tabel II.20	Banyaknya Rumahtangga, Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Rata-Rata Anggota Rumahtangga Hasil Sensus Penduduk 2010.....	30
Tabel II.21	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010.....	31
Tabel II.22	Banyaknya Penduduk menurut Agama per Kecamatan, 2011.....	32
Tabel II.23	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan (Juta Rupiah)	35
Tabel II.24	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Pamekasan (Juta rupiah)	36
Tabel II.25	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Pamekasan.....	39
Tabel II.26	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, 2011.....	40
Tabel II.27	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, 2011.....	41
Tabel II.28	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, 2011.....	42
Tabel II.29	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d. 2012 Kabupaten Pamekasan.....	51
Tabel II.30	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan.....	52
Tabel II.31	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pamekasan.....	54
Tabel II.32	Banyaknya Tenaga Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan.....	55
Tabel II.33	Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	59
Tabel II.34	Data Jumlah Kepala Keluarga per Tahapan KS Hasil Pendataan Keluarg.....	89
Tabel II.35	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-	

	2011 Dari PDRB ADHK 2000 (Persen).....	91
Tabel II.36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pamekasan 2007-2011.....	96
Tabel II.37	Banyaknya Tindakan Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan 2010-2011....	117
Tabel II.38	Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2011 Kabupaten Pamekasan.....	118
Tabel III.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	9
Tabel III.2	Isu Strategis Jangka Panjang yang Dihadapi Kabupaten Pamekasan.....	20

## DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Angka Putus Sekolah.....	43
Grafik II.2	Balita Gizi Buruk.....	44
Grafik II.3	Angka Kematian Bayi.....	46
Grafik II.4	Angka Harapan Hidup.....	46
Grafik II.5	Jumlah Imunisasi Bayi di Puskesmas.....	47
Grafik II.6	Jumlah Sanggar Seni.....	49
Grafik II.7	Jumlah Atlet dan cabang Olahraga Prestasi.....	50
Grafik II.8	Jumlah Akseptor KB Tahun 2008-2012	87
Grafik II.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2005-2011.....	92
Grafik II.10	Jumlah Penduduk Miskin di Pamekasan tahun 2008-2011.....	93
Grafik II.11	IPM Kabupaten Pamekasan	94
Grafik II.12	Perkembangan Produksi Padi Sawah dan Lahan Kering.....	97
Grafik II.13	Perkembangan Produksi Jagung Pamekasan.....	99
Grafik II.14	Perkembangan Produksi Bawang Merah di Kabupaten Pamekasan.....	100
Grafik II.15	Perkembangan Produksi Durian di Kabupaten Pamekasan.....	102
Grafik II.16	Produksi Cabe Rawit Kabupaten Pamekasan.....	103
Grafik II.17	Perkembangan Produksi Tembakau Madura di Kabupaten Pamekasan	104
Grafik II.18	Produksi Garam Rakyat Kabupaten Pamekasan.....	108
Grafik II.19	Perkembangan Produksi Rumput Laut di Kabupaten Pamekasan.....	109
Grafik II.20	Perkembangan Produksi Teri di Kabupaten Pamekasan.....	111
Grafik II.21	Perkembangan Populasi Sapi Potong Kabupaten Pamekasan.....	112
Grafik II.22	Perkembangan Populasi Ayam Buras Kabupaten Pamekasan.....	113
Grafik II.23	Perkembangan Populasi Ayam Petelur Kabupaten Pamekasan.....	114

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dikembangkan Kabupaten Pamekasan sesungguhnya bukan sebuah proses perubahan sosial yang direncanakan dan terlaksana dalam jangka pendek satu atau lima tahun. Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang sejahtera, adil, makmur dan berdaya bukan saja harus dilakukan secara konsisten melalui implementasi program yang kontekstual, tetapi juga harus dilakukan secara terencana dan terarah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai daerah yang dalam proses transisi dan tengah berkembang, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib dimiliki dan menjadi acuan penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pamekasan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan. RPJPD ini pada dasarnya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif untuk periode 20 tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Bagi Kabupaten Pamekasan, keberadaan RPJPD mutlak diperlukan dan harus segera disusun, karena tanpa adanya RPJPD dikhawatirkan arah perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan menjadi kurang terfokus dan bahkan bukan tidak mungkin rawan bias karena terkontaminasi oleh kepentingan dan intervensi kekuatan politik yang subjektif. Dengan memiliki RPJPD yang jelas, maka seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder terkait

adalah memiliki acuan yang sama, sehingga bisa dikembangkan sinergi yang baik dan produktif.

Sesuai ketentuan yang berlaku, RPJPD Kabupaten Pamekasan ini harus disusun dan memiliki fungsi penting sebagai acuan dan arahan bagi seluruh SKPD dan stakeholder dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, di mana proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, dalam arti melibatkan masukan dan dukungan dari seluruh unsur pelaku pembangunan serta stakeholders terkait. Meski di satu sisi, RPJPD adalah penjabaran dari visi-misi pembangunan daerah, tetapi bagaimana arah kebijakan dan program yang direkomendasikan sesungguhnya adalah hasil masukan dari stakeholder dan refleksi dari aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan selain dipaparkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, juga memuat visi, misi dan sasaran, serta arah pembangunan jangka panjang, juga sekaligus indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. RPJPD Kabupaten Pamekasan ini penting dan wajib disusun karena merupakan pedoman dan arahan bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi masa depan.

RPJPD Kabupaten Pamekasan disusun dengan mempertimbangkan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur, serta mengakomodasi kepentingan dan tantangan permasalahan daerah secara kontekstual. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur dan NKRI, RPJPD Kabupaten Pamekasan yang disusun sejak awal mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Dalam proses penentuan visi-misi, dan prioritas pembangunan, RPJPD Kabupaten Pamekasan juga telah mempertimbangkan RPJPD Kabupaten lain di wilayah Pulau Madura.

Sementara untuk Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang sebagai mana dikatakan dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Permendagri 54, bahwa RPJPD ini hanya memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya, dalam hal ini adalah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep yang mana telah diseleraskan pada saat pelaksanaan konsultasi publik di Provinsi Jawa Timur.

Untuk menjamin objektivitas dan menjaga komitmen kepedulian terhadap kepentingan terbaik masyarakat, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Pamekasan dilakukan secara bottom-up dengan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder dan senantiasa berbasis pada data dan informasi yang akurat. RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 ini ditetapkan setelah dilakukan Musrenbang RPJPD, yaitu forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk menyepakati rancangan awal RPJPD yang telah dipersiapkan sebelumnya.

## 1.2. Dasar Hukum

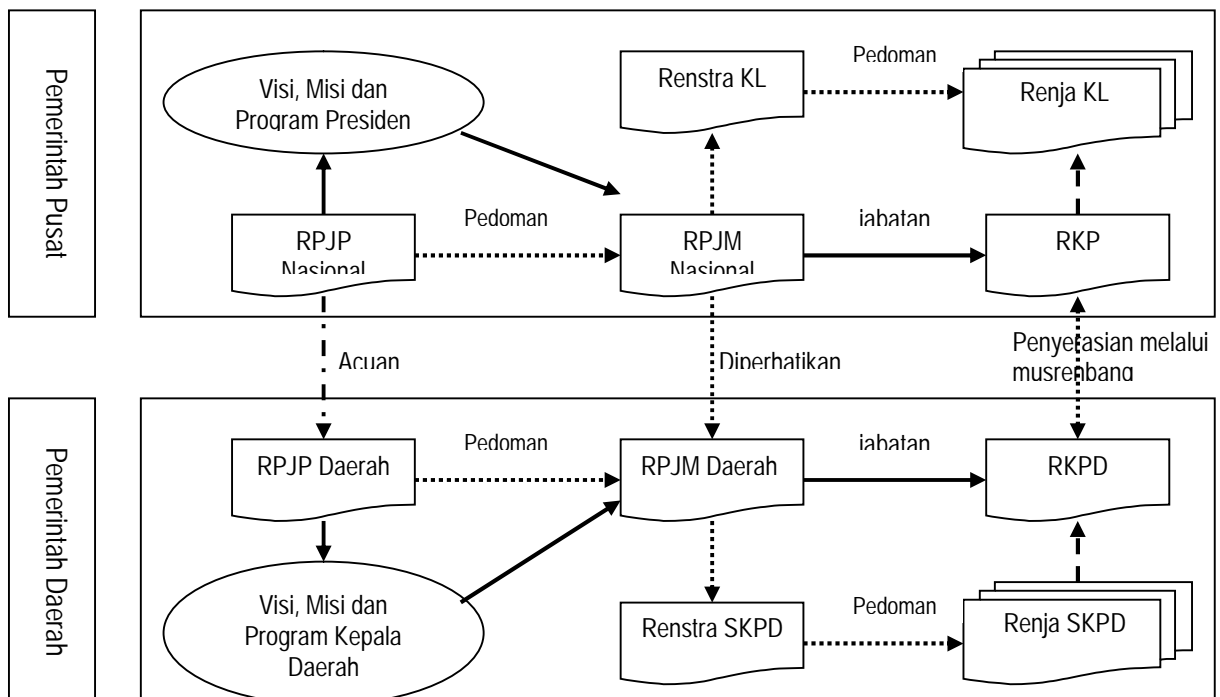
Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan 2005-2025 adalah:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437). Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  8. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stanbdart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007);
  13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
18. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil di Wilayah Propinsi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Propinsi Jawa Timur 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya





Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur, maka RPJPD Kabupaten Pamekasan akan berkedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan dan penganggaran, program pelaksanaan rencana, pengendalian/pengawasan/pemantauan, pengelolaan kegiatan pembangunan, evaluasi dan peninjauan ulang kegiatan pembangunan secara jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, serta menjadi bahan perbaikan bagi keberlanjutan pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya;
2. RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. RKPD merupakan penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Dokumen perencanaan lainnya yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merupakan salah satu sentra pembangunan sosial-ekonomi dan budaya di Provinsi Jawa Timur, dokumen RPJPD Kabupaten Pamekasan sudah barang tentu harus mempertimbangkan RPJPN, RTRW Nasional, dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, dan RTRW Kabupaten Pamekasan sendiri. Program-program pembangunan dan arah pembangunan yang dikembangkan selama 20 tahun ke depan di Kabupaten Pamekasan, meski disusun secara kontekstual dan bersifat

bottom-up, tetapi tetap mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan nasional dan provinsi yang telah ditetapkan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi dari RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lain
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

### BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
- 3.2 Isu Strategis

### BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi

## BAB V : SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

- 5.1 Sasaran Pokok dan Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Masing-masing Misi
- 5.2 Tahapan dan prioritas

## BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

- 6.1 Kaidah
- 6.2 Langkah Pelaksanaan

### 1.5. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan umum bagi pelaksanaan proses pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan berbagai dinas, badan, lembaga lain, dan seluruh stakeholder di Kabupaten Pamekasan, serta sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan. Sedangkan, tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025;
2. Memetakan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan 2005-2025;
3. Merumuskan sasaran dan arah pembangunan jangka panjang serta indikator untuk menakar keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pamekasan;
4. Merumuskan kaidah pelaksanaan program pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pamekasan;
5. Mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi stakeholder dan masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam proses perencanaan program pembangunan jangka panjang;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat;

7. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
8. Menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan per-lima tahunan (\*).

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **KABUPATEN PAMEKASAN**

##### 2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

Kondisi geografis merupakan informasi tentang luas wilayah dan letak geografis wilayah, topografi, hidrologi, klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Sementara Kondisi demografis merupakan informasi mengenai kondisi penduduk di Kabupaten Pamekasan. Berbagai informasi ini perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

##### a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 79.230 Ha dan secara administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep.

##### 2. Letak dan Kondisi Geografis

Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Kawasan Madura. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada 113°19'-113°58' BT dan 6°51'-7°31' LS.

Tabel II.1  
Keadaan Umum Geografis

1. Letak Daerah	113°19'-113°58' BT dan 6°51'-7°31' LS
2. Batas Daerah	
a. Utara	Laut Jawa
b. Selatan	Selat Madura
c. Barat	Kabupaten Sampang
d. Timur	Kabupaten Sumenep
3. Ketinggian dari Permukaan Laut	
a. Tertinggi	350 m
b. Terendah	6 m
4. Musim	
a. Oktober-April	Penghujan
b. April-Oktober	Kemarau
5. Temperatur rata-rata	
a. Maksimum	30° C
b. Minimum	28° C
6. Kelembaban udara rata-rata	80%
7. Jarak Pamekasan-Surabaya	125 km

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari permukaan laut dan yang terendah berada pada Kecamatan Galis setinggi 6 meter. Seperti halnya daerah lainnya di Indonesia, dalam satu tahunnya berlaku dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober-April dan musim kemarau bulan April-Oktober.

Tabel II.2  
Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT per Kecamatan 2012

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	RW	RT
1. Tlanakan	-	17	91	4	8
2. Pademawu	2	20	101	86	233
3. Galis	-	10	53	63	133
4. Larangan	-	14	105	98	222
5. Pamekasan	9	9	35	105	316
6. Proppo	-	27	135	14	20
7. Palengaan	-	12	88	-	-
8. Pegantenan	-	13	85	30	93
9. Kadur	-	10	101	51	144
10. Pakong	-	12	56	16	48
11. Waru	-	12	72	-	-
12. Batumarmar	-	13	94	-	-
13. Pasean	-	9	96	-	-
Jumlah	11	178	1.112	467	1.217

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan, 178 desa dan 11 kelurahan. Selama satu dekade jumlah kelurahan dan desa tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika melihat perkembangan jumlah penduduk cenderung meningkat dan jangkauan wilayahnya maka sudah waktunya ada pemekaran di tingkat desa. Pemekaran di tingkat desa diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran mendesak terutama di daerah yang jumlah penduduknya semakin meningkat serta daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pelayanan publik.

### 3. Topografi

Luas lahan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan yang tentu saja ini memberikan potensi yang berbeda mengenai tata guna lahan. Kecamatan Tlanakan misalnya memiliki kemiringan lahan  $0^{\circ}$ - $15^{\circ}$  yang meliputi seluruh luas lahannya yaitu 4.810 Ha. Kondisi kemiringan lahan yang sama juga berada di Kecamatan Pademawu dan Galis. Sementara itu, beberapa kecamatan lainnya ada yang memiliki tingkat kemiringan lahan hingga  $40^{\circ}$ - $50^{\circ}$  misalnya Kecamatan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Wilayah dengan tingkat kemiringan lahan yang tinggi ini rata-rata merupakan perbukitan yang merupakan dataran tinggi yang memiliki potensi sebagai area pertanian dan perkebunan.

Tabel II.3  
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kemiringan Tanah (Hektar)

Kecamatan	0-15°	15°-25°	25°-40°	40°-45°	Jumlah
1. Tlanakan	4.810	-	-	-	4.810
2. Pademawu	7.189	-	-	-	7.189
3. Galis	3.186	-	-	-	3.186
4. Larangan	3.841	245	-	-	4.086
5. Pamekasan	2.647	-	-	-	2.647
6. Proppo	6.882	267	-	-	7.149
7. Palengaan	6.830	1.880	138	-	8.848
8. Pegantenan	5.733	1.873	513	485	8.604
9. Kadur	3.376	272	638	956	5.242
10. Pakong	1.993	532	113	433	3.071
11. Waru	4.774	1.709	-	720	7.003
12. Batumarmar	3.308	5.808	463	128	9.707
13. Pasean	5.395	1.905	388	-	7.688
Jumlah	59.964	14.291	2.253	2.722	79.230

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Selain kondisi kemiringan lahan yang berbeda, kondisi tingkat ketinggian lahan di seluruh kecamatan juga berbeda. Wilayah yang memiliki ketinggian tinggi dari permukaan laut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai area pertanian, perkebunan dan peternakan, sementara wilayah yang memiliki ketinggian rendah biasanya memiliki potensi kelautan sehingga cocok untuk budidaya perikanan dan garam.

Tabel II.4  
Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan dari Permukaan Laut, 2012 (meter)

Kecamatan	2012
1. Tlanakan	22
2. Pademawu	7
3. Galis	6
4. Larangan	36
5. Pamekasan	15
6. Proppo	47
7. Palengaan	77
8. Pegantenan	312
9. Kadur	140
10. Pakong	250
11. Waru	159
12. Batumarmar	16
13. Pasean	50

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013



Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini kondisi ketinggian lahan tidak mengalami perubahan sama sekali. Wilayah yang memiliki ketinggian lahan tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan yaitu mencapai 312 meter dari permukaan laut. Sementara itu, Kecamatan Galis memiliki ketinggian lahan hanya 6 meter dari permukaan laut serta Kecamatan Pademawu memiliki ketinggian lahan hanya 7 meter dari permukaan laut. Kedua wilayah ini memiliki ketinggian lahan yang lebih rendah jika dibanding dengan wilayah lainnya sehingga lebih cocok untuk dikembangkan sebagai wilayah ekonomi berbasis sumber daya kelautan.

#### 4. Geologi

Struktur tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri dari empat jenis yaitu tanah aluvial, regosol, mediteran, dan litosol. Dengan memiliki jenis lapisan tanah yang berbeda-beda ini menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang beragam. Jenis lapisan tanah aluvial ini banyak terdapat di Kecamatan Pademawu, Pamekasan dan sebagian kecil di Tlanakan. Tanah aluvial ini cocok dimanfaatkan untuk area persawahan. Sedangkan untuk jenis lapisan tanah lainnya bisa terdapat hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan. Secara umum, sebagian besar tanah di Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari tanah jenis regosol dengan luas 26.214 Ha. Jenis tanah regosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk pertanian padi, palawija, kelapa dan tebu. Tanah litosol juga tersebar hampir di seluruh wilayah yaitu sebanyak 19.084 Ha. Tanah litosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan untuk jenis tanaman hutan.

Tabel II.5  
Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (Ha)

Kecamatan	Aluvial	Regosol	Mediteran	Litosol	Jumlah
1. Tlanakan	401	4.409	-	-	4.810
2. Pademawu	3.735	2.779	-	675	7.189
3. Galis	-	2.661	-	525	3.186
4. Larangan	-	1.351	1.359	1.376	4.086
5. Pamekasan	2.572	-	75	-	2.647
6. Proppo	-	1.550	4.665	934	7.149
7. Palengaan	-	4.022	647	4.179	8.848
8. Pegantenan	-	3.234	1.692	3.678	8.604
9. Kadur	-	3.477	-	1.765	5.242
10. Pakong	-	967	1.654	450	3.071
11. Waru	-	3.770	1.468	1.765	7.003
12. Batumarmar	-	6.157	1.536	2.014	9.707
13. Pasean	-	1.686	4.279	1.723	7.688
Jumlah	6.708	26.214	17.375	19.084	79.230

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

Adapun tekstur tanah di Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi tiga kategori yaitu halus, sedang dan kasar. Kasar dan halusnya tanah biasanya ditunjukkan dalam sebaran butir yang merupakan penyederhanaan dari kelas tekstur tanah dengan memperhatikan pula fraksi tanah yang lebih kasar dari pasir (lebih besar 2 mm), sebagian besar butir untuk fraksi kurang dari 2 mm meliputi berpasir lempung, berpasir, berlempung halus, berdebu kasar, berdebu halus, berliat halus, dan berliat sangat halus. Sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 71.685 Ha. Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung memiliki komposisi yang ideal karena terdiri dari debu dan lempung dimana tanah debu cukup subur dan tanah lempung banyak mengandung nutrisi bagi tanaman.

Jika dibandingkan dengan tekstur tanah halus dan kasar yang tidak begitu luas dibanding dengan tekstur tanah sedang, maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang subur. Tekstur tanah sedang yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan akan memberikan hasil optimal bagi tanaman terutama pertanian.

Tabel II.6  
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Tekstur Tanah (Ha)

Kecamatan	Halus	Sedang	Kasar	Jumlah
1. Tlanakan	4.364	276	170	4.810
2. Pademawu	2.255	4.381	553	7.189
3. Galis	-	2.983	203	3.186
4. Larangan	-	4.086	-	4.086
5. Pamekasan	-	2.647	-	2.647
6. Proppo	-	7.149	-	7.149
7. Palengaan	-	8.848	-	8.848
8. Pegantenan	-	8.604	-	8.604
9. Kadur	-	5.242	-	5.242
10. Pakong	-	3.071	-	3.071
11. Waru	-	7.003	-	7.003
12. Batumarmar	-	9.707	-	9.707
13. Pasean	-	7.688	-	7.688
Jumlah	6.619	71.685	926	79.230

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

## 5. Hidrologi

Kabupaten Pamekasan memiliki 12 sungai besar yang memiliki panjang antara 1 km hingga 16 km. Sungai terpendek adalah Sungai Lembung Bunter yang terletak di Kecamatan Pamekasan. Sungai ini memiliki panjang hanya 1 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sementara itu, sungai terpanjang adalah Sungai Sumber Payung juga terletak di Kecamatan Pamekasan dengan panjang 10 km dan bermuara di Sungai Semajid. Sungai-sungai lainnya tersebar di beberapa wilayah seperti Sungai Tambak Ponteh, Egrang, dan Pendi yang terletak di Kecamatan Galis dan bermuara di Selat Madura, serta beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa seperti Sungai Berlanjang, Lesong, Tamberu dan Sungai Angsokah. Keberadaan sungai-sungai ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar karena fungsi bagi masyarakat di sekitarnya seperti fungsi pengairan lahan pertanian dan fungsi ekonomis lainnya.

Tabel II.7  
Nama Sungai, Panjang Sungai dan Muaranya

Nama Sungai	Kecamatan	Panjang Sungai (km)	Muara
1. Kloang	Pamekasan	6	Sungai Semajid
2. Lembung Bunter	Pamekasan	1	Sungai Semajid
3. Sumber Payung	Pamekasan	10	Sungai Semajid
4. Jombang	Pamekasan	4	Sungai Semajid
5. Semajid	Pamekasan/Pademangan	16	Selat Madura
6. Tambak Ponten	Larangan/Galis	9	Selat Madura
7. Pendi	Larangan/Galis	9	Selat Madura
8. Egrang	Larangan/Galis	8	Selat Madura
9. Berlanjang	Waru	5	Laut Jawa
10. Lesong	Batumarmar	6	Laut Jawa
11. Tamberu	Batumarmar	5	Laut Jawa
12. Angsokah	Pasean	6	Laut Jawa

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

## 6. Klimatologi

Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah hujan merupakan besarnya volume/intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan satuan mm. Sedangkan hari hujan adalah satu hari dimana terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ini ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama dalam kurun waktu satu tahun pengamatan.

Tabel II.8

## Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Setiap Stasiun Tahun 2012

Nama Stasiun	Curah Hujan	Hari Hujan
1. Galis	458	37
2. Kadur	1.327	81
3. Klampar	1.338	57
4. Larangan	1.050	83
5. Lawangan Daya	854	78
6. Pademawu	636	52
7. Palengaan	1.676	100
8. Panempan	781	62
9. Pasean	1.169	58
10. Pegantenan	1.711	83
11. Proppo	1.488	96
12. Pakong	1.080	98
13. Tlanakan	760	49
14. Toronan	956	70
15. Waru	1.535	87

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

Pada tahun 2012 curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan yaitu 1.711 mm dengan mengalami 83 hari hujan dalam waktu satu tahun. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di wilayah Galis yaitu 458 mm dengan mengalami 37 hari hujan selama setahun. Tinggi rendahnya curah hujan dan banyaknya hari hujan di berbagai wilayah di Pamekasan ini berbeda-beda, namun secara umum kondisi curah hujan dan hari hujan di Pamekasan tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Jawa.

Meskipun kondisi curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Pamekasan tidak jauh berbeda dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air menyebabkan sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan masih banyak berharap belas kasih sang hujan. Kondisi ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan suplai air pada saat musim kemarau.

#### 7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2012, penggunaan lahan di Kabupaten Pamekasan sebagian besar merupakan tegalan yaitu seluas 32.966,34 Ha. Penggunaan lahan sebagai tegalan ini terkait dengan kondisi topografi Kabupaten Pamekasan yang merupakan daerah perbukitan dan

sebagian lagi merupakan tanah tandus seluas 15.920,43 Ha. Kondisi tanah yang tandus ini biasanya menjadi kendala bagi penduduk yang tinggal dalam mengembangkan perekonomian karena tanah semacam ini kurang produktif bagi pertanian yang merupakan mata pencaharian penduduk pedesaan.

Penggunaan lahan yang lainnya adalah sebagai daerah pemukiman seluas 11.531,70 Ha, sementara untuk jasa perdagangan hanya 26,30 Ha saja dan industri pertanian seluas 92,40 Ha. Adapun penggunaan lahan sebagai area pertambangan hanya 9 Ha saja dan hanya terdapat di Kecamatan Kadur. Penggunaan tanah lainnya yaitu untuk area pertanian meliputi sawah irigasi seluas 1.386 Ha yang hanya terdapat di Kecamatan Tlanakan, Galis dan Pakong. Sawah semi irigasi seluas 5.213,03 yang ada di semua kecamatan dan sawah tadah hujan seluas 8.569 Ha yang juga tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel II.9  
Penggunaan Tanah per Kecamatan (Ha) 2010

Kecamatan	Pemukiman/ Perkampungan	Kuburan	Jasa Perda ngan	Industri Pertanian	Tam bang	Sawah irigasi	Sawah semi irigasi	Sawah tadah hujan	Tegalan	Hutan sejenis	Tambak garam	Tanah tandus/ rusak	Jumlah
1. Tlanakan	555,22	13,50	1,50	14	-	114	14,03	733	2.129,60	338	268	629,15	4.810
2. Pademawu	793,08	20	1,60	32,40	-	-	1.857,00	951	2.287,42	238	1.008,50	-	7.189
3. Galis	282,62	7,10	3,40	5,50	-	578	72,00	257	891,39	269	820	-	3.186,01
4. Larangan	890,80	22,00	1,50	12,10	-	-	497,00	241	1.924,53	-	-	497,07	4.086
5. Pamekasan	937,62	22,60	6,50	4,50	-	-	370,00	158	1.147,78	-	-	-	2.647
6. Proppo	1.266,78	33,20	1,90	-	-	-	284,00	2.22	2.570,87	-	-	772,25	7.149
7. Palengaan	1.563,22	20,20	1,70	-	-	-	258,00	336	3.725,28	-	-	2.943,60	8.848
8. Pegantenan	2.171,93	54,00	1,50	3	-	-	280,00	15	3.790,97	-	-	2.287,60	8.604
9. Kadur	872,49	21,80	1,50	6,50	9	-	186,00	11	2.483,56	-	-	1.650,15	5.242
10. Pakong	482,31	10,80	1,50	11,50	-	694	600,00	354	215,29	219	-	701,60	3.290
11. Waru	885,00	22,60	1,50	1,20	-	-	553,00	586	2.270,59	94	-	2.464,11	6.878
12. Batumarmar	368,50	9,50	1,20	1,70	-	-	115,00	2.580	4.882,10	-	-	1.655	9.613
13. Pasean	462,13	11,60	1,00	-	-	-	127,00	127	4.639,37	-	-	2.319,90	7.688
Jumlah	11.531,70	268,90	26,30	92,40	9	1.386	5.213,03	8.569	32.958,75	1.158	2.096,50	15.920,43	79.230,01

Sumber : Pabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

Keberadaan sawah irigasi yang masih menjangkau tiga kecamatan ini perlu ditingkatkan jangkauannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pamekasan sehingga petani tidak hanya tergantung pada musim penghujan saja. Meskipun diluar musim penghujan para petani masih bisa survive dengan menanam tanaman jagung atau tembakau namun kekeringan juga bisa menjadi kendala bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian dengan kualitas terbaik.

Bagi masyarakat yang tinggal disepanjang garis pantai, memanfaatkan lahan untuk tambak garam. Luas area tambak garam di Kabupaten Pamekasan adalah 2.096,50 Ha yang tersebar di Kecamatan Tlanakan, Pademawu dan Galis. Sedangkan lahan yang digunakan untuk hutan seluas 1.158 Ha yang tersebar di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Pakong dan Waru. Keberadaan area hutan ini perlu dilestarikan di tingkatkan karena selain fungsi ekonomis, hutan juga memiliki fungsi sebagai daerah resapan air yang bisa meminimalisasi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Seringkali alih fungsi lahan dari hutan ke pertanian atau untuk permukiman kurang memperhatikan dampak lingkungan yang demikian. Oleh sebab itu, mengenai tata guna lahan harus benar-benar terencana dengan baik terutama mengedepankan dampak lingkungan dalam proses pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

## b. Potensi Pengembangan Wilayah

### 1. Pertanian

Program swasembada pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Beberapa komoditas pertanian yang menjadi produk unggulan Kabupaten Pamekasan antara lain padi. Padi merupakan tanaman pangan pokok di Kabupaten Pamekasan yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Tanaman padi di Kabupaten Pamekasan ditanam pada bulan November-Maret pada saat musim hujan. Lahan yang ditanami padi pada umumnya adalah sawah irigasi teknis maupun tadah hujan. Budidaya tanaman padi di



Kabupaten Pamekasan terdiri dari dua sistem budidaya yaitu padi sawah dan padi ladang. Padi sawah pada umumnya terdapat di daerah irigasi teknis sedangkan padi ladang merupakan padi tadah hujan.

Produksi tanaman padi di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah produksi padi sebanyak 127.391 ton, pada tahun 2012 mencapai 158.195 ton dengan daerah penghasil terbanyak adalah Kecamatan Pademawu dan Proppo.

Selama ini, tanaman padi sebagian besar hanya dikonsumsi petani sehingga nilai ekonomi dan nilai tambah padi tidak tereksploitasi secara maksimal. Oleh karena itu, peluang investasi masih terbuka sangat luas untuk industri beras, tepung beras dan industri makanan olahan lainnya.

Produksi tanaman pangan unggulan yang lain adalah jagung. Jagung merupakan makanan pokok masyarakat Madura. Oleh karena itu, jagung mempunyai tempat tersendiri dalam hal pemasaran maupun penanamannya. Budidaya tanaman jagung lokal Madura sangat mudah untuk dilaksanakan karena tidak membutuhkan perawatan yang sulit sehingga biayanya murah. Tanaman jagung tersebar merata di seluruh Kabupaten Pamekasan dan pada umumnya di tanam di ladang. Berdasarkan aspek kesesuaian lahan, Kabupaten Pamekasan sangat cocok untuk dikembangkan budidaya tanaman jagung baik jagung lokal maupun jagung hibrida.

Perkembangan produksi jagung di Kabupaten Pamekasan ini juga terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2008 produksi jagung di Kabupaten Pamekasan mencapai 97.864 ton dan pada tahun 2012 mencapai 154.433 ton. Adapun wilayah penghasil jagung terbesar adalah Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Palengaan.

Peluang investasi tanaman jagung berupa budidaya jagung hibrida yang selama ini masih belum banyak berkembang meskipun mempunyai nilai potensi produksi yang prospektif karena mampu menghasilkan produksi yang cukup tinggi. Selain untuk investasi secara on farm, investor dapat

menanam modalnya pada sektor off farm berupa pengolahan makanan berbasis jagung, tepung dan pakan ternak.

Selain tanaman pangan padi dan jagung masih banyak produk hortikultural lainnya yaitu ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau. Sedangkan tanaman hortikultural buah-buahan yang menjadi produk unggulan adalah mangga. Mangga merupakan jenis buah tropis yang dapat dibudidayakan hampir diseluruh Pamekasan dan banyak disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu, mangga mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bagi petani. Mangga dapat diolah menjadi berbagai macam produk turunan seperti makanan maupun minuman dan produk lainnya. Berbagai varietas mangga yang ditanam di Kabupaten Pamekasan diantaranya mangga gadung, harum manis dan lali jiwo. Keberadaan tanaman mangga di Kabupaten Pamekasan merata diseluruh kecamatan yang ada. selain yang diusahakan atau dibudidayakan secara sistematis, tanaman mangga hampir ada disetiap pekarangan penduduk.

Permasalahan yang melanda para petani mangga adalah anjloknya harga mangga pada saat musim panen raya tiba. Fenomena tersebut disebabkan karena saat panen yang bersamaan jumlah penawaran lebih tinggi dari permintaan sehingga harga menjadi anjlok. Maka tidak heran jika produksi mangga selama kurun waktu 2008 hingga 2012 terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2008 jumlah produksi mangga di Kabupaten Pamekasan bisa mencapai 12.666 ton, pada tahun 2012 jumlah produksi mangga hanya 8.135 ton.

Produk buah unggulan yang lain adalah durian. Durian yang selama ini dikenal sebagai salah satu buah yang cukup digemari oleh masyarakat dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Di Kabupaten Pamekasan, tanaman durian berkembang cukup pesat di daerah dataran tinggi yakni di Kecamatan Pegantenan (312 m dpl) dan Kecamatan Pakong (250 m dpl). Kedua kecamatan tersebut memang terkenal sebagai penghasil durian dengan kualitas yang cukup baik. pengembangan dan budidaya tanaman durian di Kabupaten Pamekasan masih dikelola secara tradisional

(diperbanyak melalui biji) sehingga belum mampu memproduksi secara maksimal dan membutuhkan waktu berbuah yang relatif lama.

Produksi durian dari tahun 2008 hingga tahun 2009 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 produksi mencapai 565 ton hingga pada tahun 2012 mencapai 2.143 sungguh peningkatan yang signifikan. Jenis durian yang dibudidayakan adalah jenis durian lokal. Para petani belum mampu melakukan rekayasa teknologi seperti kultur jaringan, cangkok dan lain-lain untuk memperbanyak tanaman durian secara massal dan dalam waktu yang relatif singkat.

Jika hal tersebut dapat dilakukan maka jumlah produksi durian di Kabupaten Pamekasan dapat meningkat karena didukung juga oleh kesesuaian lahan dan faktor iklim yang cocok. Sementara itu, areal pemasaran durian di Kabupaten Pamekasan relatif masih terbatas di pasar lokal dan sedikit di pasar regional. Keterbatasan tersebut disebabkan karena jumlah produksi durian yang sangat kecil sehingga wilayah pemasarannya juga menjadi terbatas. Padahal durian memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi karena harga yang relatif stabil di pasar meskipun memasuki masa panen raya.

Tabel II.10  
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan (Ton)

Pertanian	2008	2009	2010	2011	2012
1. Padi	127.391	130.858	141.331	149.598	158.195
2. Jagung	97.864	121.961	141.680	144.056	154.433
3. Ubi kayu	34.270	31.272	31.529	32.948	15.126
4. Ubi jalar	658	662	444	475	1.120
5. Kedelai	968	1.953	1.460	1.526	1.432
6. Kacang tanah	3.191	4.501	5.033	4.923	4.065
7. Kacang hijau	1.006	1.145	1.151	1.203	919
8. Buah-buahan					
- Jeruk	25	32	92	197	242
- Durian	565	555	949	3.122	2.143
- Rambutan	224	268	557	7.158	581
- Mangga	12.666	11.749	13.642	78.042	8.135
- Jambu air	129	286	491	513	525
- Pisang	1.980	3.966	6.398	6.686	7.246
9. Sayur-sayuran					
- Bawang merah	9.006	10.157	14.960	15.633	15.854
- Cabe rawit	6.054	9.014	10.791	11.277	26.061
- Cabe besar	3.192	3.192	3.479	3.636	2.925
- Kacang panjang	880	1.853	3.906	4.082	2.595
- Tomat	626	754	2.538	2.652	1.783
- Terong	159	262	683	1.012	760

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

Kabupaten Pamekasan juga memiliki potensi untuk budidaya tanaman sayuran antara lain bawang merah, cabe rawit, cabe besar, kacang panjang, tomat dan terong. Bawang merah merupakan salah satu jenis komoditi unggulan dari Kabupaten Pamekasan karena mempunyai ciri yang khas yakni beraroma tajam dan berbentuk bulat lonjong. Jenis bawang merah yang dibudidayakan adalah varietas Manjung.

Perkembangan produksi bawang merah di Kabupaten Pamekasan selama 2008 hingga 2012 terus mengalami peningkatan yakni dari 9.006 ton pada tahun 2008 menjadi 15.854 ton pada tahun 2012.

Kualitas bawang merah Kabupaten Pamekasan yang baik merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun regional. Pengembangan luas panen dan peningkatan produksi bawang merah masih sangat terbuka luas karena ketersediaan lahan yang memadai dan sarana produksi (saprodi) yang memadai.

Sementara itu, pengembangan produk turunan bawang merah untuk industri makanan juga memiliki prospek yang baik.

Selain bawang merah, cabe rawit atau lombok juga merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, fluktuatif dan sensitif sehingga menjadi isu nasional apabila terjadi fluktuasi harga lombok kecil atau cabe di pasar. Oleh karena itu, pengembangan budidaya cabe rawit untuk menuju swasembada cabe nasional merupakan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan cabe di Kabupaten Pamekasan.

Hingga 2012 produksi cabe rawit mencapai 26.061 ton, jumlah ini lebih banyak jika dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah produksi merupakan suatu hal yang positif dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi di Kabupaten Pamekasan. Adapun wilayah pemasaran cabe rawit atau lombok kecil hasil produksi Kabupaten Pamekasan telah mampu menembus pasar regional seperti Surabaya hingga Jakarta. Kondisi tersebut dapat terlihat pada padatnya arus pengiriman cabe rawit dari Pamekasan keluar Madura menggunakan truk. Peluang pengembangan cabe tidak hanya untuk konsumsi secara langsung tetapi juga dapat digunakan untuk industri makanan dan bumbu masakan.

## 2. Peternakan

Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang besar di sektor peternakan. Hal ini dapat terlihat dari catatan yang ada dalam kurun waktu 2008 hingga 2012 sebagian besar sektor peternakan mengalami perkembangan yang positif. Budidaya ternak yang ada di Kabupaten Pamekasan ini meliputi ternak besar maupun ternak kecil. Adapun jenis peternakannya antara lain sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam bukan ras, ayam ras pedaging, itik dan entok.

Sapi potong merupakan salah satu komoditi pada sektor peternakan yang paling menonjol di Kabupaten Pamekasan. Jumlah populasi sapi potong terus menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2008 populasi sapi potong hanya 97.899 ekor maka pada tahun 2012 populasinya mencapai 142.445 dengan penghasil utama adalah Kecamatan

Pasean. Sampai saat ini sistem ternak sapi dilakukan secara individu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Sapi Madura ini selain untuk dikonsumsi dagingnya juga dibuat sebagai hewan pacu (kerapan sapi).

Sapi potong adalah sapi jantan berumur antara 2,5-3,5 tahun yang digemukkan dengan sistem kereman dengan masa kerem sekitar 4-6 bulan dikandangkan terus menerus dan tidak dipekerjakan dengan pemberian pakan yang teratur serta jenis pakan (rumput) pilihan sesuai petunjuk serta kebutuhan gizinya terpenuhi. Sapi Madura hasil penggemukan dengan sistem kereman ini akan mempunyai kualitas daging yang baik dan harga jual yang lebih tinggi daripada daging sapi biasa. Dari segi pemasaran, sapi potong sudah merambah hingga ke seluruh pulau Jawa.

Sementara itu, ternak kecil yang banyak dikembangkan adalah ayam bukan ras atau ayam petelur mengingat kebutuhan masyarakat Pamekasan sangat tinggi akan telur ayam dan belum lagi permintaan dari luar Pamekasan yang juga sangat tinggi maka peluang bisnis di sektor ini sangat besar untuk digeluti.

Tabel II.11  
Perkembangan Populasi Ternak (ekor)

No	Peternakan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Sapi potong	97.899	123.597	124.780	127.674	142.445
2.	Sapi perah	15	16	14	18	18
3.	Kambing	42.615	57.978	60.140	62.397	62.450
4.	Domba	34.627	21.488	21.475	21.563	21.480
5.	Ayam ras petelur	149.925	142.281	251.870	243.590	431.219
6.	Ayam bukan ras	603.747	765.908	771.524	771.480	771.510
7.	Ayam ras pedaging	255.600	249.000	210.750	456.908	175.900
8.	Itik	45.186	44.941	45.744	48.490	48.484
9.	Entok	19.962	20.200	20.538	20.454	20.460

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

Oleh sebab itu, perkembangan populasi ayam bukan ras dari tahun-ke-tahun terus mengalami peningkatan. Menurut catatan pada tabel II.11, jumlah populasi ayam bukan ras pada tahun 2008 hanya 603.747 ekor, namun pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2012 jumlahnya

meningkat menjadi 771.510 ekor. Selain ayam bukan ras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik dan entok juga memiliki peluang bisnis yang cukup besar untuk digeluti masyarakat.

Adapun produksi dari ternak adalah berupa telur dan daging. Jika dilihat dari tabel II.12 maka terlihat bahwa perkembangan produksi ternak bersifat fluktuatif dari kurun waktu 2008 hingga 2012. Pada tahun 2008 jumlah produksi telur mencapai 1.960.479 kg dan mengalami peningkatan hingga tahun 2010 menjadi 2.289.843 kg. Perkembangan produksi pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 2.667.300 kg dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan produksi menjadi 3.633.000 kg.

Tabel II.12  
Perkembangan Produksi Ternak (kg)

Peternakan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Telur	1.960.479	2.025.000	2.789.843	2.667.300	3.633.000
2. Daging	7.557.539	8.238.000	7.778.327	6.356.100	6.634.000

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

Kondisi yang sama juga terlihat pada produksi daging. Dari kurun waktu 2008 hingga 2009 jumlah produksi mengalami kenaikan dari 7.557.539 kg menjadi 8.238.000 kg. Namun pada tahun-tahun berikutnya hingga 2011 produksi daging mengalami perkembangan yang negatif yakni terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sebanyak 8.238.000 kg menurun menjadi 6.356.100 kg pada tahun 2011 sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6.634.000 kg. Kondisi penurunan jumlah produksi daging ini dipengaruhi oleh banyak faktor terutama persaingan pasar karena para peternak tidak hanya bersaing dengan produsen lokal tetapi juga regional bahkan skala nasional dan internasional.

### 3. Perikanan dan Kelautan

Sektor perikanan pada dasarnya di bagi dalam perikanan darat dan laut. Adanya sumber daya laut ini telah memberikan banyak nilai ekonomis bagi masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja. Bukan hanya

penyerapan dalam penangkapan ikan tetapi juga dalam hal pengolahan, pedagang, serta sarana perikanan laut seperti alat tangkap dan transportasi.

Di Kabupaten Pamekasan ada 27 jenis komoditi tangkapan laut. Namun tangkapan paling utama adalah ikan teri yang mencapai 5.003,40 ton pada tahun 2012. Jumlah tangkapan ini lebih banyak jika dibanding jenis komoditas lainnya seperti ikan cakalang, ikan layang, ikan kembung, bloso dan tangkapan lainnya. Namun untuk pengolahan ikan di Kabupaten Pamekasan ini belum maksimal sehingga masih perlu diupayakan inovasi-inovasi pengolahan ikan untuk menambah nilai ekonomi ikan sebagai komoditi dari tangkapan laut.

Tabel II.13  
Penangkapan di Laut (Ton)

Jenis Tangkapan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Peperek	901,3	894,9	808,7	875,3	1.037,90
2. Bloso	332,9	372,3	337	365,3	336,30
3. Kurisi	34,4	123,8	202,1	246,4	171,00
4. Kakap/bambangan	34,4	2,4	-	-	-
5. Ekor kuning	232,3	277,5	313,2	259	304,20
6. Bawal hitam	569,7	428,9	411,2	401,7	297,10
7. Pari	13,7	-	-	-	-
8. Layang	1.648	2008,6	1.749,60	634,7	2.752,70
9. Selar	459,6	533,4	420,1	193,9	384,30
10. Lencam	208,6	103,3	77,7	-	-
11. Tembang	99,2	56,8	12	25,5	-
12. Teri	1.751,30	5.708,10	5.448,20	4.666,1	5,003,40
13. Lemuru	545,8	607,8	442	426,1	507,30
14. Kembung	553,4	738,5	768,7	1.092,90	1.861,80
15. Tenggeri	623,9	620,9	923,4	653,8	517,10
16. Tongkol	111,4	1.230,30	1.439,50	1.881,20	1.354,00
17. Cakalang	1.364,90	1.879,9	2.034,30	2.619,80	2.327,00
18. Layur	295,4	347,1	402,3	341,6	321,00
19. Ikan lainnya	838,6	2.369,80	2.828,30	3.022,20	2.721,00
20. Ikan karang/kerapu	71,6	36,1	19,2	12,3	23,80
21. Udang lainnya	117,8	250	215,7	168,8	219,30
22. Cumi-cumi	147,2	142,1	357	168,8	147,90
23. Rajungan	306,6	433,5	172	110,4	222,80
24. Belanak	-	4	196,1	-	-
25. Kuniran	-	132,2	-	-	-
26. Kwee	-	-	-	271,4	92,40
27. Julung-julung	-	-	-	61,9	-

Sumber : Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2013



Jika dibanding dengan hasil tangkapan perikanan laut, maka hasil perikanan di perairan umum jumlahnya lebih sedikit. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Pamekasan yang banyak dikelilingi oleh lautan daripada perairan umum. Adapun hasil perikanan di perairan umum adalah ikan Tawes, Mujair, Gabus, Lele dan ikan lainnya. Mengamati pada tabel II.14, maka jumlah produksi perikanan di perairan umum ini tidak menentu. Lele produksinya mencapai 266,30 ton pada tahun 2012 meskipun pada tahun-tahun sebelumnya tidak diproduksi. Sedangkan mujair pada tahun 2009 mencapai 3.200 ton, namun pada tahun 2010 tidak memproduksi dan pada tahun 2011 menghasilkan sebanyak 19,4 ton hingga pada tahun 2012 menjadi 2,8 ton ikan mujair.

Selain itu, kondisi yang sama juga terjadi pada ikan gabus yang merupakan komoditi unggulan. Jika pada tahun 2009 hasil produksi ikan gabus bisa mencapai 20.500 ton, maka pada tahun 2012 produksinya tinggal 5,8 ton. Hal ini karena minat terhadap perikanan di perairan umum masih dibidang kurang karena bagaimanapun perikanan laut lebih menjanjikan dan banyak diminati oleh pasar.

Demikian tadi beberapa jenis tangkapan dari kelautan dan perairan umum. Sedangkan budidaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi tiga yaitu budidaya air payau (tambak), air laut, dan air tawar (kolam). Salah satu komoditi unggulan dari budidaya air payau adalah udang vannamei yang produksinya mencapai 274,80 ton pada tahun 2012. Udang vannamei ini memiliki beberapa keunggulan antara lain responsif terhadap pakan yang diberikan atau nafsu makan yang tinggi, lebih tahan terhadap serangan penyakit dan lingkungan yang kurang baik, dengan padat tebar cukup tinggi.

Tabel II.14  
Perikanan di Perairan Umum (Ton)

Jenis Ikan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Tawes	12,8	12.400	11,2	8,9	7,30
2. Mujair	7,5	3.200	-	19,4	2,8
3. Gabus	18,2	20.500	20,3	10,3	16,20
4. Lele	-	-	-	-	266,30
5. Ikan lainnya	15,6	17.800	23,4	11,9	21,41

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Kegiatan usaha budidaya udang vannamei di Kabupaten Pamekasan telah di mulai pada tahun 2007, di mana Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan melalui dana APBD melakukan upaya terobosan berupa Demplot Budidaya udang vannamei yang dilokasikan di Desa Polangan Kecamatan Galis sebanyak 2 unit dan Desa Montok Kecamatan Larangan sebanyak 4 unit. Dalam perkembangannya Demplot budidaya udang vannamei ini sangat memberikan manfaat bagi pembudidaya udang vannamei baik dalam peningkatan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya pada tahun 2008, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan mengalokasikan dana APBN (DAK) untuk menunjang dan mengembangkan usaha budidaya udang vannamei ini berupa kegiatan normalisasi saluran inlet air tawar dan normalisasi saluran tambak. Mengingat budidaya udang vannamei mempunyai prospek yang sangat menjanjikan, peluang pasar masih terbuka luas, serta pemasaran yang cukup mudah, pada tahun 2010 pembudidayaan udang vannamei mengembangkan usaha pembudidayaannya tersebut dengan membuka lahan baru (tambak) di Desa Lembung Kecamatan Galis. Dimana untuk Desa Lembung Kecamatan Galis sebanyak 22 unit, Desa Polangan Kecamatan Galis sebanyak 14 unit dan Desa Montok Kecamatan Larangan sebanyak 23 unit.

Tabel II.15  
Budidaya Perikanan dan Kelautan (Ton)

Budidaya	2008	2009	2010	2011	2012
1. Air Payau (Tambak)					
- Udang	0,6	-	-	0,745	0,33
- Udang putih	2	-	-	58,95	11,55
- Bandeng	11,9	19,4	16,5	-	7,80
- Belanak	-	-	-	53,26	-
- Ikan lainnya	1	-	3,7	255,26	21,41
- Udang vannamei	24	77,1	236,5	-	274,80
- Lainnya	-	1	-	1,24	0,475
2. Air laut					
- Rumput laut	81,5	267,99	976,3	1.231,01	41,70

Budidaya	2008	2009	2010	2011	2012
3. Air Tawar (Kolam)					
- Mas/Tombro	-	-	-	1,82	-
- Lele	23,7	25,3	43	128,756	266,30
- Nila	0,1	-	2,3	1.577	-
- Ikan lainnya	-	-	0,3	-	21,41
- Gurame	0,4	-	-	0,295	0,08

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2013

Komoditi perikanan dan kelautan lainnya adalah rumput laut yang jumlah produksinya mencapai 41,70 ton pada tahun 2012. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sepanjang pantai Madura khususnya Kabupaten Pamekasan memiliki potensi sumber daya hayati yang sangat besar selain keberadaan hasil ikan, yaitu hasil rumput lautnya. Komoditi rumput laut ini sangat cocok untuk bahan-bahan makanan maupun kosmetik yang hingga saat ini sudah go public ke Manca negara. Kondisi perairan laut di Kabupaten Pamekasan sangat cocok untuk mengembangkan rumput laut meskipun nilai produksinya masih kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan nilai produksi rumput laut di Kabupaten Pamekasan.

Ketersediaan sumber daya yang potensial dan tenaga kerja yang melimpah merupakan modal dasar yang kuat untuk menjadikan Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah yang strategis diantaranya mengembangkan rakitan teknologi budidaya rumput laut dan penguatan akses permodalan bagi para petani rumput laut. Penguatan rakitan teknologi budidaya rumput laut sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat menuntut konsistensi pasokan rumput laut. Penguatan modal bagi para petani rumput laut berguna untuk menunjang dan mengembangkan kapasitas usaha para petani sehingga dapat berkembang menjadi lebih besar dan menguntungkan.

Sumberdaya dan kondisi perairan yang masih sangat luas untuk mengembangkan budidaya rumput laut merupakan kesempatan dan

peluang untuk meningkatkan nilai produksi dan luas areal budidaya rumput laut. Persebaran budidaya rumput laut perlu diperluas sehingga tidak hanya berkembang di satu wilayah misalnya Desa Padelegan Kecamatan Pademawu. Perluasan tersebut dapat dilakukan di wilayah yang memiliki sumberdaya perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Pamekasan.

Budidaya perikanan dan kelautan lainnya yang tidak kalah penting adalah emas putih atau yang lebih kita kenal sebagai garam yang diproduksi untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri. Madura di sebut sebagai pulau garam karena merupakan daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Sentra pengembangan garam di Kabupaten Pamekasan berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Pademawu (Desa Padelegan, Bunder, Tanjung, Majungan, Baddurih dan Dasok), Kacamatan Galis (Desa Lembung, Konang, Polagan, dan Pandan), Kecamatan Tlanakan (Desa Branta Pesisir dan Branta Tinggi).

Namun pengembangan produksi garam di Kabupaten Pamekasan terkendala oleh berbagai hal yaitu harga yang tidak stabil, gangguan cuaca ekstrem, teknologi yang masih rendah sehingga menyebabkan rendahnya kualitas garam yang dihasilkan oleh para petani garam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas garam yang dihasilkan oleh petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam di Kabupaten Pamekasan.

#### 4. Kehutanan dan Perkebunan

Meskipun Kabupaten Pamekasan terletak di sepanjang pantai Madura, namun Kabupaten Pamekasan juga memiliki potensi kehutanan dan perkebunan. Hasil perkebunan Kabupaten Pamekasan antara lain tembakau, kelapa, jambu mente, cabe jamu, randu, pinang, asam jawa dan kopi.

Seperti halnya kabupaten di Madura lainnya, Kabupaten Pamekasan juga memiliki komoditi unggulan berupa tembakau. Bahkan tembakau telah menjadi ciri khas Kabupaten Pamekasan pada khususnya dan Pulau

Madura pada umumnya. Tembakau Madura memiliki ciri warna kuning terang agak kehijauan dengan aroma dan citra rasanya yang khas. Varietas tembakau Madura adalah varietas Prancak yang merupakan varietas lokal Madura. Tembakau Madura merupakan komponen utama dalam produksi rokok kretek.

Tabel II.16  
Hasil dan Luas Tanaman Perkebunan

Perkebunan	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Tembakau	Ton	16.384	13.918	3.836	16.688	19.236
	Ha	29.050	32.205	18.622	28.540	31.251
2. Kelapa	Ton	4.785	3.897	3.531	6.169,20	3.624,10
	Ha	5.373	5.930	5.392	5.934	5.908
3. Jambu mente	Ton	45	53,75	44,75	47,92	56,42
	Ha	180	180	205	424,02	216,5
4. Cabe jamu	Ton	167,60	462	440	507,50	451,85
	Ha	452	498	498	549,50	535
5. Kopak randu	Ton	124,13	278,50	228	271	34,6
	Ha	893	893	895	906	904
6. Pinang	Ton	120,50	113,50	112	121,95	110
	Ha	92	92	102	111	106
7. Asam jawa	Ton	440,90	503	274,20	457,61	490,06
	Ha	213	204,50	213	214,50	213
8. Kopi	Ton	5,56	5,33	5,20	5,20	5,25
	Ha	11	11	11	11	11

Sumber : Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2013

Bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan, budidaya atau menanam tembakau bukan hanya sekedar rutinitas yang dilakukan setiap musim tanam tiba tetapi juga merupakan suatu budaya atau kultur yang melekat pada masyarakat Madura. Sebagai bukti nyata, para petani tembakau di Kabupaten Pamekasan setiap kali tiba musim tanam pasti akan menanam tembakau meskipun terkendala cuaca dan lahan yang kurang sesuai untuk tanaman tembakau. Keinginan kuat dan kultur tersebut merupakan suatu modal sosial yang kuat untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi tembakau yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Secara aspek ekonomi, banyaknya jumlah gudang tembakau yang dimiliki oleh pabrikan rokok nasional di Kabupaten Pamekasan dapat memudahkan arus pemasaran tembakau petani secara langsung ke pabrikan. Adapun jumlah hasil tanaman tembakau mencapai 19.236 ton dengan luas lahan

31.251 Ha pada tahun 2012. Budidaya tanaman tembakau ini tersebar di seluruh wilayah di Pamekasan terutama Kecamatan Pademawu, Proppo dan Pakong.

Komoditi perkebunan lainnya adalah kelapa. Kelapa merupakan komoditas perkebunan yang banyak tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pamekasan. Kelapa merupakan komoditas yang hampir sepanjang tahun selalu memproduksi dan tidak mengenal musim sehingga jumlah produksi relatif stabil. Demikian juga dengan jumlah konsumsi kelapa relatif tinggi karena merupakan kebutuhan pokok setiap hari yang banyak dibutuhkan masyarakat dalam bentuk barang mentah, setengah jadi atau produk olahan jadi.

Jumlah produksi kelapa mencapai 3.624,10 ton dengan luas area 5.908 Ha. Jika diamati pada tabel II.16 maka hasil dan luas area penghasil kelapa dalam kurun waktu antara 2008 hingga 2012 telah mengalami penurunan. Hal ini patut disayangkan mengingat kelapa memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan karena merupakan salah satu barang kebutuhan pokok masyarakat.

Jumlah produksi yang belum maksimal merupakan suatu peluang untuk memperluas areal tanam dan jumlah produksi kelapa untuk memanfaatkan peluang pasar yang masih sangat terbuka lebar. Karena selain untuk dikonsumsi secara langsung, kelapa juga sangat dibutuhkan untuk industri makanan, kerajinan, kesehatan dan industri lainnya.

Potensi perkebunan lainnya adalah tanaman cabe jamu. Saat ini tanaman cabe jamu menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Pamekasan selain rumput laut dan batik. Cabe jamu dikategorikan dalam komoditi yang dikembangkan karena manfaatnya yang cukup banyak, disamping digunakan sebagai bahan baku industri jamu dan obat-obatan, cabe jamu juga dipakai dalam bahan pembuatan kosmetik dan pengganti lada.

Peluang pasar cabe jamu di masa-masa mendatang cukup menjanjikan meskipun potensi permintaan baik dari dalam maupun luar negeri terhadap cabe jamu cukup baik, namun tingkat produksi masih dibawah permintaan pasar. Saat ini jumlah produksi cabe jamu hanya mencapai 451,85 ton

dengan luas areal panen 535 Ha pada tahun 2012. Upaya peningkatan produksi ini perlu dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pasar, sehingga peningkatan produksi ini dapat mengangkat nasib petani cabe jamu.

Tabel II.17  
Perkembangan Produksi hasil Hutan

Hasil Hutan	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Kayu pertukangan						
- Jati	M <sup>3</sup>	149,390	1.169,632	88,608	84,346	29,69
- Non jati	M <sup>3</sup>	87,880	60,290	22,755	22,364	10,315
2. Hasil hutan non kayu						
- Cendana	Ton	-	35,144	88,608	-	-
- Madu	Kg	3.024	3,905	3,024	4,523	-

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

Dalam sektor kehutanan, perkembangan produksi hasil hutan terbagi menjadi dua bagian yaitu hasil hutan berupa kayu pertukangan dan hasil hutan non kayu. Hasil hutan kayu ini selama kurun waktu 2008 hingga 2012 terus menunjukkan trend penurunan baik hasil kayu jati maupun non jati. Pada tahun 2008 hasil kayu jati mencapai 149,390 M<sup>3</sup>, hasil ini terus mengalami penurunan pada tahun berikutnya hingga pada tahun 2012 jumlahnya hanya mencapai 29,69 M<sup>3</sup>.

Tabel II.18  
Perkembangan Areal Hutan

Areal Hutan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Hutan produksi					
- Hutan Darat (KH)	461,60	461,60	461,60	461,60	461,60
- Hutan Mangrove (KH)	285	285	285	285	285
- Hutan mangrove (Non KH)	325	325	345	355	375
2. Hutan rakyat	8.079	8.654	9.029	9.129	9.129
3. Lahan kritis	42.353	41.810,50	40.207,75	39.265,66	39.245,66

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

Hal yang sama juga terjadi pada kayu non jati yaitu pada tahun 2008 produksinya mencapai 87,880 M<sup>3</sup>, namun pada tahun-tahun berikutnya

terus mengalami penurunan menjadi 10,315 M<sup>3</sup> pada tahun 2012. Sementara hasil hutan lainnya non kayu adalah cendana dan madu.

Adapun perkembangan luas areal hutan darat dalam kurun waktu 2008 hingga 2012 tidak mengalami perubahan sama sekali. Demikian juga dengan luas areal hutan mangrove (KH), sedangkan luas areal hutan mangrove (Non KH) mengalami peningkatan luas areal dari 325 Ha pada tahun 2008 menjadi 375 Ha pada tahun 2012.

Berbeda dengan hutan produksi yang tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, hutan rakyat menunjukkan peningkatan yaitu dari 8.079 Ha pada tahun 2008 menjadi 9.129 Ha pada tahun 2012. Sementara itu, lahan kritis dalam kurun waktu 2008 hingga 2012 mengalami penurunan dari yang luasnya mencapai 42.353 Ha pada tahun 2008 menjadi 39.245,66 Ha pada tahun 2012.

c. Wilayah Rawan bencana

Berdasarkan isian potensi tiap kecamatan beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Pamekasan yang memiliki potensi rawan bencana antara lain Kecamatan Galis, Kecamatan Pasean, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Larangan. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel II.19

Bencana memang tidak bisa dihindari tetapi hal ini bukan berarti tidak dapat ditangani. Di Kabupaten Pamekasan beberapa potensi bencana yang ada antara lain abrasi, puting beliung, lahan kritis, kekeringan, longsor, dan banjir musiman. Dalam hal penanganan bencana yang terjadi salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui tindakan preventif atau pencegahan baik secara teknis maupun non teknis dan tidak bersifat holistik mengingat karakter bencana yang berbeda membutuhkan bentuk penanganan yang berbeda. Secara teknis misalnya saja dengan menjaga fungsi hutan sebagai resapan air untuk menghindari banjir, tanah longsor dan lahan kritis serta pembudidayaan hutan bakau untuk mencegah terjadinya abrasi.



Tabel II.19  
Potensi Bencana Alam Kabupaten Pamekasan

Potensi	Lokasi
Kecamatan Galis	
• Rawan abrasi	Wilayah pesisir Kecamatan Galis
• Puting Beliung	
Kecamatan Pasean	
• Lahan kritis	Desa Sana Daya, Sana Tengah, Dempo Barat, Dempo Timur
• Abrasi	Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean
Kecamatan Kadur	
• Longsor	Desa Pamoroh
Kecamatan Pakong	
• Sebagian rawan	Desa Lebbek, Cenlece, Klompang Barat, Klompang Timur
Kecamatan Pamekasan	
• Banjir musiman	Desa Gladak Anyar, Parteker, Patemon, Jung Cang Cang, Barurambat Kota, Bugih, Kangeran, Laden
Kecamatan Tlanakan	
• Kekeringan	Desa Terrak, Ambat, Kramat
• Abrasi	Desa Terrak, Ambat, Kramat
Kecamatan Larangan	
• Rawan terjadi longsor	Desa Blumbungan, Larangan Luar, Duko Timur, Kaduara Barat
• Abrasi	Desa Montok
Kecamatan Batumarmar	
• Abrasi	Wilayah Pesisir Kecamatan Batumarmar

Sumber : Isian Potensi Kecamatan Tahun 2010

Penanganan bencana secara teknis tersebut tentu saja sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, namun penanganan secara non teknis ini justru yang lebih penting yaitu menyangkut perilaku masyarakat di daerah-daerah rawan bencana. Kerap kali bencana diterima sebagai suatu yang given sehingga dimaknai sebagai ujian atau cobaan. Pemaknaan bencana yang demikian ini harus dirubah sehingga bisa merubah perilaku masyarakat di daerah rawan bencana untuk juga ikut melakukan pencegahan seperti ikut menjaga hutan, menjaga kebersihan lingkungan terutama sungai dan tindakan-tindakan positif lain yang berdampak pada faktor-faktor timbulnya bencana. Merubah perilaku ini memang sulit namun bukan suatu keniscayaan jika ini berhasil maka kejadian bencana bisa diminimalisir.

d. Demografi

Di berbagai wilayah masalah kependudukan merupakan aspek penting dalam berjalannya pemerintahan. Penting dalam pengertian bahwa aspek kependudukan merupakan unsur dalam pembangunan baik sebagai obyek maupun subyek. Karena itu pengetahuan tentang aspek-aspek kependudukan akan memberi manfaat yang cukup besar. Data kependudukan merupakan informasi penting yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Perkembangan kependudukan akan mempunyai dampak yang luas di berbagai bidang seperti pangan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Berbagai aspek yang perlu mendapat perhatian misalnya menyangkut jumlah, komposisi baik menurut umur atau jenis kelamin.

Tabel II.20  
Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk, Rasio Jenis Kelamin  
dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Hasil Sensus Penduduk 2010

Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Sex ratio	Rata-rata Anggota Rumah tangga
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1. Tlanakan	16.495	29.602	31.204	60.806	94,87	3,7
2. Pademawu	21.549	38.340	40.789	79.129	94,00	3,7
3. Galis	8.537	14.099	15.051	29.150	93,67	3,4
4. Larangan	16.290	26.129	28.758	54.887	90,86	3,4
5. Pamekasan	23.299	44.878	46.874	91.752	95,74	3,9
6. Proppo	18.187	37.351	39.668	77.019	94,16	4,2
7. Palengaan	18.806	44.537	42.650	87.187	104,42	4,6
8. Pegantenan	15.696	30.561	34.184	64.745	89,40	4,1
9. Kadur	12.527	21.887	24.141	46.028	90,66	3,7
10. Pakong	9.134	16.558	18.929	35.487	87,47	3,9
11. Waru	15.704	29.361	31.524	60.885	93,14	3,9
12. Batumarmar	23.105	39.201	40.620	79.821	96,51	3,5
13. Pasean	14.256	24.500	27.266	51.766	89,86	3,6
Jumlah	213.585	397.004	421.658	818.662	94,15	3,80

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka sebanyak 818.662 jiwa dengan komposisi 397.004 jiwa penduduk laki-laki dan 421.658 jiwa penduduk perempuan dan sex ratio menunjukkan 94,15. Dari total jumlah ini, jika dilihat dari segi jumlah rumah tangga maka di Kabupaten

Pamekasan ada sebanyak 213.585 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 3,80.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pamekasan selama satu dekade menunjukkan adanya peningkatan. Pada hasil sensus penduduk tahun 2000. Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan sebanyak 689.225 jiwa, pada sensus 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan menjadi 818.662 jiwa. Adapun kecepatan laju pertumbuhan penduduk adalah 1,45 penduduk per tahun, laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel II.21  
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk  
Hasil Sensus Penduduk 2010

Kacamatan	Luas wilayah	Penduduk		Laju pertumbuhan penduduk/ Th	Kepadatan penduduk/ Km <sup>2</sup> 2000
		Sensus penduduk 2000	Sensus penduduk 2010		
1. Tlanakan	48,10	51.483	59.156	1,40	1.230
2. Pademawu	71,90	66.569	76.713	1,43	1.067
3. Galis	31,86	26.439	28.235	0,66	886
4. Larangan	40,86	48.292	53.174	0,97	1.301
5. Pamekasan	26,47	78.204	89.103	1,31	3.366
6. Proppo	71,49	67.388	75.079	1,09	1.050
7. Palengaan	88,48	61.701	85.246	3,29	963
8. Pegantenan	86,04	56.768	63.014	1,05	732
9. Kadur	52,43	42.488	44.622	0,49	851
10. Pakong	30,71	31.366	34.429	0,94	1.121
11. Waru	70,03	50.724	59.346	1,58	847
12. Batumarmar	97,05	59.038	77.653	2,78	800
13. Pasean	76,88	48.765	50.148	0,28	652
Jumlah	792,30	689.225	795.918	1,45	1.005

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Laju pertumbuhan penduduk yang bertambah selama satu dekade terakhir memiliki implikasi terhadap jumlah kepadatan. Penduduk yang terus bertambah sementara luas wilayah yang tetap dari tahun ke tahun akan menyebabkan kepadatan di suatu wilayah tersebut beserta beberapa persoalan. Kepadatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010 adalah 1.005 penduduk/km<sup>2</sup>.

Selain komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur, Kabupaten Pamekasan juga terdiri dari penduduk yang berbeda agama. Hampir sama

dengan komposisi penduduk daerah yang lain di Pulau Madura, penduduk di Kabupaten Pamekasan juga mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 725.621 jiwa. Agama lain yang dipeluk oleh penduduk Kabupaten Pamekasan yaitu Katolik sebanyak 650 jiwa, Kristen Protestan 487 jiwa serta Budha sebanyak 142 jiwa. Sedangkan yang memeluk agama Hindu hanya 18 jiwa dan lainnya hanya 8 jiwa.

Tabel II.22  
Banyaknya Penduduk menurut Agama per Kecamatan, 2011

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain-lain	Jumlah
1. Tlanakan	56.216	10	18	-	10	-	56.254
2. Pademawu	70.580	32	28	-	14	-	70.654
3. Galis	27.410	-	-	-	-	-	27.410
4. Larangan	48.472	-	-	-	10	-	48.482
5. Pamekasan	76.231	445	598	18	90	8	77.390
6. Proppo	71.896	-	-	-	-	-	71.896
7. Palengaan	72.558	-	-	-	-	-	72.558
8. Pegantenan	59.828	-	-	-	-	-	59.828
9. Kadur	43.028	-	-	-	-	-	43.028
10. Pakong	31.140	-	6	-	-	-	31.146
11. Waru	56.176	-	-	-	-	-	56.176
12. Batumarmar	62.031	-	-	-	-	-	62.031
13. Pasean	50.055	-	-	-	-	-	50.055
Jumlah	725.621	487	650	18	124	8	726.908

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

Kendati perbedaan agama ini kerap kali menjadi pemicu terjadinya konflik, namun di Kabupaten Pamekasan hingga saat ini perbedaan yang ada tidak menjadi kendala bagi penduduk untuk hidup damai dan rukun. Ini semua tentunya tidak lepas dari adanya rasa toleransi umat beragama yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini perlu terus dijaga agar kehidupan antar umat beragama menjadi harmonis.

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto dari berbagai aktifitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB Kabupaten Pamekasan ditunjang oleh 9 sektor yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa.

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang terintegrasi dalam empat neraca pokok yaitu Neraca Produksi, Neraca Konsumsi, Neraca Akumulasi, dan Neraca Transaksi Luar Negeri. Gambaran ekonomi yang sampai saat ini dapat dihitung pada tingkat wilayah Kabupaten Pamekasan adalah sebagian dari neraca produksi yaitu gambaran mengenai besaran produksi barang dan jasa, yang biasa disebut dengan PDRB yang dihitung baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Kondisi ekonomi Kabupaten Pamekasan dilihat dari sisi besaran nilai nominal PDRB selama periode 2008-2012 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, PDRB ADHB mencapai Rp. 3.965.510.070.000,00 dan pada akhirnya pada tahun 2012 mencapai Rp. 6.360.325.890.000,00. Sedangkan apabila dihitung dengan menggunakan harga konstan maka nilai nominal PDRB ADHK 2000 pada tahun 2008 mencapai Rp. 1.953,007.330.000,00 dan akhirnya pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 2.453.183.980.000,00. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel II.23 dan tabel II.24.

Untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah dapat diketahui dari kontribusi masing-masing sektor terhadap total nilai PDRB. Pada jangka

pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut type industri. Untuk jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.

Tabel II.23  
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000  
 Kabupaten Pamekasan (Juta Rupiah)

Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian	946.126,26	48,45	986.284,32	48,01	1.032.303,90	47,53	1.077.598,38	46,71	1.129.269,21	46,03
2. Pertambangan dan Penggalian	24.636,92	1,26	25.659,35	1,25	26.059,64	1,20	27.740,49	1,20	28.181,56	1,15
3. Industri Pengolahan	58.111,24	2,97	59.622,83	2,89	61.889,89	2,84	65.734,62	2,83	70.194,65	2,86
4. Listrik, gas, dan air bersih	19.388,10	0,99	20.309,11	0,99	21.347,74	0,98	22.440,91	0,97	24.138,29	0,98
5. Konstruksi	88.255,95	4,52	93.242,41	4,54	99.415,06	4,58	108.064,17	4,68	115.109,95	4,69
6. Perdagangan, hotel dan restoran	280.477,62	14,37	301.530,44	14,68	328.944,96	15,15	363.862,10	15,78	399.785,23	16,30
7. Pengangkutan & komunikasi	85.172,15	4,36	92.251,16	4,49	100.473,72	4,63	108.735,05	4,71	119.154,42	4,86
8. Keuangan, sewa & jasa perusahaan	135.449,47	6,93	142.154,81	6,92	149.905,80	6,89	160.191,27	6,95	172.182,78	7,02
9. Jasa-jasa	315.389,63	16,15	333.149,36	16,23	351.921,20	16,20	372.821,65	16,17	395.167,89	16,11
Jumlah	1.953.007,33	100	2.054.203,80	100	2.172.261,91	100	2.307.188,63	100	2.453.183,98	100

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

Tabel II.24  
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 s.d 2012  
 Kabupaten Pamekasan (Juta rupiah)

Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian	1.990.128,10	50,20	2.169.624,75	49,47	2.420.719,17	49,24	2.728.240,38	48,59	3.074.858,60	48,34
2. Pertambangan dan Penggalian	44.361,24	1,12	47.585,27	1,09	50.282,07	1,02	56.390,86	1,00	59.693,55	0,94
3. Industri Pengolahan	119.658,65	3,02	131.291,95	2,99	144.709,35	2,94	163.327,87	2,91	185.704,61	2,92
4. Listrik, gas, dan air bersih	39.364,59	0,99	42.265,20	0,97	46.231,51	0,94	50.543,04	0,90	55.728,96	0,88
5. Konstruksi	190.041,54	4,79	218.448,32	4,98	250.128,29	5,09	300.148,23	5,35	332.191,50	5,22
6. Perdagangan, hotel dan restoran	636.657,54	16,05	721.644,24	16,46	826.470,15	16,81	992.886,66	17,69	1.153.120,94	18,13
7. Pengangkutan & komunikasi	160.246,37	4,05	179.333,76	4,09	201.951,75	4,11	229.103,84	4,08	265.269,26	4,17
8. Keuangan, sewa & jasa perusahaan	259.067,92	6,52	287.324,32	6,55	321.159,69	6,53	362.560,54	6,46	413.496,24	6,50
9. Jasa-jasa	525.958,62	13,26	587.896,40	13,40	654.879,01	13,32	731.727,27	13,02	820.262,22	12,90
Jumlah	3.965.511,57	100	4.385.414,21	100	4.916.530,99	100	5.614.928,69	100	5.615.288,48	100

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013



Struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel II.25 secara rinci menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008-2012, pada tahun 2012 peranan terbesarnya di dukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok primer yaitu sekitar 49,28 persen, kemudian kelompok tersier cenderung mengalami kenaikan sedikit disekitaran 41,70 persen dan kelompok sekunder yang relatif tetap dari tahun-ke tahun sekitar 9,02 persen.

Disetiap kelompok sektor ini memiliki andalan yaitu sektor pertanian (untuk kelompok sektor primer), sektor bangunan (untuk kelompok sektor sekunder) dan sektor perdagangan, hotel, restoran (untuk kelompok sektor tersier). Sektor-sektor tersebut merupakan pemicu roda perekonomian Kabupaten Pamekasan karena sekitar 71,63 persen lebih kegiatan ekonomi berasal dari sektor-sektor tersebut sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan perekonomian regional.

Di Kabupaten Pamekasan kelompok sektor primer/pertanian selama periode 2008-2012 mengalami trend yang cenderung turun walaupun landai. Sedangkan kelompok sektor tersier cenderung naik meskipun tidak signifikan. Fenomena ini disatu pihak dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif, yaitu kelompok sektor primer menstimulus kelompok sektor sekunder/industri dan kelompok sektor tersier/jasa-jasa untuk berkembang lebih maju. Meskipun hal ini belum cukup menunjukkan terjadinya transformasi ekonomi sektoral dari agraris ke industri atau jasa-jasa. Untuk menuju ke arah tersebut bisa saja terjadi membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini bisa dipahami karena sektor pertanian masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Pamekasan.

Struktur ekonomi daerah berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian lainnya yang saling berkaitan. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumberdaya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumberdaya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah. Di samping itu ekonomi daerah sebaiknya

tidak berbasis satu sektor tertentu. Keanekaragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi wilayah. Ekonomi yang beragam lebih mampu bertahan terhadap konjungtur ekonomi.

Jika PDRB ADHB berkaitan dengan struktur ekonomi suatu wilayah, maka PDRB ADHK berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkembang apabila ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 geliat perekonomian Kabupaten Pamekasan mampu meningkat sebesar 5,53 persen. Pada tahun 2009 mengalami penurunan namun tidak signifikan menjadi 5,18 persen. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 5,75 dan hingga pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu berada pada angka 6,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan ini didukung oleh beberapa faktor yaitu dibangunnya Jembatan Suramadu yang berdampak pada kemudahan akses untuk datang ke kabupaten-kabupaten di Pulau Madura termasuk Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga banyaknya event-event yang mendukung seperti lomba kerapan sapi, pagelaran sapi sonok, car free day di Alun-alun Arek Lancor setiap hari minggu yang secara tidak langsung ikut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta menguatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan.

## 2. Laju Inflasi

Tingkat inflasi tahun 2012 adalah sebesar 6,53 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,53 persen. Adapun sektor yang mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2011 adalah sektor bangunan yaitu sebesar 10,39 persen, sedangkan inflasi terendah dialami oleh sektor listrik dan air bersih yaitu sebesar 4,00 persen. Meningkatnya laju pertumbuhan

ekonomi diiringi tingkat laju inflasi yang cukup stabil menunjukkan roda perekonomian bergairah.

Tabel II.25  
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Pamekasan

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata Pertumbuhan
Inflasi	8,15	5,14	6,02	7,53	6,53	6,85

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2013

#### b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Bagi wilayah yang sedang dalam proses transisi dan berkembang seperti Kabupaten Pamekasan, keberadaan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat sebetulnya adalah sebuah investasi atau modal sosial bagi keberlanjutan pembangunan. Tetapi kondisi sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan termarginalisasi, di sisi lain juga bisa menjadi beban dan bahkan kontra-produktif bagi pembangunan. Sebuah wilayah yang sebagian penduduknya kurang atau tidak berpendidikan dan hidupnya serba kekurangan, niscaya sulit berkembang dengan maksimal karena tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

##### 1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Secara umum APK pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Pamekasan mencapai 111% dan APM mencapai 95% pada tahun 2011. Jika dibanding dengan APK dan APM pada jenjang pendidikan SMP dan SMA maka tingkat SD merupakan yang tertinggi. Hal ini bisa jadi ada banyak murid SD yang diluar usia resmi untuk sekolah. Di sisi lain, hal ini bisa berarti bahwa di daerah pedesaan sebagian besar masyarakat hanya mampu menyekolahkan anaknya hanya pada sampai jenjang SD.

Tabel II.26

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, 2011

Kecamatan	Pddk usia 7-12	Total siswa	Siswa usia 7-12	APK	APM
1. Tlanakan	6.916	6.779	6.309	98%	91%
2. Pademawu	8.296	7.343	6.838	89%	82%
3. Galis	2.953	2.922	2.741	99%	93%
4. Larangan	5.348	4.805	5.264	90%	98%
5. Pamekasan	9.334	10.828	9.304	116%	100%
6. Proppo	10.173	10.856	9.905	107%	97%
7. Palengaan	9.801	12.738	9.627	130%	98%
8. Pegantenan	7.940	10.618	7.797	134%	98%
9. Kadur	4.693	5.243	4.221	112%	90%
10. Pakong	3.700	4.111	3.328	111%	90%
11. Waru	7.656	8.724	7.585	114%	99%
12. Batumarmar	8.558	9.420	8.454	110%	99%
13. Pasean	5.680	6.373	4.930	112%	87%
Jumlah	91.048	100.760	86.303	111%	95%

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

Menurut catatan BPS, secara umum jumlah APK di Kabupaten Pamekasan sebesar 99% dan APM sebesar 85%. Kedua angka ini mendekati ideal, namun demikian masih harus ditingkatkan agar APK dan APM tingkat pendidikan SMP menjadi ideal karena secara khusus di beberapa kecamatan ada yang memiliki APK maupun APM yang jauh dari angka ideal. Misalnya saja Kecamatan Batumarmar memiliki APK hanya 58% dan APM sebesar 53%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di tingkat pendidikan SMP masih rendah jika dibanding dengan kecamatan lainnya seperti Pamekasan, Larangan, Pakong yang memiliki APK diatas ideal dan APM yang mendekati ideal.

Tabel II.27  
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP,  
2011

Kecamatan	Pddk usia 13-15	Total siswa	Siswa usia 13-15	APK	APM
1. Tlanakan	3.546	2.968	2.816	84%	79%
2. Pademawu	3.835	2.609	2.515	68%	66%
3. Galis	1.411	1.243	1.175	88%	83%
4. Larangan	2.773	3.083	2.637	111%	95%
5. Pamekasan	5.513	7.911	6.393	143%	116%
6. Proppo	5.169	3.076	3.012	60%	58%
7. Palengaan	8.382	9.334	7.995	111%	95%
8. Pegantenan	4.121	4.412	3.971	107%	96%
9. Kadur	2.535	2.863	2.339	113%	92%
10. Pakong	2.272	3.146	2.121	138%	93%
11. Waru	3.826	3.584	3.042	94%	80%
12. Batumarmar	4.336	2.494	2.311	58%	53%
13. Pasean	2.616	2.956	2.363	113%	90%
Jumlah	50.335	49.679	42.690	99%	85%

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

Jika APK dan APM SD ideal, SMP mendekati ideal maka tidak demikian dengan SMA. APK dan APM tingkat pendidikan SMA bisa dikatakan jauh dari ideal. Secara umum APK tingkat pendidikan SMA di Kabupaten Pamekasan hanya 39% dan APM 66%. Rendahnya APK dan APM ini selain karena alasan yang telah diungkapkan sebelumnya juga karena dipicu banyak faktor seperti kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan formal

serta budaya pernikahan dini yang masih banyak berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kerap kali sulitnya mencari pekerjaan meskipun telah menempuh pendidikan formal menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun tidak jarang pula pernikahan dini terutama bagi perempuan menghambat mereka untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dan fenomena ini banyak sekali terjadi di daerah pedesaan. Misalnya saja di Kecamatan Proppo dimana APK hanya 14% dan APM sebesar 12%. Angka ini jelas memiliki selisih yang sangat jauh dengan Pamekasan dan Palengaan yang bisa dilihat pada tabel II.29.

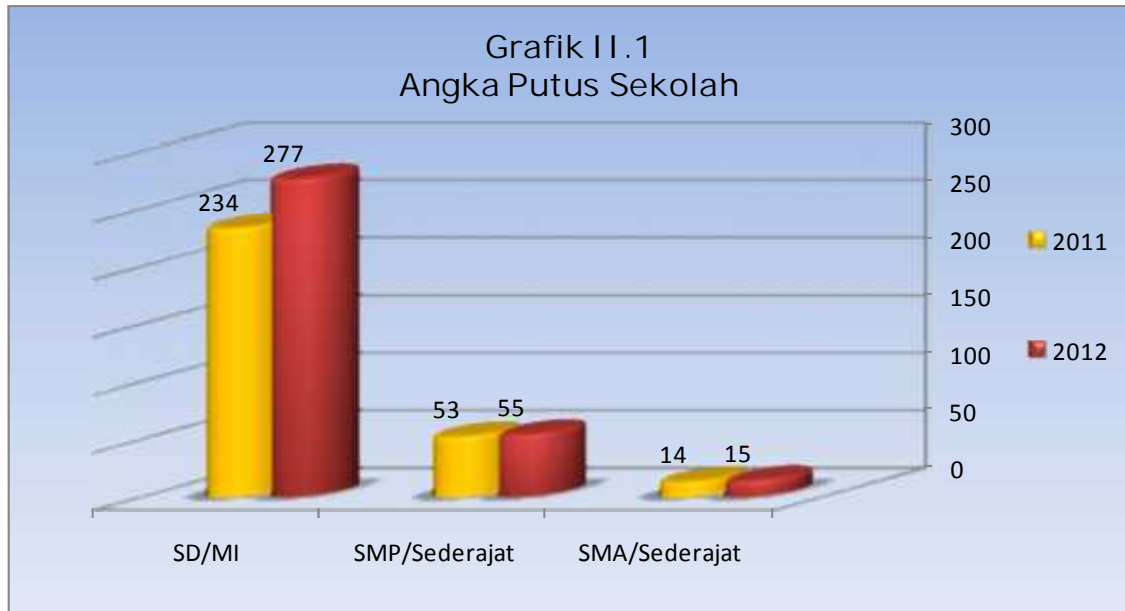
Tabel II.28  
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA,  
2011

Kecamatan	Pddk usia 16-18	Total siswa	Siswa usia 16-18	APK	APM
1. Tlanakan	3.194	886	856	28%	27%
2. Pademawu	3.631	3.495	3.385	96%	93%
3. Galis	1.229	1.461	1.135	119%	92%
4. Larangan	2.533	1.338	1.256	53%	50%
5. Pamekasan	5.870	9.194	7.169	157%	112%
6. Proppo	4.629	656	556	14%	12%
7. Palengaan	8.967	8.216	8.085	92%	90%
8. Pegantenan	3.603	1.285	1.246	36%	35%
9. Kadur	2.346	1.726	1.694	74%	72%
10. Pakong	2.033	2.559	1.956	126%	96%
11. Waru	3.143	1.737	1.680	55%	53%
12. Batumarmar	3.642	833	775	23%	21%
13. Pasean	2.140	1.163	1.098	54%	51%
Jumlah	46.960	34.548	30.891	39%	66%

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

Selain APK dan APM untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan, indikator lain yang digunakan adalah Angka Putus Sekolah. Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APts ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di

suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi AptS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.



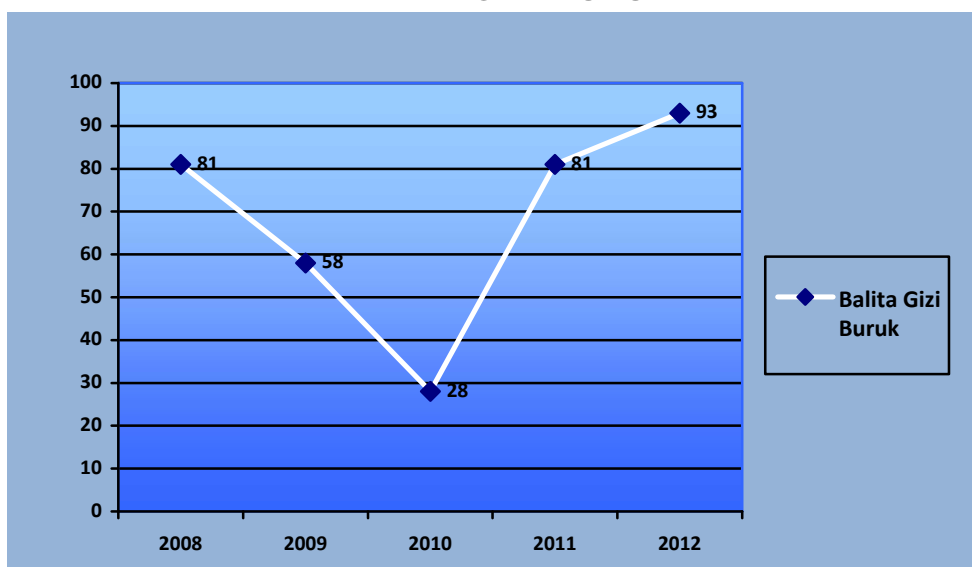
Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

Jika dilihat pada grafik II.1, maka selama kurun waktu dua tahun yaitu 2011 hingga 2012 jumlah angka putus sekolah mengalami peningkatan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Di tingkat SD, angka putus sekolah mencapai 234 pada tahun 2011 dan naik menjadi 277 pada tahun 2012. Pada tingkat SMP angka putus sekolah di tingkat SMP sebanyak 53 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 55. Sedangkan pada tingkat SMA angka putus sekolah pada tahun 2011 adalah 14 dan meningkat menjadi 15 pada tahun 2012. Jika dilihat angka-angka kenaikan ini tidak begitu signifikan. Kendati demikian permasalahan putus sekolah ini harus tetap menjadi prioritas penanganan terutama pada tingkat SD yang merupakan pendidikan dasar. Tentu saja penanganan ini harus dimulai dari mencari akar permasalahan terjadinya putus sekolah sehingga angka putus sekolah bisa ditekan serta APK dan APM bisa meningkat.

## 2. Kesehatan

Salah satu permasalahan dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah ancaman gizi buruk. Ancaman gizi buruk yang biasanya terjadi pada anak usia balita ini biasanya dipicu oleh kondisi kemiskinan orang tua. Gizi buruk biasa ditemui pada keluarga-keluarga yang secara ekonomi tergolong lemah. Kondisi ekonomi yang lemah ditengah himpitan mahalnnya harga barang-barang kebutuhan pokok terkadang mendorong sebuah keluarga untuk makan seadanya termasuk makanan yang tidak memiliki banyak gizi untuk anak-anaknya terutama usia balita. Bagi balita dari keluarga kaya biasanya mereka akan memperoleh makanan yang memiliki kandungan gizi yang cukup dan tentu saja makanan balita tersebut makanan khusus untuk balita yang berbeda dengan makanan orang dewasa. Namun bagi balita yang hidup ditengah-tengah keluarga miskin, makanan yang diberikan biasanya adalah makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh keluarga lainnya yang serba seadanya. Tak pelak lagi, balita yang hidup di keluarga miskin lebih rentan terhadap rawan gizi daripada balita yang hidup ditengah-tengah keluarga kaya. Selain karena kondisi ekonomi yang lemah, kasus rawan gizi terhadap balita biasanya juga dipicu oleh tingkat pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan gizi bagi anak-anaknya.

GRAFIK II.2  
BALITA GIZI BURUK



Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

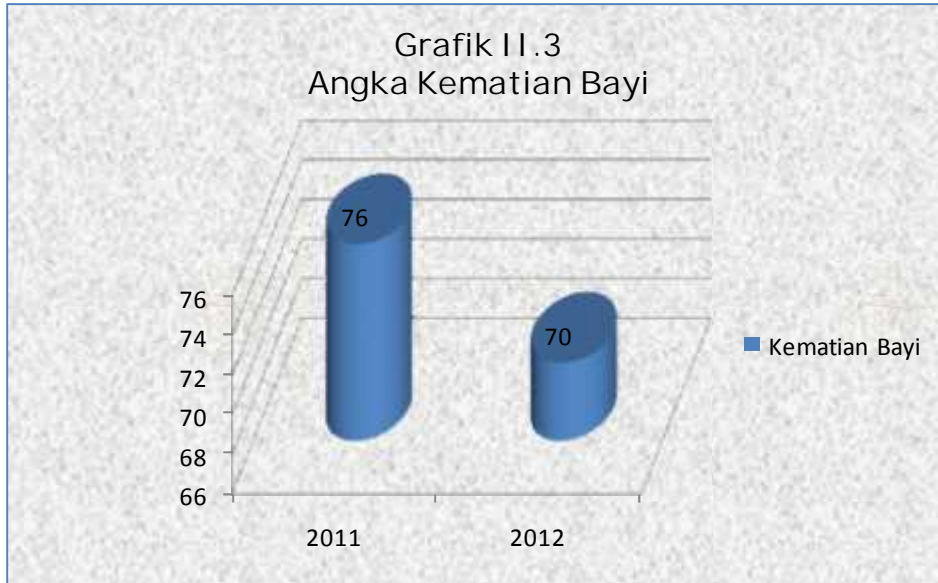


Adapun jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pamekasan bisa dikatakan memprihatinkan karena pada tahun 2012 jumlah balita penderita gizi buruk mencapai 93 kasus. Jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 81 kasus. Walaupun pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan menjadi 58 kasus hingga tahun 2010 hanya ditemui 28 kasus. Namun sayang kondisi ini harus mengalami kenaikan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Tentu saja angka ini menjadi koreksi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal penanganan Gizi Buruk ditengah banyaknya program-program pengentasan kemiskinan yang banyak digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan bagi penduduk miskin di Pamekasan.

Penanganan yang serius untuk menekan angka balita gizi buruk ini harus dilakukan pada tahun-tahun kedepan. Karena jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka akan berdampak buruk bagi balita dan anak-anak yang merupakan aset penting bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan di masa depan.

Selain masalah balita gizi buruk, masalah lain yang menghambat pembangunan di bidang kesehatan adalah kematian bayi. Antara tahun 2011 hingga 2012 angka kematian bayi di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan yaitu dari 76 kasus menjadi 70 kasus. Penurunan jumlah angka kematian bayi ini tidak lepas dari keberadaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis yang memadai di Kabupaten Pamekasan.

Dengan peralatan medis yang cukup modern serta sarana penunjang kesehatan lainnya yang memadai di Kabupaten Pamekasan maka menekan angka kematian bayi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Keberhasilan untuk menekan angka kematian bayi ini merupakan indikasi bahwa pembangunan di bidang kesehatan telah berhasil walaupun belum semuanya. Selain itu, penurunan angka kematian bayi juga berperan sangat signifikan dalam peningkatan angka harapan hidup.



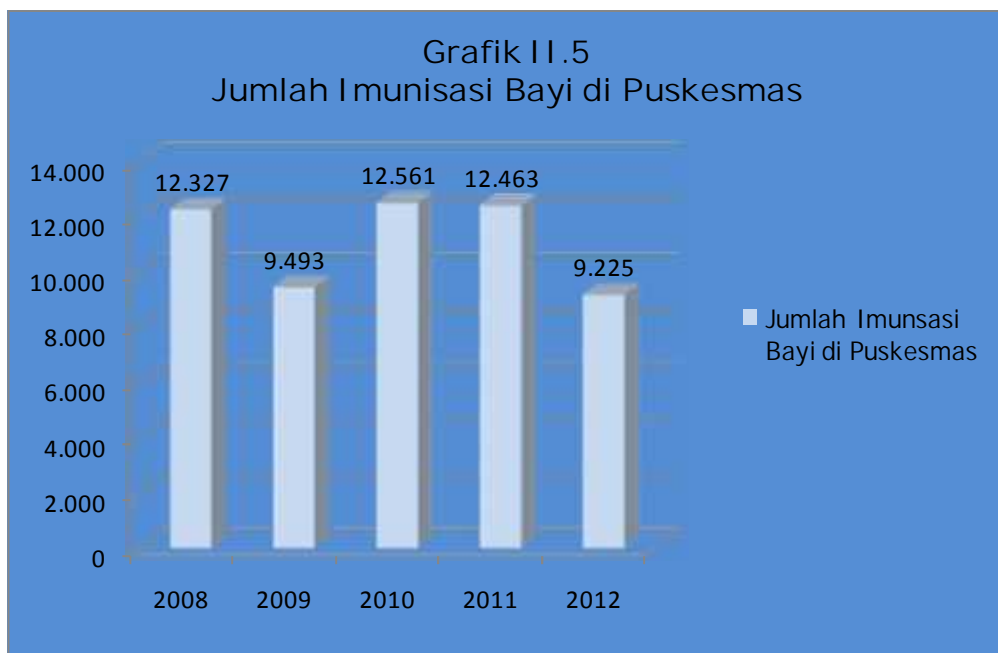
Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani seseorang pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas (kematian) yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.



Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

Pada tahun 2010 angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur mencapai 71,79. Di Kabupaten Pamekasan jumlah penduduk yang bisa mencapai angka harapan hidup ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk yang bisa mencapai angka harapan hidup sebanyak 13.840 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 13.065 jiwa. Kondisi penurunan ini terus berlangsung hingga tahun 2012 yang hanya 8.477 jiwa saja penduduk yang bisa mencapai angka harapan hidup Jawa Timur. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

Jumlah imunisasi bayi di puskesmas bersifat fluktuatif namun cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2008 jumlah imunisasi bayi di puskesmas mencapai 12.327 jiwa pada tahun 2010 naik menjadi 12.561 jiwa. Namun sejak tahun 2011 cenderung mengalami penurunan menjadi 12.463, dan pada tahun 2012 angka tersebut kembali turun menjadi 9.225 jiwa.

Jika disimak dari keempat informasi kesehatan yang telah disajikan maka terlihat bahwa ada penurunan kualitas penanganan kesehatan di Kabupaten Pamekasan yang ditandai oleh meningkatnya kasus balita gizi buruk, penurunan jumlah penduduk yang mencapai angka harapan hidup serta menurunnya jumlah imunisasi bayi di pukesmas. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya agar tidak hanya berhasil dalam hal menekan angka kematian bayi tetapi juga berhasil dalam penanganan tiga aspek tersebut.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan olahraga merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkreasi dan berprestasi. Seni dan olahraga tidak terbatas bagi semua kalangan baik anak-anak, remaja hingga orang tua. Bahkan seni yang hidup ditengah-tengah masyarakat biasanya merupakan warisan dari leluhur yang memiliki nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakatnya. Kesenian di Pamekasan bisa berupa seni tari, kerajinan tangan hingga upacara adat. Apapun bentuk dari seni yang ada adalah potensi yang harus terus dipelihara dan dikembangkan karena tidak jarang seni justru bisa bernilai ekonomis yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

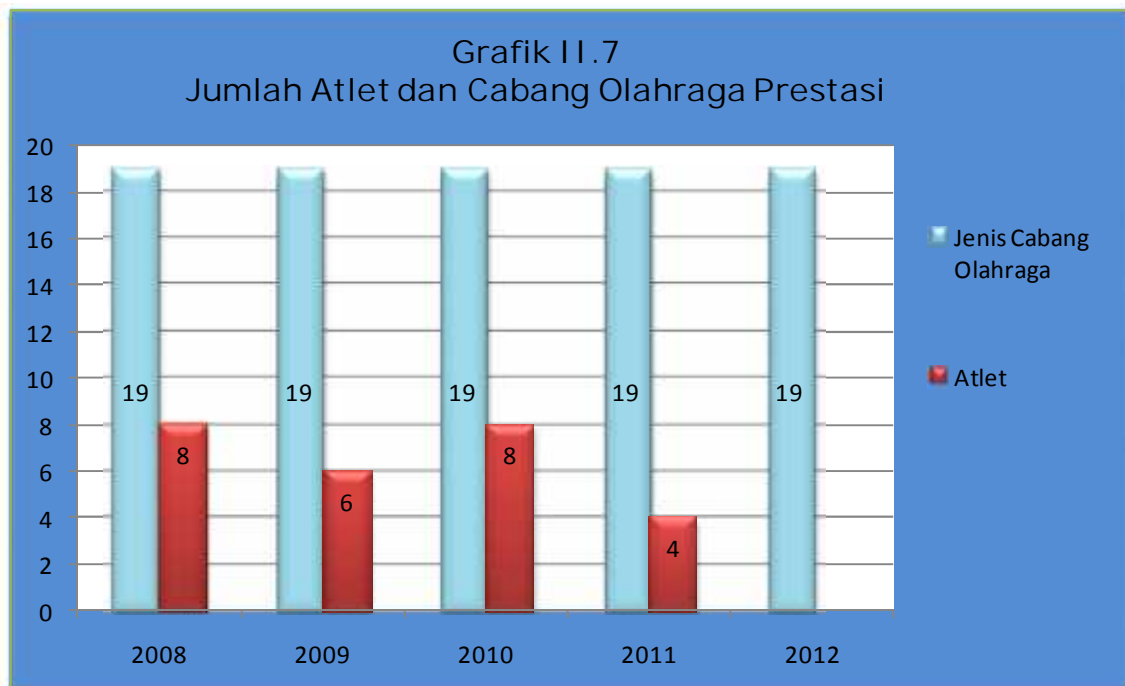
Salah satu upaya dalam memelihara dan mengembangkan seni tradisional masyarakat Kabupaten Pamekasan adalah didirikannya sanggar seni. Keberadaan sanggar seni ini bisa mewadahi aktivitas kreatif masyarakat dibidang seni. Bahkan keberadaan sanggar seni di Kabupaten Pamekasan dari kurun waktu lima tahun ini mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2008 hanya ada 35 sanggar seni di Kabupaten Pamekasan, maka pada tahun 2012 sanggar seni telah berkembang menjadi 156 sanggar. Kenaikan jumlah ini merupakan wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan dan memfasilitasi masyarakat dalam berkesenian. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa antusias masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk berkesenian, menjaga dan mengembangkan seni semakin besar meskipun tidak ada data yang mencatat secara pasti. Namun dengan keberadaan sanggar-sanggar ini

merupakan indikator bahwa masyarakat memiliki minat untuk di bidang kesenian.



Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

Selain seni, pembangunan di bidang olahraga juga tidak kalah penting. Tujuan pembangunan di bidang olahraga adalah untuk menciptakan manusia yang sehat, ulet dan berjiwa sportif. Pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pamekasan secara jasmaniah, rohaniah dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Melalui olahraga akan menghasilkan generasi-generasi yang sehat dan berprestasi sehingga bisa mengharumkan nama daerah dan negara pada umumnya. Di Pamekasan hingga saat ini ada 19 cabang olahraga prestasi. Namun jumlah atlet yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan ini bisa dibilang jumlahnya belum memadai. Pada tahun 2011 jumlah atlet hanya 4 orang sedangkan pada tahun sebelumnya jumlah atlet sebanyak 8 orang.



Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

Oleh sebab itu, perhatian pada bidang olahraga masih perlu ditingkatkan baik dari segi sarana maupun prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang memadai maka minat masyarakat di bidang olahraga bisa ditingkatkan sehingga melalui olahraga bisa dicetak generasi-generasi yang berprestasi.

### 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 1. Fokus Layanan Urusan Wajib

##### a. Pendidikan

Guna menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan terus mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga menyediakan sarana dan prasarana sekolah baik sarana gedung sekolah maupun tenaga pengajar atau guru. Keberadaan gedung sekolah di Kabupaten Pamekasan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2009 ada sebanyak 788 gedung sekolah dasar, pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 753 gedung, pada

tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 770 gedung, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 782 gedung.

Sedangkan untuk gedung sekolah tingkat SMP/MTs dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah gedung SMP sebanyak 270 gedung, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 275 gedung, pada tahun 2011 naik menjadi 318 gedung, dan pada tahun 2012 naik menjadi 345 gedung SMP/MTs. Meningkatnya sarana gedung sekolah ini karena pemerintah daerah menyadari bahwa jumlah penduduk yang terus bertambah akan semakin meningkatkan kebutuhan akan sekolah, sehingga sarana sekolah harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sarana gedung sekolah tingkat SMA/ sederajat (SMA/MA/SMK) yang terus mengalami peningkatan kuantitas. Pada tahun 2009 jumlah gedung sekolah ini hanya 129, pada tahun 2010 naik menjadi 151 gedung, pada tahun 2011 naik menjadi 164 gedung, dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 167 gedung sekolah. Peningkatan jumlah gedung sekolah baik tingkat SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat ini merupakan capaian dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat. Hal ini terlihat dari rasio antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah gedung sekolah.

Tabel II.29  
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah  
Tahun 2009 s.d. 2012 Kabupaten Pamekasan

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	788	753	770	782
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	99.471	91.968	91.048	91.048
1.3.	Rasio	0,79	0,82	0,85	0,86
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah gedung sekolah	270	275	318	345
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	39.066	44.390	50.335	50.335
2.3.	Rasio	0,69	0,62	0,63	0,69
3	SMA/SMK/MA				
3.1.	Jumlah gedung sekolah	129	151	164	167
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	52.134	38.827	46.906	46.906
3.3.	Rasio	0,25	0,39	0,35	0,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Jumlah guru di Kabupaten Pamekasan juga terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2009 jumlah guru SD/MI sebanyak 10.007 guru, pada tahun 2010 naik menjadi 10.390 guru, pada tahun 2011 meningkat menjadi 16.663 guru, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 11.206 guru. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs kondisi jumlah guru pada tahun 2009 sebanyak 5.145 guru, pada tahun 2010 tidak mengalami perubahan, pada tahun 2011 naik menjadi 10.342 guru, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 6.744 guru. Jumlah guru pada tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2009 sebanyak 3.513 guru, pada tahun 2010 turun menjadi 3.370 guru, pada tahun 2011 naik menjadi 3.576 guru dan pada tahun 2012 naik menjadi 3.704 guru.

Keberadaan jumlah guru ini seiring dengan bertambahnya jumlah murid yang juga semakin meningkat. Penambahan jumlah guru dilakukan guna merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mengenyam pendidikan. Misalnya saja jumlah murid SD pada tahun 2010 sebanyak 100.404 murid dan jumlah guru sebanyak 10.390 sehingga rasio antara guru dan murid terpaut cukup jauh. Oleh sebab itu pada tahun 2011 jumlah guru SD ditambah menjadi 16.663 sedangkan jumlah murid sebanyak 131.355 sehingga rasionya adalah 12,69 persen.

Tabel II.30  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2012  
Kabupaten Pamekasan

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah Guru	10.007	10.390	16.663	11.206
1.2.	Jumlah Murid	104.127	100.404	131.355	96.953
1.3.	Rasio	9,61	10,35	12,69	11,56
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah Guru	5.145	5.145	10.342	6.744
2.2.	Jumlah Murid	43.557	44.594	77.213	49.057
2.3.	Rasio	11,81	11,54	13,39	13,75
3	SMA/SMK/MA				
3.1	Jumlah Guru	3.513	3.370	3.576	3.704
3.2	Jumlah Murid	31.968	28.709	30.891	36.943
3.3	Rasio	10,99	11,74	11,58	10,03

Sumber : Dinas pendidikan Kabupaten Pamekasan



Rasio antara jumlah guru dan murid yang tidak terpaut terlalu jauh ini tentu saja akan sangat meningkatkan efektifitas kegiatan belajar mengajar. Demikian juga dengan ratio gedung sekolah dan penduduk usia sekolah. Oleh sebab itu peningkatan sarana dan prasana di bidang pendidikan perlu terus ditingkatkan mengingat masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

b. Kesehatan

Upaya pembangunan bidang kesehatan menjadi penting, karena dari sini aspek kualitas sumberdaya manusia ke depan dapat dijaga. Aspek kesehatan tidak hanya sekedar memberantas berbagai macam jenis penyakit. Tetapi pembangunan bidang kesehatan dilakukan dengan segala aspek pembangunan kesehatan itu sendiri mulai dari kehamilan, kelahiran, bayi, balita atau ibu menyusui. Dan pembangunan di bidang kesehatan ini menjadi penting ketika kualitas kesehatan suatu masyarakat dijadikan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Suatu keluarga yang sehat terutama bagi kepala keluarganya akan bisa menjamin pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut akan kebutuhan primer seperti makan, pakaian dan rumah.

Kondisi sehat akan mendukung seorang kepala keluarga atau keluarga untuk melakukan proses produksi. Berbeda halnya dengan keluarga yang didalamnya setiapnya anggotanya banyak yang sakit atau sering sakit terutama kepala keluarga, maka akan sulit bagi keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak ada pendapatan dan sesuatu yang untuk dikonsumsi. Ironisnya seperti yang dialami oleh banyak keluarga miskin, ketika menderita sakit apalagi yang parah seringkali mereka tidak memiliki kemampuan untuk berobat. Oleh karena itu berbagai program dibidang kesehatan telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan terutama melalui Jamkesmas dan Posyandu. Selain program di bidang kesehatan, pemerintah juga mengupayakan pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang tujuannya adalah

memberi kemudahan akses bagi penduduk untuk melakukan pengobatan misalnya fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas lainnya.

Menurut catatan pada tabel II.32, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu lima tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan kecuali keberadaan Posyandu, Pusling dan Puskesmas Plus. Pada tahun 2008 jumlah Posyandu sebanyak 761 unit sekarang menjadi 865 unit. Sedangkan Pusling pada tahun 2009 sebanyak 34 unit sekarang menjadi 33 unit. Sementara itu fasilitas lainnya seperti rumah sakit umum hanya 1 unit dan rumah sakit swasta hanya 1 unit saja.

Tabel II.31  
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pamekasan

Fasilitas Kesehatan	2008	2009	2010	2011	2012
1. Rumah sakit umum	1	1	1	1	1
2. Rumah sakit swasta	1	1	1	1	1
3. Puskesmas perawatan	15	15	15	15	15
4. Puskesmas non perawatan	5	5	5	5	5
5. Puskesmas ISO 9001:2000	4	4	4	4	4
6. Puskesmas plus	0	0	1	3	3
7. Pustu	48	48	48	48	44
8. Posyandu	761	824	838	838	865
9. Polindes	159	204	155	155	155
10. Pusling	-	34	34	34	33
11. Rumah bersalin	2	2	2	2	2

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Sedangkan banyaknya tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan meliputi jumlah dokter umum, dokter gigi, tenaga paramedis dan Bidan (termasuk bidan PPT). Namun secara umum, jumlah tenaga kesehatan ini telah berkurang dari jumlah sebelumnya sebagaimana dapat dilihat di dalam tabel II.33. Pada tahun 2009 ada 26 dokter umum, 14 dokter gigi, namun pada tahun 2012 jumlah dokter umum bertambah menjadi 38 dokter, sedangkan dokter gigi turun menjadi 13 orang. Pada tahun 2012 terdapat 215 tenaga keperawatan yang semula pada tahun 2009 sebanyak 122 dan 264 tenaga bidan pada tahun 2012 yang sebelumnya berjumlah 217 pada tahun 2009. Dengan adanya keberadaan

bidan ini menjadikan masyarakat memiliki pilihan rasional saat melakukan persalinan. Karena keahlian yang dimiliki oleh bidan tidak diragukan karena di dapat dari hasil proses belajar dan pembekalan keterampilan sebelum bertugas. Sedangkan keterampilan yang dimiliki oleh seorang dukun biasanya didapat secara turun-temurun.

Tabel II.32  
Banyaknya Tenaga Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan

Uraian	2009	2010	2011	2012
Dokter spesialis	-	-	-	-
Dokter Umum	26	32	33	38
Dokter Gigi	14	14	14	13
Tenaga Keperawatan	122	152	134	215
Bidan (termasuk Bidan PPT)	217	153	135	264

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

Jika keberadaan fasilitas kesehatan yang ada dirasa mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan maka peningkatan kualitas perlu dilakukan dala pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi guna merespon semakin bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pula pada semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan maka sebaiknya peningkatan fasilitas kesehatan secara kualitas dan kuantitas perlu dilakukan agar kesehatan masyarakat lebih terjamin.

c. Penataan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Wilayah akan selalu berkembang sesuai dengan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi serta kemudahan transportasinya baik internal maupun eksternal.

Kondisi wilayah yang perkembangannya diarahkan melalui proses tahapan penataan ruang tentunya akan memberikan kondisi wilayah yang lebih baik/lebih ideal, dibandingkan wilayah yang perkembangannya berjalan secara alami, hal ini bisa dikaji dari perkembangan kawasan permukiman yang mengarah ke kawasan lindung, atau kawasan lindung yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya seperti pertanian, ladang, dan pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung kawasan, tentunya akan menimbulkan konflik penggunaan ruang. Perkembangan yang tidak terarah atau tidak direncanakan akan dapat memberikan dampak negatif/kerugian yang sangat besar baik kerugian material, sosial maupun kerusakan lingkungan, seperti adanya banjir yang disebabkan adanya penggundulan kawasan hutan, kegiatan pembangunan permukiman di kawasan dengan kelerengan diatas 40 % yang tidak memperhatikan daya dukung lahan.

Penataan ruang dapat diklasifikasikan berdasarkan atas sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan, yaitu :

- Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
- Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan; dan
- Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pada hakekatnya kegiatan perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan :

- Rencana umum tata ruang; dan
- Rencana rinci tata ruang yang berhierarki.

Adapun rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah, dengan jangka waktu perencanaan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk :
  - a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
  - d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
  - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
  - f. Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
  - g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
  
2. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi, dimana rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
  - a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
  - d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;

- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
  - f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
  - g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk :
- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
  - d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
  - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  - f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Tabel II.33

## Kajian Lingkungan Hidup Strategis

ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
		POSITIF	NEGATIF		
a. Pengembangan kawasan agropolitan untuk mempercepat perkembangan kawasan pedesaan	Kec. Waru, Kec. Pegantenan Kec. Kadur Kec. Pakong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin berkembangnya Desa- desa di Kecamatan Waru, Pegantenan, Kadur dan Pakong</li> <li>- Terakomodirnya pengembangan fasilitas dan infrastruktur</li> <li>- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat</li> <li>- Meningkatnya ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepatnya perkembangan lahan terbangun dikhawatirkan akan terjadinya konversi lahan pertanian irigasi teknis</li> <li>- Masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup (sanitasi, persampahan, limbah dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delineasi terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan/yang beririgasi teknis serta penanganan melalui insentif dan disinsentif</li> <li>- Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti limbah, persampahan dan sanitasi</li> <li>- Mitigasi bahaya banjir dilakukan dengan penyediaan ruang evakuasi bencana serta pemantapan sitem drainase</li> <li>- Menjaga kawasan RTH &gt;30 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap pembangunan Fasilitas dan infrastruktur dengan skala regional diharapkan dilengkapi dengan analisa daya dukung lingkungan dan dokumen amdal.</li> <li>- Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun di areal lahan pertanian pangan berkelanjutan</li> </ul>

ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
		POSITIF	NEGATIF		
b. Percepatan peningkatan dan pengembangan perkotaan sebagai PWK, PKLp	Perkotaan Pamekasan, Kota Pakong, Kota Waru,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin berkembangnya perkotaan Pamekasan, Waru dan Pakong</li> <li>- Meningkatnya segala fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, dan infrastruktur</li> <li>- Meningkatnya kegiatan ekonomi wilayah</li> <li>- Meningkatnya aktivitas social-ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepatnya alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun</li> <li>- Munculnya masalah social (limbah industri, limbah rumah tangga, persampahan, sanitasi, air bersih)</li> <li>- Berkurangnya lahan resapan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delineasi terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan/ yang beririgasi teknis serta penanganan melalui insentif dan disinsentif</li> <li>- Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti limbah, persampahan dan sanitasi</li> <li>- Pengembangan sumber air bersih yang baru</li> <li>- Mitigasi bahaya banjir dilakukan dengan penyediaan ruang evakuasi bencana serta pemantapan sistem drainase</li> <li>- Menjaga kawasan RTH &gt;30 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap pembangunan Fasilitas dan infrastruktur dengan skala regional diharapkan dilengkapi dengan analisa daya dukung lingkungan dan dokumen amdal.</li> <li>- Setiap industri wajib menyediakan IPAL baik secara individu atau kolektif</li> <li>- Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun di areal lahan pertanian pangan berkelanjutan</li> </ul>



ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
		POSITIF	NEGATIF		
c. Pengembangan Jaringan Jalan Nasional: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lintas Utara</li> <li>- Lintas Selatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget</li> <li>- Bangkalan-Ketapang-Solabar-Pasongsongan-Sumenep-Pantai Lumbang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Pamekasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polusi udara dan suara</li> <li>- Berkurangnya lahan resapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi</li> <li>- Penyediaan RTH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada pengembangan jaringan jalan dengan pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak polusi suara dan udara.</li> <li>- Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau jalan untuk menambah kawasan RTH.</li> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> </ul>
d. Pengembangan terminal tipe A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Tlanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju Kabupaten Pamekasan dengan Kota di lingkup regional</li> <li>- Meningkatnya aktivitas ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya lahan resapan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman vegetasi dimana selain sebagai penambah estetika kawasan juga untuk menambah kawasan hijau kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> </ul>

ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
		POSITIF	NEGATIF		
e. Pembangunan terminal tipe B	Kecamatan Waru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan aksesibilitas eksternal Kabupaten Pamekasan dengan Kota-kota di Jawa Timur</li> <li>- Meningkatnya aktivitas ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya lahan resapan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman vegetasi dimana selain sebagai penambah estetika kawasan juga untuk menambah kawasan hijau kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> </ul>
f. Pembangunan terminal tipe C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Pademawu</li> <li>- Kecamatan Galis</li> <li>- Kecamatan Larangan</li> <li>- Kecamatan Propo</li> <li>- Kecamatan Kadur</li> <li>- Kecamatan Palengaan</li> <li>- Kecamatan Pegantenan</li> <li>- Kecamatan Pakong</li> <li>- Kecamatan Batumarmar</li> <li>- Kecamatan Pasean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan aksesibilitas internal Kabupaten Pamekasan</li> <li>- MenIngkatnya aktivitas ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya lahan resapan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman vegetasi dimana selain sebagai penambah estetika kawasan juga untuk menambah kawasan hijau kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> </ul>

ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
		POSITIF	NEGATIF		
g. Rencana pengembangan terminal angkutan barang	Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan aksesibilitas barang dari dan ke Pamekasan</li> <li>- Meningkatnya kegiatan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya lahan resapan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman vegetasi dimana selain sebagai penambah estetika kawasan juga untuk menambah kawasan hijau kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> </ul>
h. pengembangan dan revitalisasi jalur perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangkalan – Kamal – Sampang – Pamekasan – Sumenep dan Penyambungan jaringan jalur perkeretaapian Pulau Madura ke jaringan perkeretaapian di Surabaya.</li> <li>- Kamal – Pamekasan – Sumenep dan menghidupkan kembali jalur rel Kereta Api Mati Bangkalan – Sampang – Pamekasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai salah satu alternatif moda angkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konflik Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dalam proses pengembangan</li> <li>- Melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat</li> </ul>

ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
		POSITIF	NEGATIF		
i. Rencana Pengembangan Pelabuhan Regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan</li> <li>- pelabuhan di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan aksesibilitas menuju luar wilayah kabupaten melalui jalur laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rusaknya ekosistem laut pada sekitar wilayah pelabuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kelestarian ekosistem laut dengan melakukan delineasi terhadap kawasan pengembangan dan kawasan lindung laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> </ul>
j. Perluasan energi baru dan terbarukan (industri kelistrikan) berupa PLTU	Perbatasan Desa Ambat dan Perbatasan Desa Kramat Kecamatan Tlanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlayannya kebutuhan energi listrik di wilayah kabupaten</li> <li>- Meningkatnya kegiatan perekonomian, dan kegiatan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya polusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat</li> <li>- Penanaman vegetasi yang berfungsi sebagai baffle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dalam proses pengembangan</li> <li>- Melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat</li> </ul>
k. Pengembangan Telekomunikasi yaitu dengan Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama.	Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlayannya sarana komunikasi sampai ke pelosok desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terganggunya tingkat keamanan masyarakat di sekitar BTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian sempadan/jarak BTS dengan kawasan permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> </ul>
l. Pengembangan kawasan pertambangan batuan dan mineral non logam, dan minyak bumi	Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya perekonomian wilayah.</li> <li>- Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat</li> <li>- Meningkatnya ekonomi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercemarnya wilayah sekitar</li> <li>- Terjadinya kerusakan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delineasi dan pemilihan lokasi yang bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pertambangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan</li> <li>- Pemulihan kawasan bekas tambang</li> </ul>

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2030

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten sebagai salah satu wujud penataan ruang berdasarkan wilayah administratif. Dan sebagai upaya mendukung terhadap ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun penataan sumberdaya, melalui peningkatan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu hal yang melatarbelakangi penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan adalah perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan. Perubahan-perubahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal seperti perubahan penggunaan lahan, pergeseran kondisi sosial ekonomi penduduk maupun faktor eksternal seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi serta perkembangan Kabupaten-Kabupaten lain di sekitar Kabupaten Pamekasan yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan Kabupaten Pamekasan pada umumnya.

## 1. Potensi, Masalah Dan Prospek Struktur Ruang Wilayah

Struktur tata ruang wilayah terdiri atas sistem pusat pelayanan dan hirarki kota, sistem perwilayahan pembangunan, sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, dan pengembangan prasarana wilayah.

### a. Sistem Pusat Pelayanan dan Hirarki Kota

#### Potensi

1) Sistem perkotaan Pamekasan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), PKLp Kabupaten Pamekasan berada di Perkotaan Pakong dan Perkotaan Waru, sedangkan PPK berada di Perkotaan Tlanakan, Perkotaan Larangan, Perkotaan Batumarmar, Perkotaan Pasean,

Perkotaan Pademawu, Perkotaan Galis, Perkotaan Proppo, Perkotaan Pegantenan, Perkotaan Palengaan dan Perkotaan Kadur.

- 2) Kawasan perdesaan umumnya memiliki pusat pelayanan sendiri-sendiri dan memiliki hubungan yang kuat dengan kawasan perkotaan;
- 3) Kawasan perdesaan umumnya memiliki aksesibilitas dengan kawasan perkotaan;
- 4) Perkotaan Pamekasan dan sekitarnya mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat bahkan menunjukkan adanya interaksi dengan sekitarnya; serta
- 5) Beberapa kawasan perkotaan akan mengalami perkembangan pesat, yaitu : Perkotaan Waru dan Perkotaan Pakong,

#### Masalah

- 1) Beberapa kawasan perdesaan memiliki perkembangan yang lambat sehingga sukar mengejar ketertinggalan dengan perdesaan dan perkotaan lain;
- 2) Konsentrasi kegiatan akan lebih terfokus pada beberapa perkotaan yang dominan, dan pelayanan perkotaan ke seluruh wilayah berjalan kurang optimum;
- 3) Infrastruktur permukiman belum sepenuhnya menjangkau kawasan permukiman; serta
- 4) Terjadinya pengelompokan atau pemusatan fasilitas pada kawasan perkotaan, sehingga timbul daerah-daerah rawan kemacetan.

#### Prospek Pengembangan

- 1) Kawasan perdesaan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan dengan perkotaan;
- 2) Pengembangan secara berhirarkis antara perdesaan dan perkotaan akan mendorong keseimbangan pengembangan wilayah dalam skala kabupaten;
- 3) Jaringan jalan yang ada di perdesaan maupun perkotaan dapat dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan permukiman dan pusat produksi maupun pusat kegiatan lain seperti pariwisata; serta
- 4) Berbagai infrastruktur wilayah akan mendorong kawasan potensial.

b. Sistem Perwilayahan Pembangunan

Potensi

- 1) Setiap SSWP memiliki potensi spesifik, baik pertanian, industri, pariwisata, perikanan, dan potensi lain yang akan mendorong perkembangan wilayah; serta
- 2) Setiap ibukota kecamatan dan pusat SSWP memiliki potensi mendorong dan melayani wilayah masing-masing.

Masalah

Pada beberapa wilayah hinterland mempunyai keterbatasan aksesibilitas secara geografis dan administrasi ke pusat pelayanan.

Prospek Pengembangan

- 1) Beberapa kawasan sudah menunjukkan fungsi khusus yang akan mendorong fungsi setiap SSWP; serta
- 2) Pengembangan pada masing-masing kecamatan lebih disesuaikan dengan fungsi dan perannya sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Pamekasan.

c. Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Potensi

- 1) Permukiman perdesaan baik yang memiliki bentuk kompak ataupun menyebar umumnya memiliki pusat pengembangan masing-masing yang sangat potensial mendorong perkembangan kawasan perdesaan yang ada, serta terdapat banyak perdesaan yang mampu mendorong perkembangan perdesaan dalam skala yang lebih luas; serta
- 2) Tumbuhnya kawasan permukiman perkotaan baru yang mempunyai indikasi perkembangan pesat karena adanya potensi alami maupun potensi eksternal (akses). Sehingga semula kawasan tersebut mempunyai fungsi sebagai kawasan permukiman perdesaan cenderung beralih fungsi menjadi kawasan permukiman perkotaan.

### Masalah

- 1) Pusat pelayanan perdesaan banyak yang kurang berkembang; serta
- 2) Pusat permukiman perdesaan kurang mampu mendorong perkembangan wilayahnya.

### Prospek Pengembangan

- 1) Pusat perdesaan masih mampu dikembangkan untuk mendorong kawasan perdesaan masing-masing; serta
- 2) Interaksi antara permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan dapat ditingkatkan untuk mendorong keseimbangan penataan ruang.

#### d. Prasarana Wilayah

Prasarana wilayah di Kabupaten Pamekasan khususnya transportasi memiliki hubungan dengan sistem Nasional dan provinsi yang didukung oleh sistem jaringan jalan, kereta api, angkutan laut, telematika, dan prasarana lingkungan.

##### 1) Jalan Raya

#### Potensi

- Jalan raya di Kabupaten Pamekasan memiliki hubungan dengan sistem provinsi dan Nasional melalui jalan arteri primer dan kolektor primer;
- Peningkatan kegiatan dalam skala besar dan pengembangan perkotaan menjadikan beberapa jalan berpotensi untuk dilakukan peningkatan kelas jalan; serta
- Adanya jembatan Suramadu memungkinkan keterhubungan dengan kabupaten-kabupaten lain.

#### Masalah

Kemacetan yang terjadi di beberapa titik simpul transportasi karena merupakan jalan utama dan kepadatan pemusatan fasilitas. Pada umumnya terjadi di sekitar pasar atau kawasan pertokoan dengan penataan sirkulasi keluar dan masuknya kendaraan yang bersinggungan langsung dengan kendaraan yang memiliki intensitas sangat tinggi melintas di jalan raya.



### Prospek Pengembangan

Perlu adanya peningkatan lebar jalan pada ruas-ruas jalan tertentu di Kabupaten Pamekasan.

## 2) Kereta Api

### Potensi

- Terdapat jalur kereta api mati yang membentang di tepi jalan dari Kramat - Ambal - Branta Pesisir - Branta Tinggi - Larangan Tokol - Panglegur. Panjang jalur mati  $\pm$  10,78 km dengan 1 (satu) stasiun di Panglegur; serta
- Kondisi jalur kereta api ini masih baik.

### Masalah

Jalur kereta api yang ada mati sehingga tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya.

### Prospek Pengembangan

Perlunya pengaktifan kembali jalur kereta api mati tersebut, sehingga dapat difungsikan dan dapat memperlancar transportasi yang ada di Kabupaten Pamekasan.

## 3) Angkutan Laut

### Potensi

Terdapat beberapa pelabuhan yang sudah difungsikan untuk memperlancar transportasi laut di Kabupaten Pamekasan.

### Masalah

Kurangnya pengembangan pelabuhan di Kawasan Utara Kabupaten Pamekasan.

### Prospek Pengembangan

Arahan pengembangan pelabuhan dan pengadaan pelabuhan-pelabuhan baru untuk mendukung kelancaran transportasi di Kabupaten Pamekasan.

#### 4) Telematik

##### Potensi

- Telematika memiliki perkembangan yang sangat tinggi karena pada dasarnya sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan; serta
- Prasarana telematika ada yang sudah menjangkau beberapa desa di Kabupaten Pamekasan.

##### Masalah

- Perkembangan prasarana telematika kurang terintegrasi sehingga terkesan semrawut dengan perkembangan pesat; serta
- Penggunaan lebih terkonsentrasi di perkotaan sehingga masih terdapat area yang belum terlayani.

##### Prospek Pengembangan

- Pengembangan prasarana telematika akan terus dikembangkan dengan persaingan pasar yang kuat sehingga akan mampu menjangkau segenap pelosok;
- Penggunaan dan pengembangan telematika akan semakin mendorong pengetahuan masyarakat dan kegiatan bisnis; serta
- Memprioritas pengembangan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang jalan arteri dan kolektor serta;
- Pengembangan BTS.

#### e. Prasarana Lingkungan

##### Potensi

- 1) kawasan perdesaan pengelolaan prasarana lingkungan khususnya sampah banyak dilakukan secara mandiri yaitu membakar sampah tersebut pada masing-masing pekarangan rumah serta;
- 2) Pada kawasan perkotaan umumnya sampah telah dikelola khususnya di Kecamatan Pamekasan, Pademawu dan Tlanakan.

##### Masalah

- 1) Pada beberapa kawasan terdapat kesulitan mencari dan mengelola TPA serta;

- 2) Sampah dan limbah perkotaan memerlukan penanganan secara tersendiri.

#### Prospek Pengembangan

- 1) Penanganan sampah terutama di kawasan perdesaan dapat dilakukan secara mandiri dan diolah menjadi bahan kompos;
- 2) Melalui peningkatan kesadaran lingkungan dan pemanfaatan daur ulang sampah, maka volume sampah dapat direduksi sejak lebih awal;
- 3) Terdapat peluang mengelola sampah secara modern dengan skala besar melalui industri kompos dan pupuk organik serta;
- 4) Melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah.

## 2. Potensi, Masalah Dan Prospek Pengembangan Pola Ruang Wilayah

### a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, serta kawasan perlindungan cagar budaya.

#### 1) Kawasan Perlindungan Bawahannya

##### Potensi

Terdapat beberapa kawasan perlindungan bawahannya di Kabupaten Pamekasan sehingga memungkinkan untuk peresapan air hujan.

##### Masalah

Kurangnya kawasan perlindungan bawahannya di Kabupaten Pamekasan, sehingga masih ada daerah-daerah yang berpotensi banjir pada saat musim kemarau.

##### Prospek Pengembangan

Penambahan titik resapan air hujan di Kabupaten Pamekasan untuk menanggulangi kurangnya resapan air hujan tersebut.

#### 2) Kawasan Perlindungan Setempat

##### Potensi

- Terdapat sempadan sungai di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pamekasan;

- Terdapat embung di beberapa wilayah di Kabupaten Pamekasan serta;
- Terdapat beberapa mata air di beberapa wilayah di Kabupaten Pamekasan.

#### Masalah

Masih terdapat titik-titik banjir pada area-area tertentu.

#### Prospek Pengembangan

- Perlu mempertahankan keberadaan sempadan sungai di Kabupaten Pamekasan serta;
- Perlu adanya pengembangan dan pemeliharaan pada beberapa embung dan mata air yang ada di Kabupaten Pamekasan.

### 3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

#### Potensi

- Adanya potensi pantai berhutan bakau di Kabupaten Pamekasan serta;
- Adanya cagar budaya dan ilmu pengetahuan berada di Makam Syekh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo.

#### Masalah

Kurangnya peningkatan jaringan transportasi menuju lokasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan Makam Syekh Abdul Manan (Batu Ampar).

#### Prospek Pengembangan

- Peningkatan adanya potensi bakau di Kabupaten Pamekasan serta;
- Peningkatan jaringan jalan menuju makan syekh Abdul Manan.

### 3. Kawasan Budidaya

#### a. Kawasan Pertanian

##### 1) Kawasan Pertanian (tanaman pangan)

#### Potensi

- Padi di Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan

- Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean;
- Jagung di Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pasean;
  - Kedelai di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Batumarmar;
  - Kacang tanah di Kecamatan Proppo, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Pasean;
  - Kacang Hijau di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pasean;
  - Ubi Kayu di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
  - Ubi Jalar di Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Palengaan, dan Kecamatan Batumarmar serta;
  - Kacang Panjang di Kecamatan Proppo, Tlanakan, Larangan, Pegantenan, Pakong, Palengaan, Waru, dan Batumarmar.

#### Masalah

- Kurangnya pemasaran hasil pertanian lahan pangan tersebut;
- Terbatasnya modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;
- Terbatasnya penyuluhan dan informasi teknologi;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian; serta
- Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia untuk pengolahan hasil pertanian.

### Prospek Pengembangan

- Perlunya pengembangan hasil produksi pertanian lahan pangan di Kabupaten Pamekasan;
- Perlunya bantuan modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;
- Perlunya penyuluhan dan informasi teknologi tentang pertanian serta;
- Perlunya sarana dan prasarana pertanian.

## 2) Kawasan Pertanian (perkebunan)

### Potensi

- Kelapa di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- Pinang di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;
- Jambu Mente di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- Siwalan di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- Cabe Jamu di Kecamatan Larangan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Batumarmar;
- Agave di Kecamatan Larangan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- Kapuk Randu di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;
- Tembakau di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan

Batumarmar, Kecamatan Pasean; Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Tlanakan.

- Asam Jawa di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo;
- Kopi di Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Pakong;
- Lada di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Pakong;
- Kunyit di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Waru;
- Laos di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru dan, Kecamatan Pasean;
- Jahe di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- Kencur di Kecamatan Galis, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;
- Temu Lawak di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- Temu Ireng di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;
- Kunci di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean; serta;
- Durian di Kecamatan Pegantenan.

### Masalah

- Kurangnya pemasaran hasil perkebunan tersebut;
- Terbatasnya modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;
- Terbatasnya penyuluhan dan informasi teknologi;
- Terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan; serta
- Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia untuk pengolahan hasil perkebunan.

### Prospek Pengembangan

- Perlunya pengembangan hasil produksi perkebunan di Kabupaten Pamekasan;
- Perlunya bantuan modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;
- Perlunya penyuluhan dan informasi teknologi tentang perkebunan serta;
- Perlunya sarana dan prasarana perkebunan.

## 3) Kawasan Pertanian (holtikultura)

### Potensi

- Bawang Merah di Kecamatan Proppo, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean;
- Cabe Rawit di Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
- Tomat di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Pasean;
- Terong di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
- Jeruk di Kecamatan Larangan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean;



- Mangga di Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Batumarmar;
- Rambutan di Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean;
- Durian di Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Waru;
- Jambu Air di Kecamatan Proppo, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, dan Kecamatan Pasean;
- Pisang di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean;
- Sawo Manila di Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan serta;
- Sawo Kecil di Kecamatan Kadur dan Kecamatan Larangan.

#### Masalah

- Kurangnya pemasaran hasil perkebunan tersebut;
- Terbatasnya modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;
- Terbatasnya penyuluhan dan informasi teknologi;
- Terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan; serta
- Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia untuk pengolahan hasil perkebunan.

#### Prospek Pengembangan

- Perlunya pengembangan hasil produksi perkebunan di Kabupaten Pamekasan;
- Perlunya bantuan modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;
- Perlunya penyuluhan dan informasi teknologi tentang perkebunan serta;
- Perlunya sarana dan prasarana hortikultura.

#### 4) Kawasan Pertanian (peternakan)

##### Potensi

- Sapi terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean;
- Kambing terdapat di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;
- Domba terdapat di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean;
- Ayam Buras terdapat di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Waru;
- Ayam Petelur terdapat di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean serta;
- Ayam Pedaging terdapat di Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Batumarmar.

##### Masalah

Kurang terintegrasinya para pengusaha ternak satu dengan ternak lainnya.

##### Prospek Pengembangan

Perlunya keterhubungan antara pemilik ternak satu dengan pemilik ternak yang lainnya.

b. Kawasan Kehutanan

Potensi

- 1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Tlanakan;
- 2) Kawasan Hutan Rakyat di Kabupaten Pamekasan tersebar di seluruh kecamatan.

Masalah

- 1) Adanya pengalihfungsian hutan rakyat menjadi kawasan lain serta;
- 2) Penebangan kayu di Kawasan hutan Produksi;

Prospek Pengembangan

- 1) Mempertahankan kawasan hutan yang sudah ada serta;
- 2) Penebangan kayu pada kawasan hutan sebenarnya sudah diantisipasi oleh dinas yang bersangkutan melalui kerjasama secara langsung dengan masyarakat.

c. Kawasan Perikanan

Potensi

- 1) Perikanan Tangkap : beberapa kawasan penghasil ikan di Kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Larangan, Galis dan Pademawu.
- 2) Budidaya Perikanan terdiri dari :
  - Budidaya ikan tambak dan kolam : ikan bandeng dan udang yang berada di Kecamatan Galis dan Pademawu.
  - Garam merupakan komoditas unggulan Pamekasan yang kualitasnya sudah diakui pasar yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Pademawu dan Galis.
  - Rumput Laut di Kabupaten Pamekasan terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis dan Kecamatan Batumarmar. Jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah jenis *Euclima Cottoni*, dan *Spinosum*.

### Masalah

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan;
- 2) Kurangnya informasi dan sentuhan teknologi dalam pengoptimalan garam dan rumput laut serta;
- 3) Penyuluhan atau pelatihan dinas terkait atau pemerintahan setempat untuk pengembangan dan pengelolaan perikanan.

### Prospek Pengembangan

Mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan perikanan dengan diadakannya penyuluhan dan pelatihan dinas terkait atau pemerintahan.

#### d. Kawasan Industri

##### Potensi

- 1) Industri kecil (industri rumah tangga), dengan lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dan menjadi satu dengan rumah-rumah penduduk.
- 2) Industri menengah meliputi :
  - Industri Garam Yodium di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis;
  - Industri Air Minum Mineral di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan;
  - Industri Rokok di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Proppo;
  - Industri Petis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean; dan
  - Industri Batik di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru.

### Masalah

- 1) Kurangnya pemasaran hasil industri tersebut;
- 2) Terbatasnya modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;

- 3) Terbatasnya penyuluhan dan informasi teknologi;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana industri; serta
- 5) Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia untuk pengolahan hasil industri.

#### Prospek Pengembangan

- 1) Perlunya pengembangan hasil produksi perkebunan di Kabupaten Pamekasan;
- 2) Perlunya bantuan modal untuk peningkatan produktifitas maupun pengolahan;
- 3) Perlunya penyuluhan dan informasi teknologi tentang industri serta;
- 4) Perlunya sarana dan prasarana industri.

#### e. Kawasan Pertambangan

##### Potensi

Kawasan pertambangan adalah daerah-daerah yang memiliki potensi tambang yang layak secara ekonomis untuk ditambang, sehingga arahan lokasinya akan mengikuti lokasi bahan tambang. Kawasan penambangan di Kabupaten Pamekasan terdiri dari minyak bumi di Kecamatan Kadur, mineral non logam dan batuan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan.

##### Masalah

Penambangan liar dapat merusak potensi tambang yang ada.

##### Prospek Pengembangan

Perlu penangan khusus terhadap perilaku penambangan liar yang ada.

#### f. Kawasan Pariwisata

##### Potensi

Pariwisata di Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata religi. Untuk lebih jelasnya terdapat pada uraian berikut :

### 1) Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya disini diarahkan pengembangannya pada wisata terdiri atas :

- Wisata Kerapan Sapi di Kecamatan Pamekasan;
- Sisa Pembangunan Candi di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo;
- Wisata Kontes Sapi Sonok di Kecamatan Waru;
- Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan;
- Makam Syeikh Gozali di Desa Sotabar Kecamatan Pasean;
- Makam Ghung Seppo – Gatotkaca di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan;
- Makam Syekh Abdul Manan (Batu Ampar) terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo;
- Makam Joko Tarub di Desa Montok Kecamatan Larangan; serta
- Vihara di Desa Polagan Kecamatan Galis.

### 2) Pariwisata Alam

Untuk wisata alam pengembangannya diarahkan pada :

- Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan yaitu wisata Api Tak Kunjung Padam;
- Desa Tanjung Kecamatan Pademawu yaitu wisata Pantai Jumiang;
- Kecamatan Batumarmar yaitu wisata Lembah Sembir;
- Desa Montok Kecamatan Larangan yaitu wisata Pantai Talang Siring; dan
- Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean yaitu wisata Pantai Batu Kerbuy.

### 3) Pariwisata Buatan

Untuk wisata buatan pengembangannya diarahkan di Kecamatan Pamekasan yaitu wisata Kolam Renang Tirta Basuki dan Wisata Kota.

#### Masalah

- Sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau obyek masih kurang mendukung maupun transportasi umum ke arah lokasi wisata masih terbatas;

- Belum adanya pengembangan wisata secara terpadu dan berkelanjutan;
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan obyek pariwisata;
- Masih langkanya cinderamata;
- Promosi tentang keunikan obyek sangat terbatas;
- Sarana dan prasarana penunjang atraksi terbatas; serta
- Pengembangan pariwisata belum menjadi prioritas utama dari masing-masing sektoral.

#### Prospek Pengembangan

- Peningkatan kondisi jalan;
- Pengembangan sarana angkutan umum yang menghubungkan obyek wisata dan antar obyek;
- Pengadaan paket wisata di wilayah Kabupaten Pamekasan;
- Pembuatan kalender kegiatan wisata;
- Peningkatan peran serta masyarakat, dimana pemerintah melibatkan masyarakat dalam mengembangkan obyek dengan melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan;
- Penggalan dan pengembangan produk cinderamata yang bisa memberikan ciri khas lokal baik berupa hasil kerajinan, makanan dengan melibatkan dinas terkait, masyarakat dan pihak pelaku industri wisata;
- Peningkatan promosi melalui CD, leaflet atau booklet, dengan berbagai media lainnya (internet, elektronik, dll);
- Pengadaan gelar pariwisata pada event-event tertentu;
- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang atraksi;
- Pengadaan sarana penginapan dan pelengkapinya seperti restoran dan sejenisnya serta;
- Perlu adanya kerjasama antar dinas/pemerintah maupun dengan pihak swasta sebagai penanam modal untuk pengembangan pariwisata.

g. Kawasan Pesisir

Potensi

- 1) Keberadaan Terumbu Karang dan Mangrove di pesisir Kabupaten Pamekasan;
- 2) Aktivitas penduduk di wilayah pesisir didominasi oleh nelayan.

Masalah

- 1) Belum adanya peraturan yang tegas tentang penataan ruang wilayah pesisir, baik pedoman pelaksanaannya maupun peraturan penunjang lainnya, sehingga menyebabkan kewenangan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir semakin tajam, kegiatan yang tumpang tindih, ketidakjelasan status lahan, dan pelanggaran hukum oleh pengguna sumberdaya semakin luas;
- 2) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
- 3) Terbatasnya sarana prasarana dasar dan infrastruktur wilayah pesisir;
- 4) Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya pesisir untuk pembangunan ekonomi;
- 5) Pencemaran wilayah pesisir;
- 6) Ancaman intrusi air laut;
- 7) Degradasi habitat wilayah pesisir.

Prospek Pengembangan

- 1) Penataan pemanfaatan ruang wilayah pesisir;
- 2) Meningkatkan sumberdaya manusia;
- 3) Membangun sarana dan prasarana wilayah pesisir;
- 4) Mengembangkan potensi sumberdaya wilayah pesisir;
- 5) Meningkatkan kualitas lingkungan wilayah pesisir;
- 6) Meningkatkan upaya mitigasi bencana.

h. Potensi, Masalah Dan Prospek Pengembangan Kawasan Strategis

Potensi

- 1) Kawasan Agropolitan Rupanandur yang berada di Kecamatan Waru, Kecamatan Pakong, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pegantenan.
- 2) Budidaya Perikanan yaitu :



- Kawasan Tambak Garam di Desa Branta Tinggi dan Desa Branta Pesisir di Kecamatan Tlanakan; Desa Badduri, Pagagan, Majungan, Padelengan, Pademawu Timur, Tanjung, Bunder di Kecamatan Pademawu; dan Desa Pandan, Desa Lembung, Desa Polagan dan Desa Artodung di Kecamatan Galis.
  - Kawasan Budidaya Rumput Laut yang tersebar di Kecamatan Pademawu, Pasean dan Batumarmar.
- 3) Kawasan industri Kerajinan Batik Madura meliputi Desa Klampar dan Desa Toket di Kecamatan Proppo.
- 4) Kawasan pariwisata meliputi :
- Pariwisata Alam yaitu Api Tak Kunjung Padam terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan; Pantai Jumiang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu; Pantai Batu Kerbuy yang terletak di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean dan Pantai Talang Siring yang terletak di Desa Montok Kecamatan Larangan.
  - Pariwisata Budaya yaitu obyek wisata budaya kesenian dan upacara seperti Event Kerapan Sapi dan Semalam di Madura yang berada di Kecamatan Pamekasan, upacara petik laut di Pantai Batu Kerbuy dan wisata kontes Sapi Sonok di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru.
  - Pariwisata Rohani yaitu Makam Syekh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo dan Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) di Desa Kolpajung Kecamatan Pamekasan.
  - Pariwisata Buatan Kolam Renang Tirta Basuki dan wisata kota lokasinya berada di tengah Kota Pamekasan.
5. Kawasan Pelabuhan yaitu kawasan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan.

#### Masalah

- Belum adanya pemerataan perkembangan antar kawasan utara dan kawasan selatan, antar perkotaan serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

- Pertumbuhan pembangunan yang masih relatif kecil karena adanya keterbatasan permodalan, pendidikan, ketrampilan sumberdaya manusia, manajemen, serta pemasaran:
- Terbatasnya infrastruktur wilayah yang dapat mempermudah dan mendukung kegiatan sosial-ekonomi.

#### Prospek Pengembangan

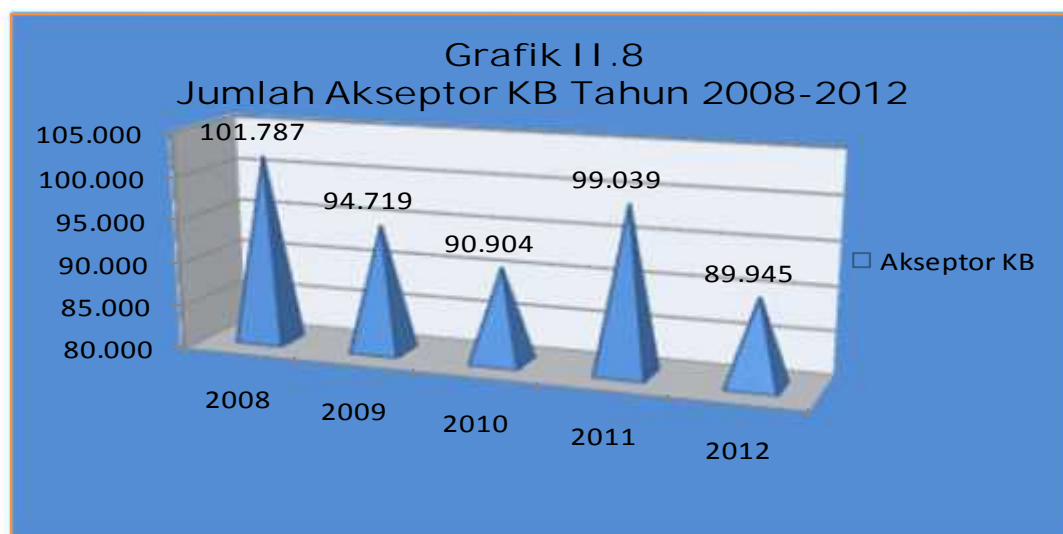
- pengembangan infrastruktur dan pembangunan tata ruang kawasan pedesaan untuk mempercepat perkembangan Kawasan agropolitan Rupanandur.
- Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, yang didukung peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan informal, dengan peningkatan pembangunan sarana dan prasarananya.
- Peningkatan kerja sama, keterlibatan dari pihak swasta dalam pembangunan seperti dalam pengembangan sektor wisata, pengembangan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, pengembangan sumber energi dan lain-lain.

#### d. KB dan Keluarga Sejahtera

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan membatasi kelahiran yang dilakukan melalui program KB. Program KB merupakan perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Adapun tujuan umum dari program KB itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Sedangkan tujuan khususna adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka

kelahiran bayi dan meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.



Sumber: Data Base Kinerja Tahun 2008-2012 Kabupaten Pamekasan

Jika dilihat dari grafik II.8, maka jumlah akseptor KB di Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif. Pada tahun 2008 jumlah akseptor KB sebanyak 101.787 dan mengalami penurunan hingga tahun 2010 menjadi 90.904. pada tahun 2011 jumlah akseptor KB naik menjadi 99.039 namun pada tahun berikutnya kembali turun menjadi 89.945. Kondisi yang demikian ini dikarena memang akhir-akhir ini popularitas KB semakin menurun karena komitmen politis dan operasional berbagai pihak mulai menurun dan memudar.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus mulai menggalakkan kembali program ini melalui berbagai pihak yang terkait. Sebab jika tidak, bukanlah hal yang mustahil akan terjadi ledakan penduduk yang nantinya akan berdampak pada pembangunan yang kini tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena jika dilihat dari data yang ada, keluarga di Kabupaten Pamekasan sebagian besar masih tergolong dalam keluarga pra sejahtera.

Di Kabupaten Pamekasan jumlah keluarga pra sejahtera lebih banyak jika dibanding jumlah keluarga pada tahapan di atasnya. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 91.448 keluarga pra sejahtera. Jumlah ini terbanyak

berada di Kecamatan Proppo yaitu sebesar 13.956 keluarga pra sejahtera. Sedangkan jumlah keluarga sejahtera III+ terbanyak tentu saja terdapat di Kecamatan Pamekasan yaitu sebanyak 1.717 keluarga karena memang wilayah yang dekat dengan pemerintahan akan lebih jauh berkembang dan sejahtera dibanding dengan yang jauh dari pusat pemerintahan.

Hal ini dikarenakan sejak awal sistem pembangunan ekonomi dilakukan dengan pendekatan trickle down effect dimana pembangunan hanya dilakukan di pusat atau titik-titik tertentu dalam hal ini yang dekat dengan pusat pemerintahan dan diharapkan hasil dari pembangunan di titik-titik ini bisa merembes ke bawah yaitu di daerah-daerah hinterlandnya. Namun pendekatan ini justru menimbulkan kesenjangan antara daerah pusat dengan daerah pinggiran. Maka tidak heran jika jumlah keluarga sejahtera III+ di Kecamatan Pamekasan lebih banyak dan sebaliknya jumlah keluarga pra sejahtera lebih banyak terkonsentrasi di Kecamatan Proppo dan kecamatan lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan.

Tabel II.34

## Data Jumlah Kepala Keluarga per Tahapan KS Hasil Pendataan Keluarga

Kecamatan	Pra Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Keluarga Sejahtera II		Keluarga Sejahtera III		Keluarga Sejahtera III+		Jumlah
	Keluarga	%	Keluarga	%	Keluarga	%	Keluarga	%	Keluarga	%	
1. Tlanakan	9.220	56,13	3.582	21,81	1.967	11,97	1.456	8,86	201	1,2	16.426
2. Pademawu	5.290	23,07	5.935	25,88	6.166	26,89	4.267	18,61	1.273	5,6	22.931
3. Galis	2.918	31,72	1.619	17,60	1.227	13,34	2.691	29,26	743	8,1	9.198
4. Larangan	5.078	29,35	4.518	26,12	3.481	20,12	3.623	20,94	599	3,5	17.299
5. Pamekasan	7.493	30,97	4.410	18,23	5.010	20,71	5.564	23	1.717	7,1	24.194
6. Proppo	13.956	66,77	4.142	19,82	1.790	8,56	876	4,19	137	0,7	20.901
7. Palengaan	10.243	51,19	5.968	29,82	2.390	11,94	1.090	5,45	320	1,6	20.011
8. Pegantenan	7.065	39,48	4.861	27,17	3.184	17,79	2.582	14,43	201	1,1	17.893
9. Kadur	3.081	21,63	4.896	34,37	4.877	34,24	1.147	8,05	244	1,7	14.245
10. Pakong	2.998	26,82	2.384	21,33	2.443	21,85	3.052	27,30	302	2,7	11.179
11. Waru	10.462	60,71	3.525	20,46	2.182	12,66	958	5,56	105	0,6	17.232
12. Batumarmar	5.693	26,80	7.479	35,20	6.673	31,41	1.049	4,94	352	1,7	21.246
13. Pasean	7.951	44,03	4.880	27,03	3.843	21,28	1.109	6,14	274	1,5	18.057
Jumlah	91.448	-	58.199	-	45.233	-	29.464	-	6.468	-	230.812

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

e. Otoda

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi : ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumberdaya manusia, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi nasional, regional, kebijakan moneter dan perkembangan harga.

Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebesar 5,53 persen, pada tahun 2009 turun menjadi 5,18, pada tahun 2010 naik lagi menjadi sebesar 5,75 persen, pada tahun 2011 naik menjadi 6,21 persen, dan pada tahun 2012 naik menjadi 6,32 persen.

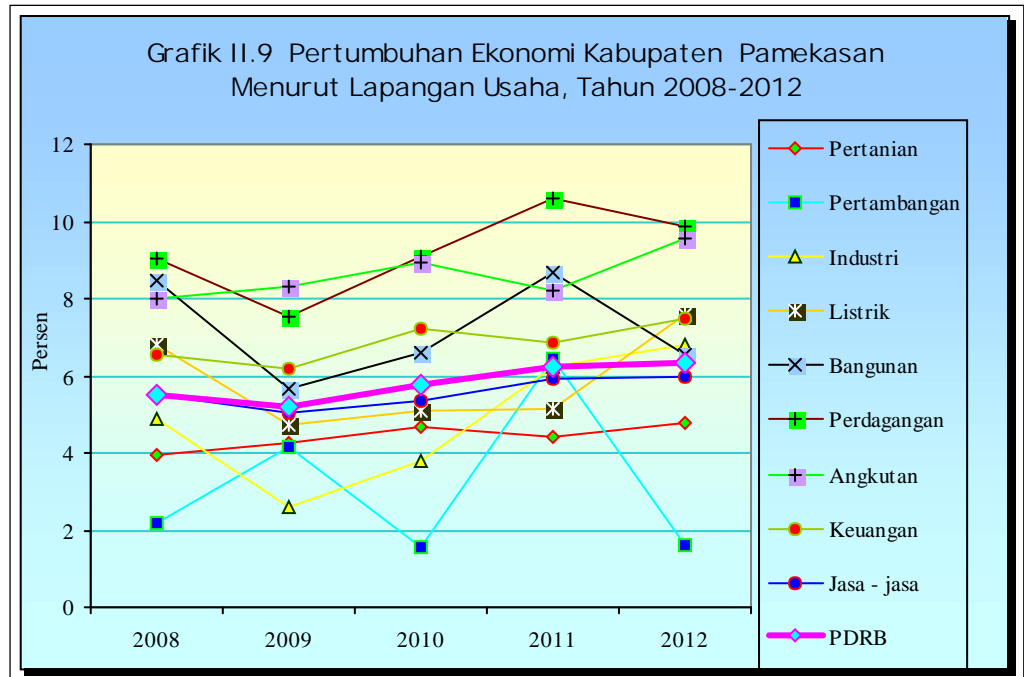
Mengingat potensi sumber pendapatan terbesar Kabupaten Pamekasan berasal dari sektor pertanian (peranan terbesar) dengan pertumbuhannya 4,78 persen pada tahun 2012 maka faktor sumber daya alam perlu dikelola dan dipelihara dengan benar dan diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan atau "sustainable development" yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel II.35  
 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Pamekasan  
 Tahun 2008-2012 Dari PDRB ADHK 2000 (Persen)

SEKTOR	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Primer (Agriculture)					
1. Pertanian	3,93	4,42	4,67	4,39	4,78
2. Pertambangan & Penggalian	2,16	4,15	1,56	6,45	1,59
Sekunder (Manufaktur)					
3. Industri Pengolahan	4,88	2,60	3,80	6,21	6,78
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,80	4,75	5,11	5,12	7,56
5. Bangunan	8,49	5,65	5,42	8,70	6,52
Tersier (Service)					
6. Perdagn, Hotel & Restoran	9,06	7,51	9,09	10,61	9,87
7. Pengangktn & Komunikasi	7,99	8,31	8,91	8,22	9,58
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,57	6,18	7,21	6,86	7,49
9. Jasa-jasa	5,50	5,02	5,34	5,94	5,99
PDRB	5,53	5,18	5,75	6,21	6,32

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Sedangkan untuk sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mana mengalami kenaikan hingga pertumbuhannya mencapai 10,61 persen. Hal ini bisa kita maklumi karena ada beberapa fenomena yang mendukung peningkatan pertumbuhan sektor ini, di samping dampak dari Jembatan Suramadu yang membuat akses kemudahan untuk datang ke kabupaten-kabupaten di Pulau Madura termasuk di dalamnya Kabupaten Pamekasan yang merupakan eks karesidenan Madura, juga banyaknya event-event yang mendukung seperti lomba Kerapan Sapi, Pagelaran Sapi Sonok, Car Free Day di Alun-Alun Arek Lancor tiap hari Minggu pagi yang secara tidak langsung ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta menguatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan juga bisa dilihat pada grafik berikut :



Setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau luar negeri). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar bagi pembangunan di Jawa Timur tidak terkecuali Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu berbagai program-program pengentasan kemiskinan



terus dicanangkan disemua aspek baik dalam aspek pendidikan maupun ekonomi dan aspek sosial lainnya. Menurut catatan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2011 mencapai 179.200 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka jumlah ini tidak sefantastis pada tahun 2010 dan 2008. Artinya kurun waktu 2008 hingga 2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan mencapai 213.055 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 200.980 jiwa. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan ini mengindikasikan bahwa ada capaian dari pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan meskipun belum semuanya bisa terbebas dari kemiskinan, namun berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun ini merupakan perkembangan yang cukup berarti bagi Kabupaten Pamekasan.



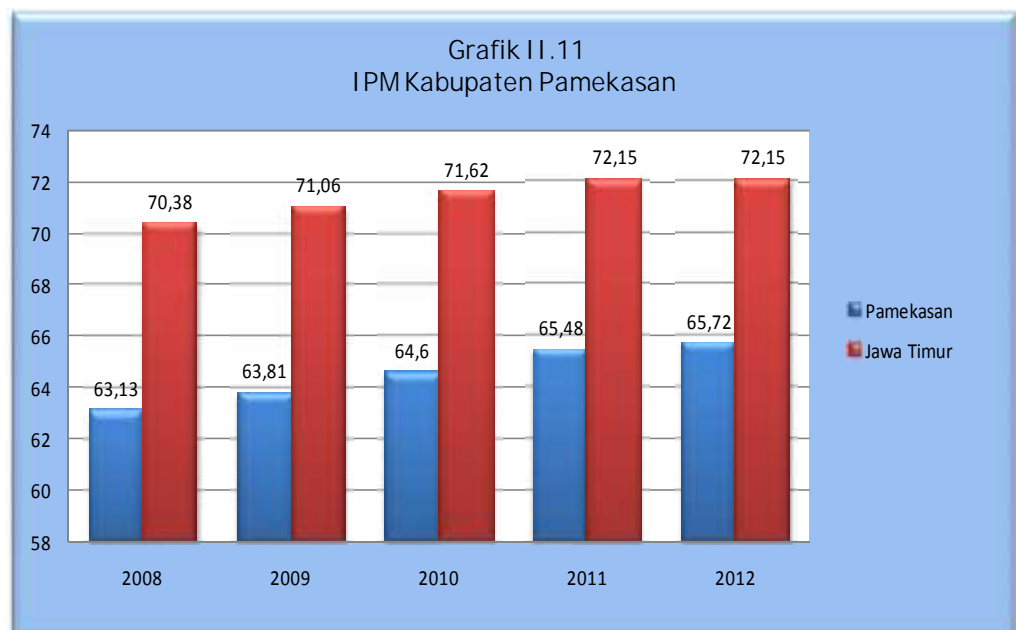
Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan ini mengindikasikan bahwa ada capaian dari pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan meskipun belum semuanya bisa terbebas dari kemiskinan, namun berkurangnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun ini

merupakan perkembangan yang cukup berarti bagi Kabupaten Pamekasan.

### 3. IPM Kabupaten Pamekasan

Kualitas Hidup Manusia Kabupaten Pamekasan tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini diterbitkan setiap tahun sejak tahun 1990. IPM memberikan suatu ukuran yang menggabungkan tiga dimensi tentang pembangunan manusia yaitu; Pertama, panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup). Kedua, terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi. Ketiga, memiliki standart hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan).

Meskipun IPM merupakan gabungan dari tiga dimensi pembangunan, namun indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Hal ini karena IPM tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksetaraan dan sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan.



IPM Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2008 sebesar 70,38 naik pada tahun 2009 menjadi 71,06 dan hingga tahun 2010 sebesar 71,62, pada tahun 2011 menjadi 72,15, dan pada tahun 2012 sebesar 72,15. Kenaikan IPM Jawa Timur dari tahun 2008 hingga 2012 ini juga diikuti oleh Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini terlihat dari IPM Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008 sebesar 63,13. Kondisi ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2009 sebesar 63,81, pada tahun 2010 IPM Kabupaten Pamekasan meningkat menjadi 64,6, pada tahun 2011 mencapai 65,48, dan pada tahun 2012 sebesar 65,72.

Meskipun terjadi disparitas angka IPM antara Jawa Timur dengan Kabupaten Pamekasan, namun peningkatan yang terjadi merupakan indikator adanya peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Pamekasan yaitu adanya peningkatan angka harapan hidup, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dan terpenuhinya standart hidup yang layak bagi penduduk.

## 2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### a. Ketenagakerjaan

Untuk saat ini, situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan mengalami sedikit perubahan dalam lima tahun terakhir. Tabel II.38 mencatat kenaikan penduduk usia 15 tahun ke atas bersifat fluktuatif. Pada tahun 2008 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 573.382 jiwa. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan hingga pada tahun 2012 menjadi 609.762 jiwa. Sehingga angkatan kerja pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja sebanyak 456.893 jiwa dan tahun-tahun berikutnya menunjukkan kecenderungan menurun hingga tahun 2012 naik lagi menjadi 458.729 jiwa.

Dua variabel yaitu jumlah penduduk usia kerja dengan angkatan kerja mempengaruhi angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pada tahun 2008, TPAK Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka 76,41 persen dan

akhirnya pada tahun 2012 menjadi 77,48 persen. Sedangkan tingkat kesempatan kerja pada tahun 2012 sebesar 97,70 persen.

Meskipun angka tingkat kesempatan kerja menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh lowongan pekerjaan yang ada. oleh karena itu di Kabupaten Pamekasan juga masih ditemui adanya pengangguran. Namun dari catatan yang ada, jumlah pengangguran di Kabupaten Pamekasan dalam kurun tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan penurunan. misalnya pada tahun 2008 jumlah pengangguran sebanyak 15.614 jiwa pada tahun 2012 berkurang menjadi 10.552 jiwa.

Tabel II.36  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja  
dan Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Pamekasan 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk	774.969	785.870	795.918	807.828	818.662
Penduduk Usia 15 tahun ke atas	573.382	581.455	584.927	597.741	609.762
Bukan angkatan kerja	141.039	142.716	148.188	171.738	133.352
Angkatan kerja	456.893	469.266	438.054	399.523	458.729
Pengangguran	15.614	10.247	15.471	11.559	10.552
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	76,41	76,68	74,72	69,94	77,48
Tingkat kesempatan kerja (%)	96,58	97,82	96,47	97,11	97,70
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,42	2,18	3,53	2,89	2,30

Sumber : Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2013

Sementara itu tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,42 persen hingga tahun 2012 menjadi 2,30 persen. Adanya penurunan jumlah pengangguran ini menunjukkan perkembangan yang positif terhadap usaha-usaha pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pamekasan.

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a. Potensi Unggulan Daerah

##### 1. Potensi Pertanian

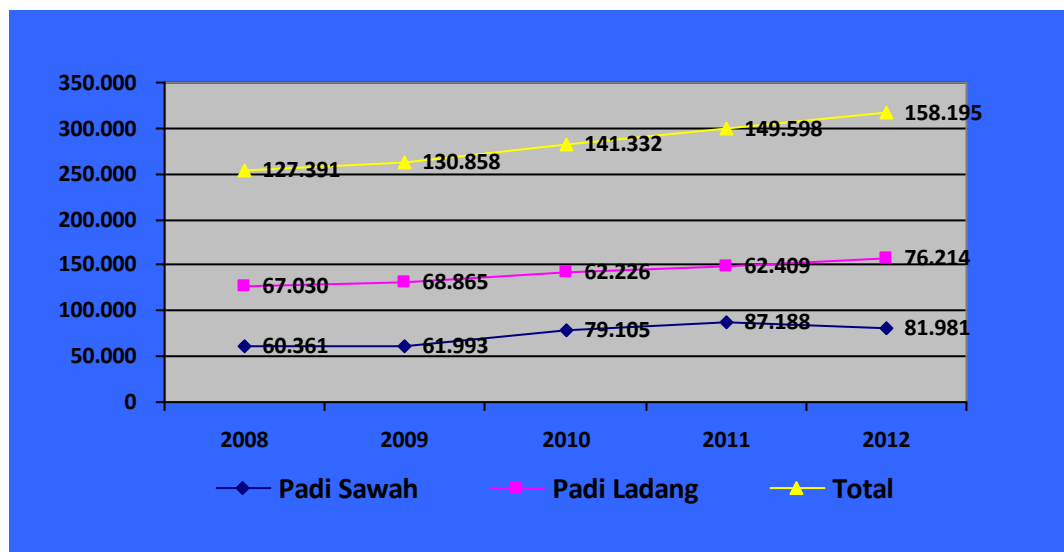
Sektor Pertanian mengalami pertumbuhan pesat. Sebagai apresiasi atas keberhasilan ini Pemerintah memberikan penghargaan Bupati Pamekasan berupa Satya Lencana Wirakarya Pertanian pada tahun 2011. Komoditi pertanian terpenting di Kabupaten Pamekasan mencakup tanaman pangan dan Hortikultura.

##### a. Komoditi Padi

Beras merupakan makanan pokok dan sumber kalori utama masyarakat Pamekasan. Varietas Padi adalah varietas padi hibrida maupun inbrida baik yang dikembangkan di sawah berpengairan teknis, tadah hujan maupun lahan kering.

Produksi padi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 sudah mencapai 158.195 ton, yang dihasilkan dari lahan seluas 24.263 hektar. Peningkatan produksi padi masih dilakukan dengan penggunaan Varietas unggul baru (VUB), optimalisasi lahan dan perbaikan teknologi budidaya dengan PTT (Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu).

Grafik II.12  
Perkembangan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang



Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Atas keberhasilan peningkatan produksi beras nasional selama 5 tahun berturut-turut, Kabupaten Pamekasan memperoleh penghargaan Presiden RI pada tahun 2009.

Sentra utama padi di Kabupaten Pamekasan terdapat di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pademawu, dan Pakong (Lahan sawah) dan Kecamatan Proppo, Larangan, dan Pegantenan (lahan kering/tegal).

### Potensi Pengembangan

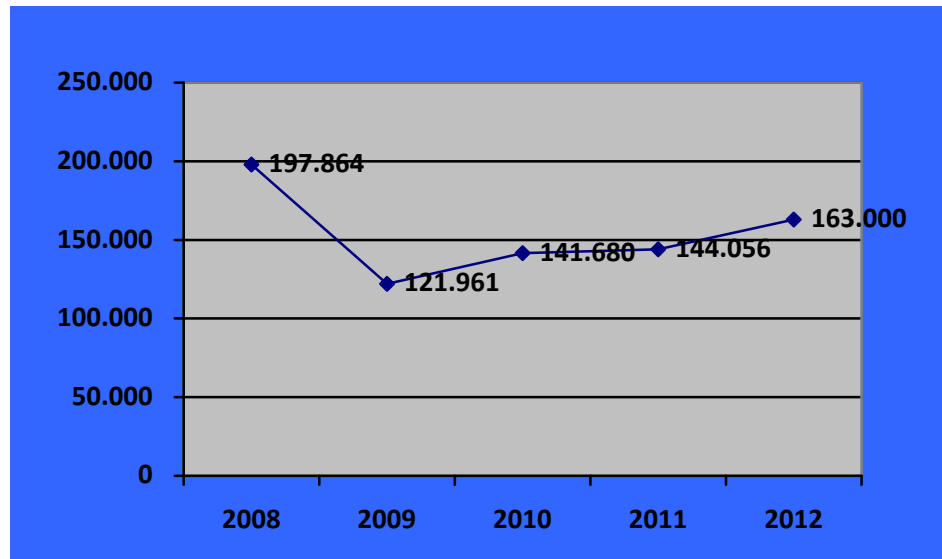
Selama ini pengembangan padi difokuskan pada upaya peningkatan produksi beras. Agenda kedepan agar komoditi ini memiliki harga dan nilai tambah ekonomis tinggi, pengembangan budidaya padi diarahhkan pada:

- Pengembangan Industri Beras (Beras Super, Organik)
- Pengembangan olahan berbasis beras (Tepung Beras)
- Jerami sebagai bahan pupuk organik
- Briket arang sekam: sebagai bahan bakar
- Bekatul (serbuk kulit ari beras); sebagai bahan makanan ternak, dan
- Dedak; untuk pakan ternak, minyak dedak (rice brain oil) untuk minyak goreng

#### b. Komoditi Jagung

Jagung merupakan sumber makanan pokok kedua setelah beras. Jagung yang dikembangkan mencakup jagung komposit/lokal dan hibrida. Dengan luas lahan lebih dari 46.045 hektar, produksi jagung Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 mencapai 163.000 ton.

Grafik II.13  
Perkembangan Produksi Jagung Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Didorong permintaan jagung yang semakin meningkat baik untuk pangan, pakan ternak dan pakan hijauan ternak, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mendorong pengembangan budidaya jagung sebagai tanaman alternatif tembakau.

Pengembangan jagung hibrida diprioritaskan pada daerah dengan pengairan teknis, sedangkan jagung komposit pada lahan kering/tegal. Beberapa varietas jagung hibrida yang dikembangkan oleh petani di Pamekasan yaitu BISI, Bima, Pioneer dan Nusantara.

Sentra utama produksi jagung di Kabupaten Pamekasan terdapat di Kecamatan Baturmarmar, Pasean, Palengaan, Waru dan Kadur.

#### Potensi Pengembangan

- ❖ Produk Primer: Beras Jagung, Pati Jagung (tepung maizena), Jagung marning dan emping jagung
- ❖ Pakan ternak dan pakan hijauan ternak
- ❖ Sumber Energi: bioetanol

❖ Bahan Baku Industri:

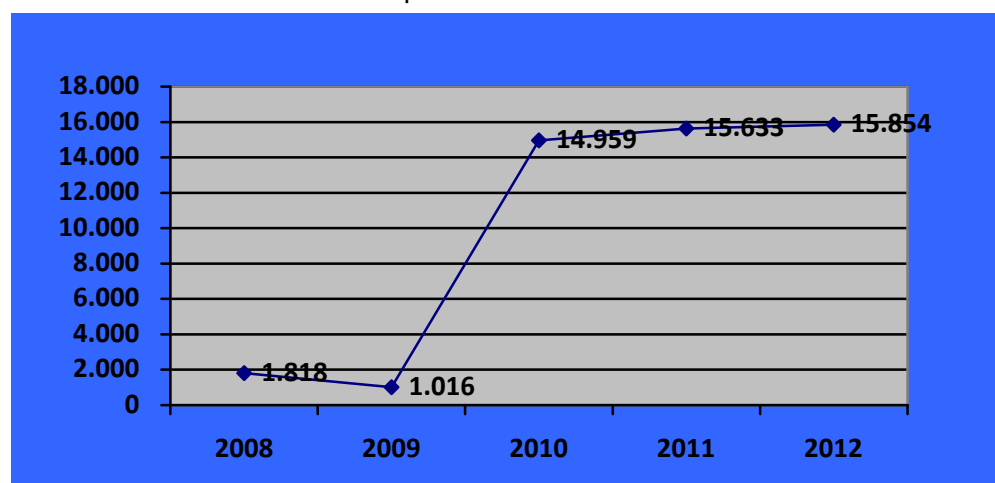
- Tongkol jagung: gula xylitol, produk furfural (pelarut, bahan pennis dan campuran insektisida)
- Saripati jagung: polimer, pengganti bahan plastik.

c. Komoditi Bawang Merah

Bawang Merah Varietas Manjung Merupakan Varietas Unggul Bawang merah yang berasal dari Kabupaten Pamekasan, telah dilepas Kementerian pertanian pada tahun 2007. Keunggulan; produktivitas tinggi, ketahanan terhadap hama penyakit, ketahanan kekeringan dan cita rasa gurih dan harum (sangat cocok untuk bawang goreng).

Produksi bawang merah manjung di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 mencapai 15.854 ton, berasal dari lahan seluas 2.208 ha yang tersebar di 9 Kecamatan. Pengembangan usaha budidaya bawang merah dilakukan dengan ekstensifikasi lahan, penumbuhan kelompok penangkar benih dan perbaikan teknis budidaya dengan pendekatan GAP (Good Agricultural Practices). Untuk meningkatkan nilai tambah juga dikembangkan usaha pengolahan bawang goreng di daerah sentra bawang.

Grafik II.14  
Perkembangan Produksi Bawang Merah di  
Kabupaten Pamekasan



Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013



Sentra utama produksi Jagung di Kabupaten Pamekasan terdapat di Kecamatan Batumarmar, Pasean, dan Waru. Wilayah pengembangan mencakup Kecamatan Palengaan, Proppo, Galis dan Pademawu.

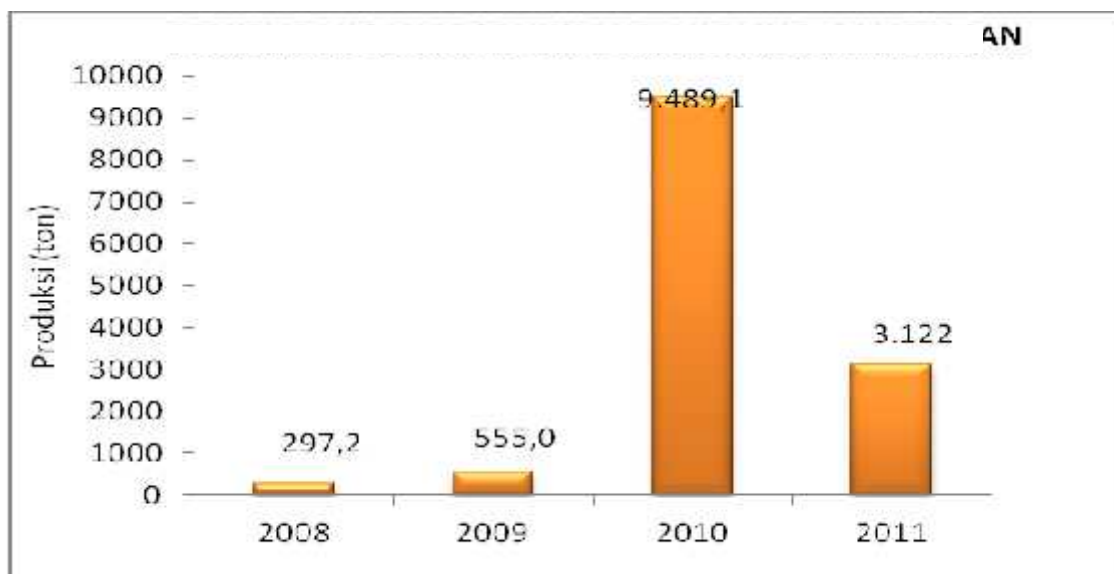
#### Potensi Pengembangan

- On farm: Peningkatan produksi bawang merah merah, Usaha budidaya bawang merah organik, Pengembangan Pembibitan Bawang Merah.
- Industri Olahan berbasis bawang merah: Bawang Goreng; tepung bawang, krupuk bawang, oleoresin, pasta bawang dan minyak bawang

#### d. Durian

Durian Pamekasan terkenal karena rasanya lebih manis dibandingkan durian dari daerah lain. Pada tahun 2009 pohon durian potensial mencapai 8.001 pohon, pada tahun tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah pohon durian usia produktif menjadi 17.377 pohon. Peningkatan tersebut seiring kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam upaya meremajakan (replanting) kebun-kebun durian milik rakyat yang telah tua/non produktif. Usaha lain yaitu introduksi varietas unggul, perbaikan teknik budidaya dan pengendalian OPT durian. Periode panen durian terjadi periode bulan Oktober-Desember-Januari.

Grafik II.15  
Perkembangan Produksi Durian di Kabupaten Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Sentra Utama Durian terdapat di Kecamatan Pegantenan. Wilayah Pengembangannya terdapat di Kecamatan Pakong dan Waru.

#### Potensi Pengembangan

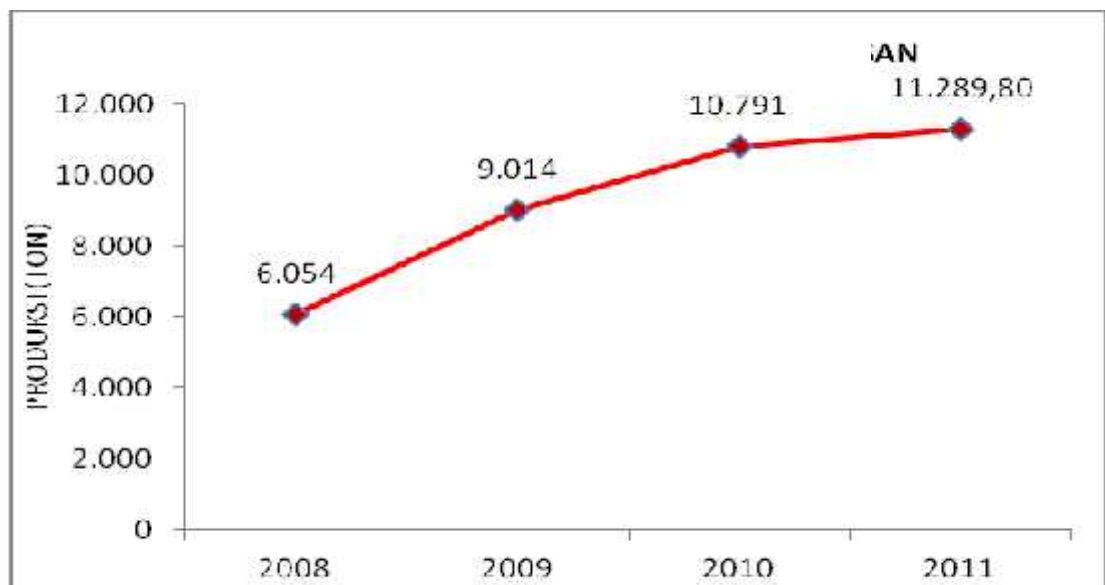
- On farm/budidaya: Peningkatan produktivitas durian.
- Industri Olahan berbasis durian; selai, fruit leather, keripik durian
- Kulit durian: Briket Arang kulit durian, Bahan baku kayu olahan yang dimampatkan.

#### e. Cabe Rawit

Perkembangan produksi Cabe Rawit Kabupaten Pamekasan selama empat tahun terakhir menunjukkan trend meningkat. dalam periode empat tahun, luas areal cabe rawit di Kabupaten Pamekasan meningkat sebesar 76,04 persen, sedangkan produksi cabe rawit mengalami peningkatan sebesar 86,48 persen.

Peningkatan produksi cabe rawit di Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan introduksi varietas unggul, perbaikan teknis budidaya dengan pendekatan GAP, pengendalian OPT melalui PHT cabe.

Grafik II.16  
Produksi Cabe Rawit Kabupaten Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Sentra utama Cabe Rawit terdapat di Kecamatan Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Waru, Larangan, Proppo, Palengaan dan Waru.

#### Potensi Pengembangan

- On farm: Peningkatan produksi cabe rawit; budidaya cabe rawit organik
- Bahan bumbu makanan, saus sambal instan
- Minyak atsiri cabe rawit (capsicol) untuk obat kesehatan sebagai pengganti minyak kayu putih.
- Bubuk cabe sebagai bahan obat penenang (kesehatan)

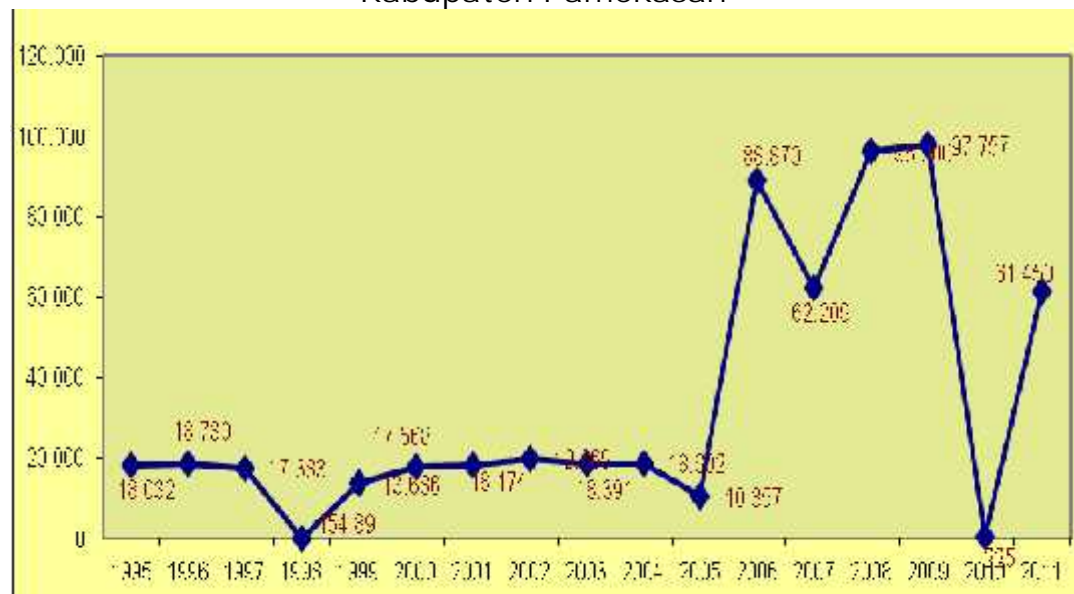
## 2. Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan selama ini diusahakan oleh rakyat. Komoditi perkebunan terpenting di Kabupaten Pamekasan yaitu Tembakau, Cabe Jamu, Kelapa dan Jambu Mente.

### a. Tembakau

Bagi industri rokok sigaret kretek, tembakau madura digunakan sebagai bahan baku utama. Tembakau madura dengan segala karakteristiknya berperan sebagai penentu aroma rokok kretek (Komposisi 14-22 %). Karena lebih dari 50% produksi tembakau nasional dipasok oleh Jawa Timur maka produksi tembakau madura berperan vital menentukan produksi tembakau nasional. Kabupaten Pamekasan merupakan sentra produksi terbesar tembakau madura.

Grafik II.17  
Perkembangan Produksi Tembakau Madura di  
Kabupaten Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Tembakau Madura dibudidayakan pada tiga tipe lahan yaitu sawah, tegal dan gunung. Tembakau Gunung terbesar terdapat di Kecamatan Pasean, Kadur, Pegantenan, Palengaan, Waru dan Pakong. Tembakau Tegal dominan di Kecamatan Tlanakan, Palengaan, Pegantenan, Waru, Kadur, Pasean dan Baturmarmar,

Tembakau sawah terluas terdapat di Kecamatan Pademawu, Galis dan Pakong.

#### Potensi Pengembangan

- On farm: bahan baku industri rokok kretek
- Pengembangan inudustri Rokok Skala Home industri
- Ekstrak daun tembakau (Solanisol) untuk obat/medis
- Minyak Atsiri Tembakau
- Limbah Tembakau (Batang & akar) untuk bahan pupuk organik
- Insektisida alami (Nikotin)
- Industri farmasi, Kosmetik (wewangian) dan Pertanian (Komponen anti jamur pada tumbuhan)

#### b. Cabe Jamu

Pada tahun 2011 produksi cabe jamu Kabupaten Pamekasan mencapai 508 ton atau meningkat 15,45 persen dibandingkan produksi tahun 2009. Sentra utama cabe jamu di Kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan Larangan, Kadur, Pasean, Batumarmar dan Palengaan. Pada tahun 2009 total produksi cabe jamu di lima wilayah tersebut mencapai 412 ton atau hampir 91,56 persen dari produksi cabe jamu di Kabupaten Pamekasan.

#### Potensi Pengembangan

Bagian tanaman yang banyak digunakan dalam industri obat tradisional adalah buah dalam bentuk simplisia (buah yang dikeringkan) dikenal nama *Retrofracti fructus*.

Cabe jamu banyak digunakan untuk bahan baku pembuatan obat tradisional, obat modern dan campuran minuman. Kandungan bahan kimia cabe jawa dapat digunakan untuk kegiatan biologi seperti untuk melawan *Bacillus substilis* H-17 dan *Bacillus substilis* M 45, penawar racun, mengurangi efek

hipertensi, bahan insektisida, antioksidan, merangsang pertumbuhan rambut. Cabe jamu berkhasiat sebagai obat masuk angin, gangguan pencernaan, penguat lambung, obat kumur dan pereda kejang perut.

c. Kelapa

Produksi kelapa Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009 sebesar 3.561 ton. Pada tahun 2011 produksi kelapa meningkat 73,24 persen menjadi 6.169 ton. Wilayah terbesar produsen kelapa di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Kadur dan Pegantenan. Pada tahun 2011, total produksi kelapa di kedua wilayah tersebut mencapai 31,1 persen dari produksi kelapa Kabupaten Pamekasan. Wilayah pengembangan kelapa yaitu Palengaan, Pasean, Waru dan Batumarmar.

Upaya peningkatan produksi kelapa dilakukan dengan cara introduksi varietas kelapa umur genjah/pendek dan kelapa kopyor, pengendalian OPT dan peremajaan pohon kelapa yang non produktif.

Potensi Pengembangan

- Produk Turunan Berbasis Daging Kelapa: Minyak Kelapa, VCO ( Virgin Coconut Oil), Tepung Kelapa (Dessicated Coconut)
- Produk Turunan Tempurung Kelapa : Activated carbon antara lain dapat digunakan untuk industri minyak dan gas, pemurnian air, pengolahan pulp, pupuk dan produk Kerajinan.
- Produk-produk turunan Sabut Kelapa : untuk bahan jok mobil mewah, springbed, dan geotextile (GT), Debu sabut dapat diproses jadi kompos dan cocopeat, dan particle board/hardboard. Cocopeat digunakan sebagai substitusi

gambut alam untuk industri bunga dan pelapis lapangan golf.

- Kayu kelapa digunakan untuk industri mebel eksotik, souvenir/benda seni, bahan bangunan rumah seperti dinding, kosen, dan tegel. Sedangkan sisa-sisa kayu dapat diproses untuk packing, arang, particle board, dan pulp

#### d. Jambu Mente

Sentra utama tanaman Jambu Mente terdapat di wilayah utara Kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan Batumarmar, Waru dan Pasean. Total Produksi Mente dari ketiga wilayah tersebut pada tahun 2011 mencapai 43,88 ton atau 91,57 persen dari produksi mente Kabupaten Pamekasan. Dilihat trend produksi, produksi di tiga kecamatan tersebut menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2009, produksi mente di Kecamatan Batumarmar, Waru dan Pasean masing-masing sebesar 16,12 dan 13 ton, maka pada tahun 2011 produksinya meningkat menjadi 17,88, 12,48 dan 13,52 ton. Wilayah lainnya yang merupakan pengembangan Jambu Mente yaitu Kecamatan Palengaan, Pegantenan, Kadur, Palengaan dan Pakong.

#### Potensi Pengembangan

- Pengolahan dan pengemasan kacang mente, kuliner berbasis mente
- Kulit biji mente digunakan sebagai pakan unggas.
- Buah: Minuman Sari buah

### 3. Potensi Perikanan dan Kelautan

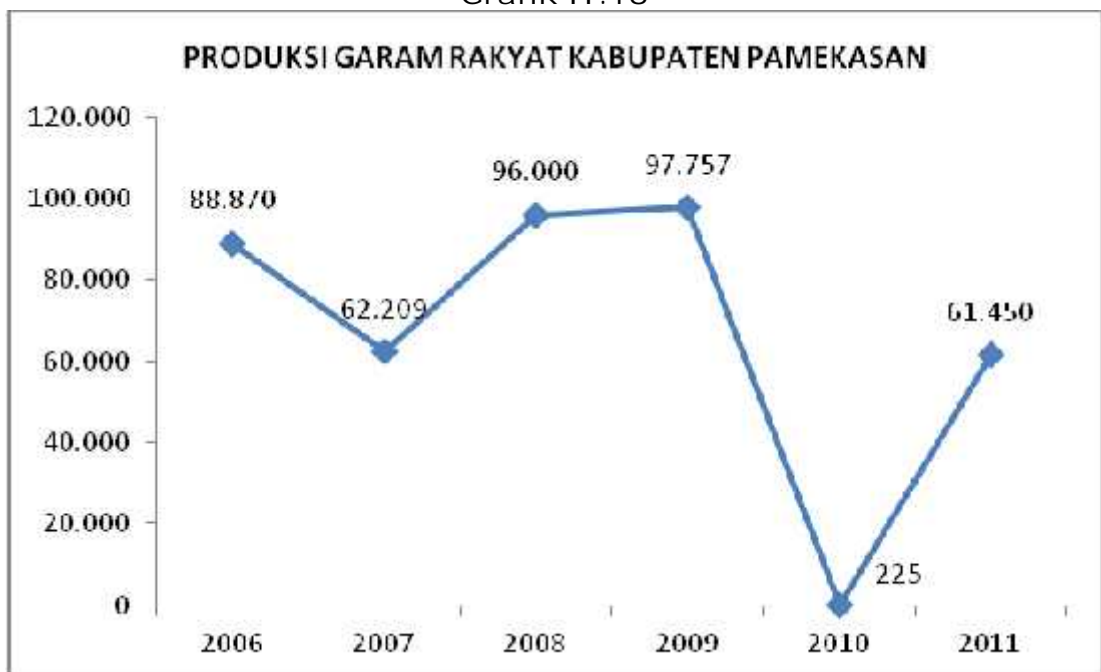
Dengan pantai sepanjang 18 km yang terletak di pesisir selatan dan utara, Kabupaten Pamekasan memiliki potensi sektor perikanan dan kelautan yang cukup besar. Komoditi perikanan dan kelautan terpenting di Kabupaten Pamekasan yaitu garam, rumput laut dan

ikan teri. Komoditi Perikanan lain yang potensial yaitu budidaya udang dan bandeng pada lahan tambak.

a. Garam

Madura dikenal sebagai daerah penghasil dan pemasok garam terbesar nasional. Kebutuhan garam nasional setiap tahun cukup besar dan hampir 70% disuplai dari Propinsi Jawa Timur. Rata-rata produksi garam di Madura tidak kurang dari 600.000 ton. Luas areal tambak garam di Kabupaten Pamekasan seluas, 888 hektar yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Galis, Pademawu dan Tlanakan. Pada musim kemarau normal, produksi garam rakyat di Kabupaten Pamekasan dapat mencapai 90 ribu ton.

Grafik II.18



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Potensi Pengembangan

- Peningkatan produktivitas dan mutu garam rakyat melalui perbaikan teknis produksi; aditif garam (adirama/ramsol, plastik HDPE, keramik



- Pengembangan Industri Pengolahan Garam Konsumsi dan garam iodium
- Pengembangan Produk Turunan /Garam industri; Magnesia, Bittern (Nigari), HCl

b. Rumput Laut

Usaha tani rumput laut merupakan mata pencaharian yang menguntungkan bagi masyarakat pesisir. Usaha budidaya rumput laut mulai dikembangkan sejak tahun 2007 dan berkembang pesat pada periode 2008-2010. Jenis rumput laut yang dikembangkan yaitu *Eucheuma cottoni* dan *E. Alavarezii*. Di kalangan industri rumput laut Pamekasan dikenal karena kualitasnya karena dalam proses pengeringannya tidak dicampur dengan garam.

Produksi rumput laut Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008 mencapai 81,5 ton. Pada tahun 2009, produksi rumput laut meningkat pesat mencapai 268 ton (+228,8%). Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2010 (+264,2%) dan 2011 (+26,1%). Secara umum dalam kurun waktu empat tahun produksi rumput laut di Kabupaten Pamekasan telah meningkat 141 persen.

Grafik II.19



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Sentra utama budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Pademawu dan Tlanakan. Usaha yang dikembangkan mencakup usaha budidaya dan olahan rumput laut.

#### Potensi Pengembangan

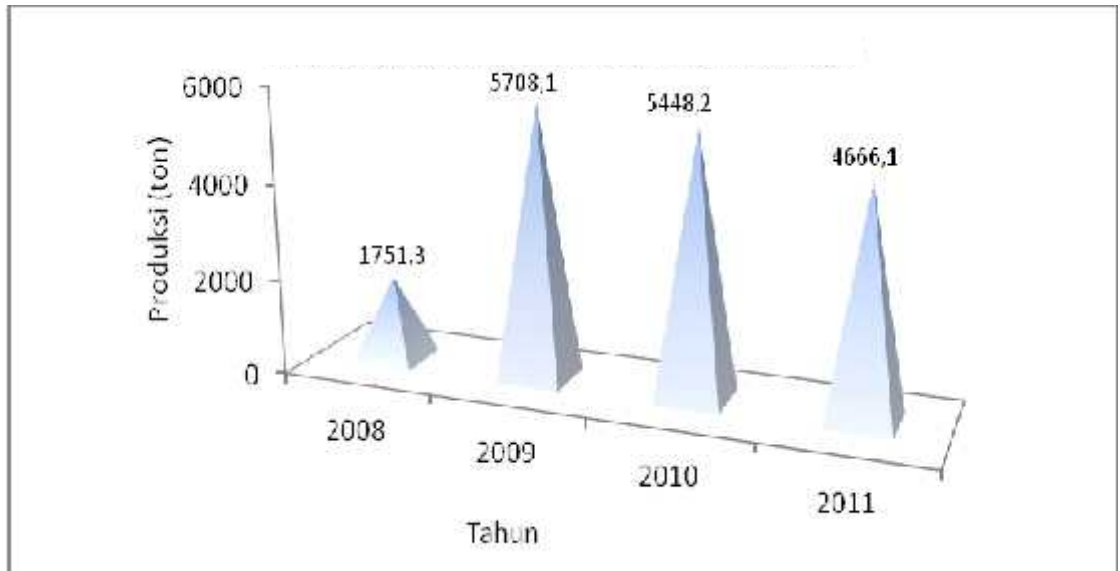
- Peningkatan produktivitas rumput laut
- Industri kuliner berbasis rumput laut; dodol, selai, jelly, minuman rumput laut, nata de seaweed, mie rumput laut.
- Rumput laut dapat digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium dan hormon seperti auxin dan sytokinin. sifat hydrocolloids bermanfaat untuk penyerapan air dan sebagai substrat untuk mikroorganisme tanah.
- Bahan Industri farmasi seperti sebagai anti bakteri, anti tumor, anti kanker atau sebagai reversal agent dan
- Bahan Industri agrokimia terutama untuk antifeedant, fungisida dan herbisida

#### c. Teri

Produksi Ikan Teri di Kabupaten Pamekasan pertahun berkisar 4.500-5.500 ton. Sentra utama usaha penangkapan ikan teri terdapat di pesisir selatan meliputi Kecamatan Pademawu, Talankan, Galis dan Larangan. Belakangan ini wilayah pengembangannya meluas ke pesisir utara yaitu Kecamatan Pasean dan Batumarmar. Hal yang menggembirakan banyaknya perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan pengolahan teri di Kabupaten Pamekasan. Hasil tangkapan teri dari nelayan sebagian besar langsung diserap perusahaan-perusahaan pengolahan ikan teri. Beberapa perusahaan pengolahan teri yang beroperasi di Kabupaten Pamekasan yaitu; CV. Mahera, UD. Dharma Laut dan PT. MPI. Hasil produk olahan teri dari

perusahaan-perusahaan tersebut umumnya untuk diekspor ke Jepang.

Grafik II.20  
Perkembangan Produksi Teri di Kabupaten Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

#### Potensi Pengembangan

- Peningkatan produktivitas hasil tangkapan teri
- Industri Pengolahan Ikan Teri: saus ikan teri, makanan berbasis teri

#### 4. Potensi Peternakan

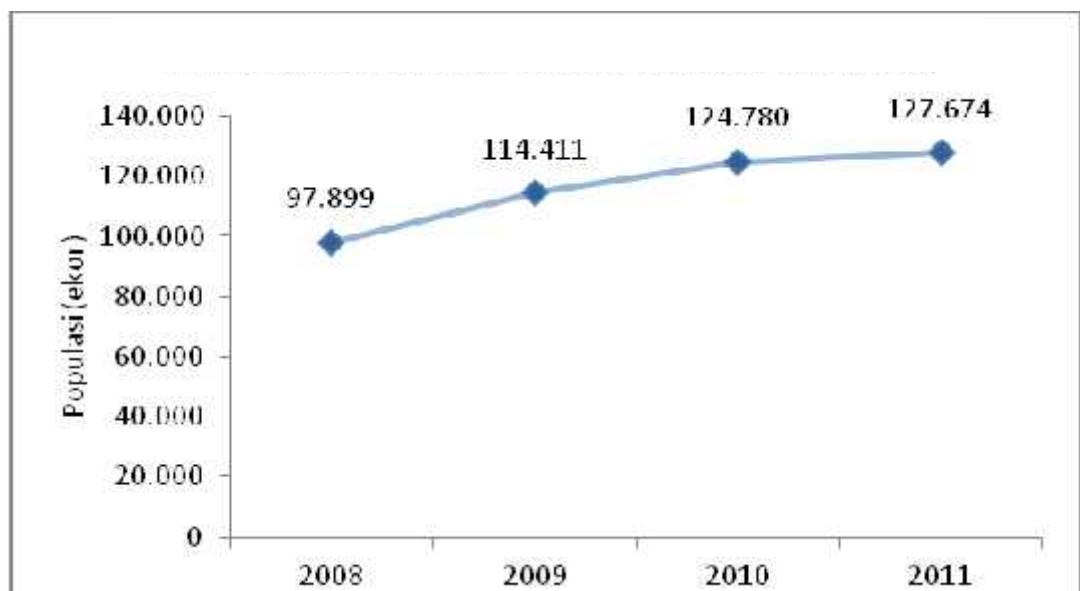
Sektor peternakan memiliki potensi yang luas untuk dikembangkan. Komoditi peternakan terpenting di Kabupaten Pamekasan yaitu Sapi, Ayam Buras/Kampung dan Ayam Petelur.

##### a. Sapi Madura

Perkembangan sapi madura di Kabupaten Pamekasan dalam empat tahun terakhir menunjukkan trend positif. dalam rentang waktu empat tahun populasi sapi madura telah meningkat hampir 30,41%. Pada tahun 2011 populasi sapi madura mencapai 127.674 ekor.

Peningkatan populasi sapi tersebut menunjukkan dua indikator yaitu; pertama, peningkatan kebutuhan masyarakat akan daging sapi dan hal ini merupakan prospek pasar yang bagus bagi kalangan peternak, kedua, merupakan indikator perbaikan derajat kesehatan hewan khususnya sapi madura. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan saat ini sangat gencar menggalakkan program INTAN SATU SAKA (Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran) dalam upaya mendorong pertumbuhan sapi di Kabupaten Pamekasan.

Grafik II.21  
Perkembangan Populasi Sapi Potong Kabupaten Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Sentra sapi madura terdapat yaitu Kecamatan Larangan, Waru, Pasean, Proppo dan Batumarmar.

#### Potensi Pengembangan

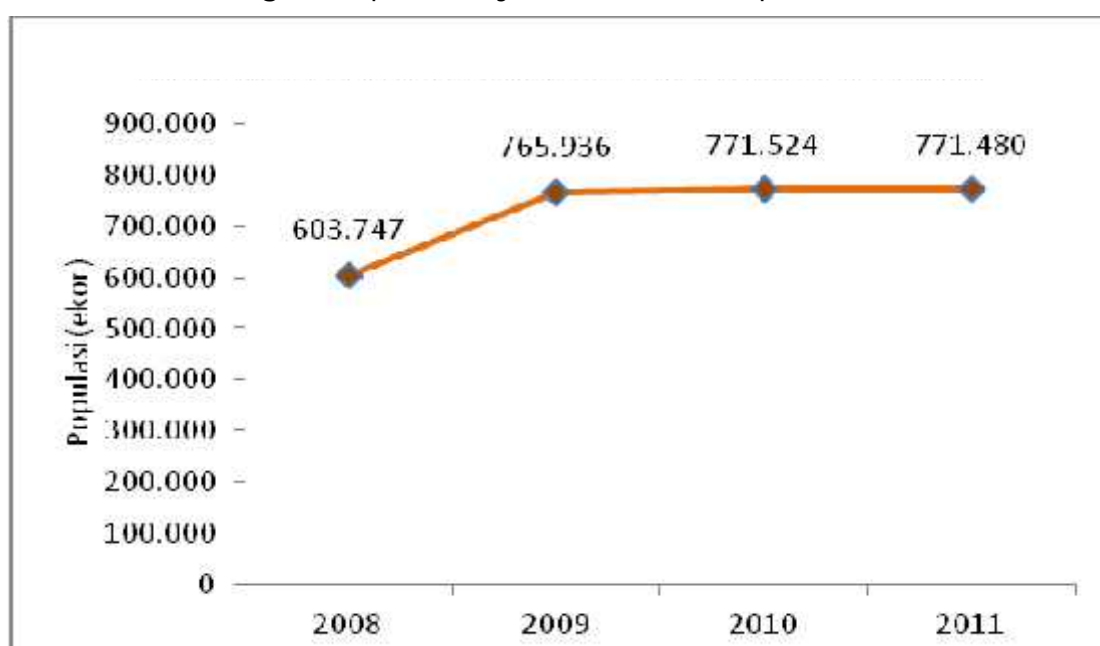
- Usaha Penggemukan Sapi (fattening)
- Sapi balap dan seni: Sapi Kerapan (bull race), Sapi sonok (Sapi model)
- Differensiasi produk berbasis daging sapi; abon, kerupuk paru dll
- Usaha Penyamakan kulit sapi, dan produk berbasis kulit sapi.

b. Ayam Buras/Kampung

Populasi ayam buras di Kabupaten Pamekasan selama tiga tahun terakhir rata-rata 750 ribu ekor. Sentra utama ayam buras adalah Kecamatan Galis, Pamekasan, Larangan, Pademawu dan Tlanakan. Pada tahun 2011 populasi ayam buras dari lima wilayah utama tersebut mencapai 395.622 ekor atau 51,28 persen dari populasi ayam buras Kabupaten Pamekasan.

Grafik II.22

Perkembangan Populasi Ayam Buras Kabupaten Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Potensi Pengembangan

Pemanfaatan produk berbasis ayam selama ini dominan kepada pemanfaatan daging dan telur untuk industri pangan. Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan limbah tubuh ayam seperti bulu, kulit telur dan kotoran ayam.

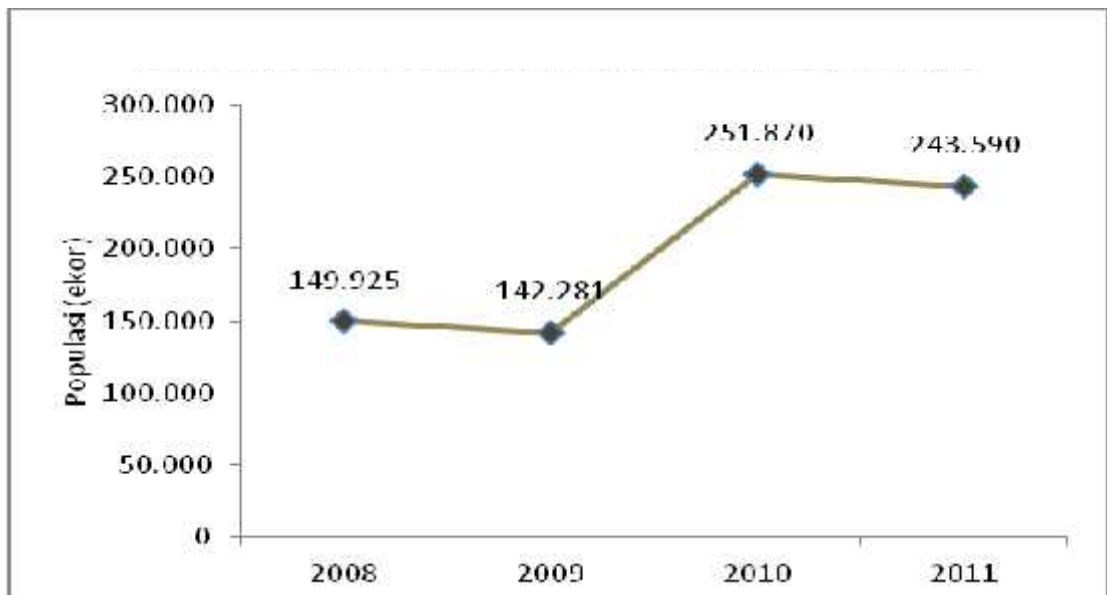
- Bulu ayam; industri kerajinan, bahan pakan ternak
- Kulit Telur diolah tepung; pestisida pertanian ( menekan OPT tanaman; penyakit akar gada dll)
- Kotoran: Pupuk organik baik POG (Pupuk Organik Granul) maupun POC (Pupuk organik cair)

c. Ayam Petelur/Layer

Populasi ayam ras petelur di Kabupaten Pamekasan mencapai 250 ribu ekor (2010). Sentra utama populasi ayam ras petelur adalah Kecamatan Pakong, Larangan, Tlanakan, Pasean dan Pamekasan. Pada tahun 2011 populasi ayam petelur di lima wilayah utama tersebut mencapai 86,66 persen dari total populasi ayam ras petelur di Kabupaten Pamekasan.

Perbaikan produktivitas telur dilakukan melalui vaksinasi, sanitasi kandang, introduksi bibit DOC unggul dan pemberian pakan berkualitas.

Grafik II.23  
Perkembangan Populasi Ayam Petelur Kabupaten Pamekasan



Sumber: Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Pamekasan

Potensi Pengembangan

- Pemanfaatan telur dalam berbagai produk kuliner.
- Kulit telur: Aksesoris seni dan barang kerajinan
- Kulit Telur diolah tepung; pestisida pertanian (menekan OPT tanaman; penyakit akar gada dll), pupuk organik.
- Kotoran: Pupuk organik baik POG (Pupuk Organik Granul) maupun POC (Pupuk organik cair)

## 5. Potensi Industri Keratif

Industri Kreatif memiliki potensi yang luas untuk dikembangkan. Selain dapat mengembangkan nilai budaya, sektor ini memiliki nilai tambah tinggi dan faktor keunikan/lokalitas yang menambah nilai jual produknya. Komoditi industri kreatif terpenting di Kabupaten Pamekasan adalah Batik Tulis Madura.

Usaha batik tulis madura merupakan salah satu identitas budaya madura. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan dukungan penuh dengan mencanangkan Pamekasan sebagai Kabupaten Batik pada tanggal 24 juli 2009. Upaya tersebut tidak sebatas slogan tetapi diwujudkan dalam berbagai aksi nyata seperti penggunaan seragam batik bagi siswa dan PNS serta menghiasi berbagai bangunan/prasarana dengan motif batik Madura.

Usaha batik tulis madura berkembang di 11 kecamatan. Sentra terbesar batik madura terdapat di Kecamatan Proppo, Pemekasan dan Palengaan. Dilihat dari perkembangan unit usaha produksi batik tulis, sepanjang tahun 2011 di Kabupaten Pamekasan terdapat 1.160 unit usaha. Usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.522 orang.

### Potensi Pengembangan

- Pengembangan outlet/toko batik tulis madura di berbagai wilayah
- Differensiasi produk berbasis batik tulis madura; handycraft, tas, dll.

## 2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil

merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas

Masalah kesejahteraan serta pertumbuhan penduduk acapkali menimbulkan berbagai dampak di masyarakat tidak terkecuali masalah kriminalitas. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010 hingga 2011 setidaknya ada 31 jenis tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan yang sering kali terjadi bahkan eskalasinya meningkat antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penggelapan dan penipuan.

Pada tahun 2010 jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor ada 29 kasus dan tertangani 3 kasus, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 96 kasus dan hanya 7 kasus saja yang berhasil ditangani. Tindak kejahatan penggelapan pada tahun 2010 ada sebanyak 37 kasus dan berhasil ditangani 34 kasus. Pada tahun 2011 tindak kejahatan penggelapan ini mengalami peningkatan menjadi 79 kasus dan berhasil ditangani sebanyak 56 kasus. Sementara itu pencurian dengan pemberatan ada 40 kasus pada tahun 2010 dengan berhasil ditangani sebanyak 31 kasus, namun pada tahun 2011 meningkat menjadi 60 kasus dan tertangani sebanyak 25 kasus.

Naiknya eskalasi beberapa tindak kejahatan di Kabupaten Pamekasan perlu mendapatkan perhatian khusus terutama dicari pada sumber-sumber yang menjadi faktor pendorong suatu kejahatan tersebut bisa terjadi. Karena bukan hal yang mustahil angka kejahatan akan terus meningkat jika tidak segera dicari akar penyebab serta solusi pemecahannya mengingat semua kasus yang ada tidak dapat terselesaikan maka upaya pencegahan akan lebih baik dan sangat membantu.



Tabel II.37  
Banyaknya Tindakan Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan 2010-2011

Jenis Kejahatan	Dilaporkan		Diselesaikan	
	2010	2011	2010	2011
1. Pengeroyokan	3	44	4	41
2. Penghinaan	7	1	6	1
3. Kebakaran	5	10	5	10
4. Surat palsu	7	2	5	2
5. Uang palsu	1	1	3	1
6. Perampasan	2	1	1	-
7. Pemerkosaan	2	9	3	7
8. Kesopanan/kesusilaan	5	-	3	-
9. Perjudian	33	30	42	30
10. Pembunuhan	6	2	5	2
11. Penganiayaan berat	19	2	25	2
12. Penganiayaan ringan	3/24	4	3/17	4
13. Pencurian dengan kekerasan	10	17	5	6
14. Pencurian dengan pemberatan	40	60	31	25
15. Pencurian ringan	42	-	24	-
16. Pencurian kendaraan bermotor	29	96	3	7
17. Pencurian kawat telpon dan listrik	4	8	1	1
18. Pencurian hewan ternak	5	3	-	1
19. Pemerasan	11	8	10	8
20. Penggelapan	37	79	34	56
21. Penipuan	40	56	27	35
22. Penadahan	2	1	4	2
23. Merusak	6	9	6	10
24. Narkotik	9	-	11	-
25. Aborsi	2	2	2	2
26. Handak/petasan	5	2	6	2
27. Sengketa tanah	5	2	-	2
28. Perjinahan	2	-	2	-
29. Kejahatan senjata tajam	14	13	22	15
30. Kejahatan dalam rumah tangga	33	30	28	30
31. Lain-lain	-	207	-	-

Sumber: Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2012

#### 2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang

produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Tabel II.38  
Rasio Ketergantungan Tahun 2011-2012 Kabupaten Pamekasan

No	Uraian	2011	2012
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	210.087	208.900
2.	Jumlah penduduk usia > 60 tahun	66.285	68.502
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	276.372	277.402
4.	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun	531.456	541.260
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)%	52,00	51,25

Sumber : Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2013

Pada kurun waktu dua tahun terakhir, rasio ketergantungan di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Pada tahun 2011 rasio ketergantungan sebesar 52,00 dan pada tahun 2012 rasio ketergantungan menurun menjadi 51,25. Hal ini berarti bahwa semakin rendah beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk

membiaya penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan adanya penurunan rasio ketergantungan ini maka bisa menunjukkan adanya peningkatan ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase dependency ratio maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

### **BAB III**

## **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Ketika kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan menemui berbagai kendala atau hambatan, maka yang muncul bukan hanya problema atau permasalahan pembangunan, tetapi juga kemungkinan berbagai program dan dana yang digulirkan menjadi kurang efektif, bahkan bukan tidak mungkin beresiko gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk menghindari dan mencegah agar program pembangunan yang dikembangkan di Kabupaten Pamekasan ke depan tidak salah arah, oleh sebab itu hal penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana merumuskan kebijakan dan program pembangunan jangka panjang yang benar-benar efektif, yang didukung oleh identifikasi dan analisis isu-isu strategis apa saja yang sebetulnya menjadi permasalahan dan tantangan utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan 20 tahun ke depan.

Perencanaan program pembangunan yang baik, secara teoritis tidak mungkin dapat diwujudkan jika tidak berbasis pada isu-isu prioritas yang sifatnya kontekstual. Sementara itu, sebaik apa pun program pembangunan dirumuskan, tetapi jika tidak didukung komitmen politis yang konsisten dan kerjasama dari seluruh stakeholder, maka bukan tidak mungkin hasilnya akan jauh dari yang diharapkan. Kerja keras dan kerja profesional adalah prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui program-program pembangunan yang terencana dan kontekstual.

Sebagai salah satu kabupaten yang tengah berbenah, dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang kini makin berpeluang maju sejak pembangunan Jembatan Suramadu terealisasi, apa yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah peluang sekaligus tantangan. Dikatakan peluang, sebab sejak adanya Jembatan Suramadu, maka intensitas dan probabilitas terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik niscaya menjadi lebih terbuka karena mobilitas sosial dan aktivitas perekonomian menjadi lebih dinamis. Sedangkan dikatakan sebagai tantangan, karena dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu bukan tidak mungkin yang terjadi adalah tersedotnya aliran dana dari Pamekasan ke Kota Surabaya dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur karena perubahan pola rekreasi

masyarakat yang lebih terbuka, atau terjadinya proses infiltrasi, invasi dan bahkan suksesi kepemilikan aset produksi lokal karena kehadiran arus investasi yang tidak ramah masyarakat lokal. Bagi daerah yang sebelumnya relatif terisolasi, dan kemudian menjadi lebih terbuka ketika jembatan Suramadu dibangun, apa yang tengah dihadapi Pamekasan pada dasarnya sebuah langkah perubahan yang dahsyat, namun sekaligus dilematis: di satu sisi menawarkan peluang baru yang prospektif, tetapi di sisi lain juga mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat lokal karena terjadinya peningkatan akselerasi dan penetrasi arus modal dan pendatang baru yang ekspansif.

Bab ini, secara rinci mencoba memetakan dan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Pamekasan dua puluh tahun ke depan. Isu-isu strategis yang dirumuskan diperoleh dari hasil pemetaan dan analisis data sekunder, hasil SWOT, masukan dari bawah (bottom up planning), serta hasil FGD (Focussed Group Discussion) yang melibatkan sejumlah pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur birokrasi di Kabupaten Pamekasan.

### 3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Tujuan dari identifikasi dan perumusan permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Permasalahan yang dihadapi daerah, tak terkecuali Kabupaten Pamekasan biasanya timbul ketika kekuatan atau potensi yang dimiliki daerah belum didayagunakan secara optimal, sehingga besaran dari permasalahan yang harus dihadapi menjadi lebih membebani.

Sebagai daerah yang sedang dalam proses transisi, harus diakui selama ini masih ada banyak masalah yang dihadapi Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar sejahtera, mandiri, yang didukung layanan aparatur birokrasi yang profesional dan akuntabel. Dari hasil SWOT yang telah dilakukan, untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan (2005-2025), kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan bisa disimak pada matrik berikut ini:

KONDISI INTERNAL	
Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kondisi sosial masyarakat Pamekasan yang religius dan ber etos kerja tinggi</li> <li>– Kedudukan Pamekasan dalam Struktur Perkotaan Nasional Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang Akan Melayani Perkotaan Sampang dan Sumenep (potensi sebagai pusat kegiatan Pemerintahan, Perdagangan, Jasa, Pendidikan di Wilayah Madura)</li> <li>– Trend kenaikan pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat</li> <li>– Potensi UMKM dan produk unggulan yang ada di berbagai desa di Kabupaten Pamekasan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan</li> <li>– Potensi dukungan lembaga sosial-keagamaan yang kuat di tingkat grassroot, khususnya keberadaan Pondok Pesantren.</li> <li>– Potensi kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya di bidang perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan (Agropolitan dan Minapolitan)</li> <li>– Potensi Wisata baik wisata alam, wisata buatan, wisata religi, maupun wisata budaya.</li> <li>– Kinerja dan akuntabilitas aparatur birokrasi pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas SDM dan IPM yang masih rendah.</li> <li>– Kualitas tenaga kerja masih rendah.</li> <li>– Arus investasi masih rendah.</li> <li>– Disparitas antar wilayah belum merata.</li> <li>– Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai.</li> <li>– Akses masyarakat ke sumber-sumber produksi dan permodalan masih terbatas.</li> <li>– Kapasitas fiskal daerah masih rendah.</li> </ul>

KONDISI EKSTERNAL	Peluang (Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai potensi daerah.</li> <li>- Peluang kerjasama daerah (antar daerah dan pihak ke tiga) semakin besar.</li> <li>- Minat dan peluang investasi semakin terbuka pasca pembangunan Jembatan Suramadu.</li> <li>- Potensi peluang pasar produk daerah cukup tinggi pada tingkat lokal, regional, nasional maupun ekspor.</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang relatif membaik.</li> <li>- Penetapan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus.</li> <li>- Dukungan kebijakan dan program dari pusat dan provinsi.</li> <li>- Kecenderungan terjadinya krisis pangan dan energi dunia.</li> </ul>	<p>yang meningkat di bidang pelayanan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kohesi sosial dan kerjasama yang harmonis antara ulama dan umaro</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan potensi agropolitan dan minapolitan.</li> <li>- Deregulasi peraturan perijinan usaha dan investasi.</li> <li>- Mengembangkan potensi UMKM yang makin maju dan mandiri.</li> <li>- Peningkatan kualitas pelaku usaha mikro serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, bahkan internasional.</li> <li>- Eksplorasi kekayaan sumber daya alam berbasis kepentingan rakyat</li> <li>- Peningkatan akses ke sumber-sumber dana pembangunan alternatif dan peningkatan peran peran CSR bagi pemberdayaan masyarakat lokal.</li> <li>- Transparansi dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan secara bottom-up dan berbasis nilai agama.</li> <li>- Pengembangan keserasian sosial masyarakat melalui mekanisme deteksi dini yang efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan</li> <li>- Pengembangan potensi sumber daya manusia, dan produk lokal.</li> <li>- Pengembangan industrialisasi dan investasi yang ramah tenaga kerja lokal.</li> <li>- Pencarian sumber dana alternatif untuk pembangunan daerah.</li> <li>- Promosi produk unggulan Kabupaten Pamekasan</li> <li>- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar.</li> <li>- Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menarik minat investor</li> </ul>

	Ancaman (Threats)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industrialisasi dan arus investasi yang tidak ramah profil tenaga kerja lokal.</li> <li>- Iklim persaingan usaha yang semakin kompetitif seiring penerapan pasar bebas.</li> <li>- Potensi pelarian dana masyarakat pasca pembangunan Jembatan Suramadu.</li> <li>- Sistem regulasi perundangan yang belum baik.</li> <li>- Arus informasi dan transformasi budaya yang semakin pesat.</li> <li>- Kinerja pembangunan kabupaten lain di Pulau Madura yang sama-sama berkembang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan pola pengelolaan SDA yang berkelanjutan dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Pamekasan secara keseluruhan.</li> <li>- Pengembangan industrialisasi yang ramah tenaga kerja lokal.</li> <li>- Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta permukiman.</li> <li>- Pengembangan potensi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.</li> <li>- Pengembangan produk UMKM yang berorientasi ekspor</li> <li>- Pengembangan pusat perbelanjaan lokal yang representatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada pengembangan keahlian dan keterampilan yang kontekstual.</li> <li>-Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kinerja aparatur birokrasi yang profesional.</li> <li>-Pengembangan aktivitas perekonomian dan pusat perbelanjaan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat lokal.</li> <li>-Perbaikan fasilitas publik dan peningkatan aktivitas pembangunan di wilayah kepulauan</li> <li>-Promosi dan perbaikan margin keuntungan bagi pelaku UMKM di wilayah kepulauan</li> </ul>
--	-------------------	--	--	--

Selama 20 tahun ke depan, harus diakui di Kabupaten Pamekasan ada berbagai permasalahan pembangunan yang membutuhkan penanganan dan program yang benar-benar efektif dan efisien. Meski dalam satu dekade terakhir telah banyak dilakukan berbagai upaya dan tidak sedikit dana telah dikucurkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, namun untuk mengejar ketertinggalan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Kondisi SDM masyarakat yang masih memprihatinkan, angka kemiskinan yang cukup tinggi, kondisi infrastruktur yang belum merata, dan dukungan dana pembangunan daerah yang kurang, sedikit-banyak menjadi ancaman serius yang menyebabkan proses pembangunan di Kabupaten



Pamekasan belum dapat berjalan maksimal. Secara garis besar, dari hasil analisis SWOT dan identifikasi yang dilakukan, disepakati beberapa permasalahan prioritas daerah yang perlu dihadapi dan ditangani Pemerintah Kabupaten Pamekasan 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanganan kemiskinan dan pengentasan masyarakat miskin seringkali masih terjebak pada program-program pembangunan yang populis, tidak kontekstual, dan seringkali merupakan program pembangunan yang sifatnya amal-karitatif, sehingga belum mampu menimbulkan daya ungkit yang signifikan. Fakta di lapangan telah banyak membuktikan, bahwa akibat tekanan kemiskinan, kerentanan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan keluarga miskin, dalam kenyataan sering menyebabkan masyarakat miskin mengalami proses marginalisasi dan pendalaman kemiskinan. Proses marginalisasi terjadi karena ketidakberdayaan dan keterisolasian masyarakat miskin. Sedangkan pendalaman kemiskinan terjadi ketika masyarakat miskin tidak kuat menghadapi tekanan kebutuhan hidup yang makin menjejaskan akibat kerentanan dan kondisi kemiskinan yang dialami.
2. Kondisi fasilitas atau infrastruktur pendidikan dan kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Pamekasan umumnya masih belum berkembang merata, utamanya di wilayah pedesaan terpencil masih terjadi kesenjangan yang cukup lebar, dan dalam banyak kasus akses dan juga kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan umumnya masih rendah. Pendidikan yang seharusnya menjadi semacam eskalator untuk mendorong mobilitas sosial vertikal masyarakat, seringkali justru dinilai sebagai beban masyarakat (miskin). Tidak sedikit anak-anak yang dihadapkan pada pilihan dilematis antara bekerja atau sekolah.
3. Kondisi infrastruktur, jalan, irigasi, ekonomi, listrik, air bersih di berbagai wilayah seringkali masih belum memadai, sehingga menghambat masuknya investasi (daya saing investasi rendah). Di tengah iklim persaingan antar-daerah yang makin ketat, terutama bila dibandingkan dengan wilayah daratan di kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, maka tanpa didukung dengan upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur daerah yang layak, peluang Pamekasan untuk bersaing menarik investasi relatif kurang maksimal, bahkan bukan tidak mungkin akan tertinggal.

4. Layanan kesehatan yang berkembang di masyarakat umumnya masih kurang merata, dan belum didukung kualitas infrastruktur layanan kesehatan yang layak. Akses masyarakat (miskin) terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang – meski sebagian besar telah ditangani melalui program Jamkesmas/Jamkesda. Kebijakan subsidi kesehatan dalam banyak hal hanya membantu mengganti biaya berobat, tetapi tidak mengganti upah/penghasilan si miskin yang hilang selama mereka sakit. Fasilitas layanan kesehatan yang tersedia, dalam banyak juga masih belum merata dan belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kendati potensi sektor pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan serta potensi di sektor UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan cukup tinggi, namun potensi yang ada tersebut belum tergarap maksimal, dan nasib petani/nelayan serta pelaku UMKM umumnya belum diperlakukan adil di mana hal itu dibuktikan dari adanya pembagian margin keuntungan yang lebih banyak dinikmati pedagang perantara/tengkulak daripada petani/nelayan dan pelaku UMKM sebagai produsen. Dalam banyak kasus, yang namanya pelaku UMKM seringkali mengalami proses pengikisan modal usaha, dan tidak sedikit petani/nelayan yang mengalami proses marginalisasi karena posisi tawar (*bargaining position*) mereka yang rendah.
6. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengawasan program pembangunan secara umum masih belum berkembang optimal. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program yang *bottom-up planning*, seringkali masih belum berkembang akibat keterbatasan pendidikan dan kurangnya akses masyarakat terhadap saluran untuk menyalurkan aspirasi sosial-politiknya.
7. Semangat kewirausahaan dan kemandirian masyarakat dalam pengembangan usaha umumnya belum berkembang optimal. Sikap sebagian besar masyarakat, dalam banyak kasus masih cenderung fatalis dan mendahulukan prinsip *safety first* (dahulukan selamat), sehingga masyarakat cenderung masih enggan untuk mengambil resiko, dan kurang memiliki keberanian serta kemandirian untuk mengembangkan usaha yang dapat diandalkan untuk menopang kelangsungan kehidupan keluarganya.

8. Dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatnya aktivitas perekonomian rakyat di Kabupaten Pamekasan, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf kesejahteraan dan kondisi IPM penduduk secara signifikan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pamekasan umumnya masih berpendidikan rendah, belum memiliki kemampuan atau daya beli yang layak, dan tidak pula didukung oleh kondisi kesehatan keluarga yang benar-benar memadai, sehingga secara umum kondisi IPM masyarakat Kabupaten Pamekasan masih membutuhkan berbagai pembenahan.
9. Jumlah pengangguran relatif masih tinggi, terutama karena belum didukung ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik angkatan atau pencari kerja yang ada. Dalam banyak kasus, arus investasi di kabupaten Pamekasan masih tergolong rendah, sementara di saat yang sama masyarakat tidak memiliki modal dan aset produksi yang cukup untuk mengembangkan usaha yang sifatnya mandiri. Industrialisasi yang berkembang, dalam beberapa kasus kurang ramah tenaga kerja lokal, sehingga yang terjadi kemudian mismatch dengan karakteristik tenaga kerja yang tersedia.
10. Perkembangan UMKM seringkali masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan akses pada sumber-sumber permodalan maupun pasar. Iklim persaingan yang makin ketat, ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya produksi seringkali menyebabkan terjadinya proses pengikisan modal yang dimiliki pelaku UMKM. Di sisi lain, posisi tawar para pelaku UMKM umumnya juga masih rendah, sehingga mereka mau tidak mau harus menerima margin keuntungan yang makin tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan.
11. Pasca pembangunan Jembatan Suramadu dan penetrasi teknologi informasi, termasuk televisi dan internet, dalam beberapa kasus tentu akan melahirkan pergeseran gaya hidup dan aspirasi sosial-ekonomi masyarakat yang cenderung lebih konsumtif, yang ujung-ujungnya akan dapat menyebabkan terjadinya pengurasan sumber-sumber dana masyarakat ke luar daerah. Generasi muda yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan di masa depan, bukan tidak mungkin justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rawan menghadapi godaan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang makin konsumtif dan permisif.

Berbagai permasalahan pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan di atas tentu akan dapat ditangani dan diantisipasi jika sejak awal dikembangkan proses perencanaan program yang benar-benar terarah dan komprehensif. Sebagai daerah yang sedang dalam tahap membangun, disadari bukan hal yang mudah bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk dapat menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang tengah dan/atau akan dihadapi dalam rentang waktu 20 tahun ke depan. Namun demikian, dengan memerinci satu per satu permasalahan dan faktor-faktor penentu keberhasilan program yang dimiliki pada masing-masing bidang urusan pembangunan, niscaya hasilnya akan lebih baik. Berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel berbagai permasalahan yang dihadapi daerah kabupaten Pamekasan dalam 20 tahun ke depan:

Tabel III.1  
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan

No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1.	Kemiskinan	Pelaksanaan program penanganan kemiskinan seringkali masih belum efektif dan optimal, bukan saja karena kebijakan yang sifatnya populis, tetapi juga karena kebijakan yang dikembangkan belum benar-benar kontekstual dan secara substansial belum menyentuh akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya. Akibat tekanan kemiskinan, kerentanan, keterisolasian, dan ketidakberdayaan keluarga miskin, dalam kenyataan sering terjadi mereka mengalami proses marginalisasi dan pendalaman kemiskinan.		
1.1	Keluarga pra-Sejahtera dan KS I	Masih memprihatinkan.	Jumlah keluarga Pra-Sejahtera dan KS I meski menurun, tetapi secara absolut masih besar, yaitu dari jumlah 225.794 KK yang ada, sebanyak 91.527 masih termasuk keluarga pra sejahtera, dan sebanyak 57.925 keluarga sejahtera I	Program penanggulangan kemiskinan yang mendukung pengembangan diversifikasi usaha, berbasis aset produksi, bersifat kontekstual dan berorientasi pada pemberdayaan, serta didukung pengawasan secara bottop-up.

No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
2.	Pendidikan	Pendidikan masih belum secara konsisten berfungsi sebagai eskalator yang menjamin mobilitas vertikal warga masyarakat. Secara umum, kondisi dan kualitas pendidikan masyarakat umumnya masih membutuhkan banyak pembenahan, bukan saja dari segi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang belum merata, tetapi juga akses dan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan yang masih rendah. Kelangsungan pendidikan anak seringkali masih terkendala kewajiban anak untuk mencari nafkah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan orang tuanya.		
2.1.	Angka melek huruf >10 tahun	Masih memprihatinkan	Angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas cenderung menurun.	Program kejar Paket A, B dan C perlu dioptimalkan.
2.2.	Angka rata-rata lama sekolah	Masih memprihatinkan, karena fungsi dan nilai ekonomis anak masih tinggi sebagai penyangga ekonomi keluarga	Angka rata-rata lama sekolah terus membaik dari 4,73 (2006) menjadi 5,25 (2008), namun masih sangat rendah karena hanya setingkat SD –bukan setingkat pendidikan dasar.	Didukung program beasiswa yang memadai.
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD	Cukup tinggi, namun siswa tetap rawan putus sekolah	APK SD/MI dan SMA/SMK/MA masih fluktuatif. APK SD di tahun 2009 sebesar 111, tetapi tahun 2010 turun menjadi 104. APK SMA di tahun 2009 sebesar 80, tahun 2010 turun menjadi 75, dan tahun 2011 naik kembali menjadi 84	Perlu penanganan khusus kasus rawan DO dan buruh anak.
2.4.	Rasio ketersediaan sekolah:penduduk usia sekolah	Tidak seimbang antara jenjang SD, SMP dan SMA	Rasio ketersediaan untuk jenjang SD sudah cukup memadai, tetapi untuk jenjang SMP dan SMA masih kurang	Perlu diatur penyebaran dan kesamaan kualitas sekolah di berbagai wilayah.
2.5.	Rasio guru:murid	Kurang memadai	Rasio guru:murid untuk jenjang SD/MI/SMP/MTs sudah cukup memadai, namun untuk jenjang SMP dan SMA/MA masih kurang	Rasio guru:murid perlu diarahkan ke jumlah siswa yang lebih kecil di setiap kelasnya.
3.	Kesehatan	Akses masyarakat (miskin) terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang meski sebagian besar telah ditangani melalui program Jamkesmas/Jamkesda. Kebijakan subsidi kesehatan dalam banyak hal hanya membantu mengganti biaya berobat, tetapi tidak mengganti upah/penghasilan si miskin yang hilang selama mereka sakit. Fasilitas layanan kesehatan yang ada, dalam banyak juga masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.		

No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
3.1.	Angka Usia Harapan Hidup	Sudah memadai	Angka harapan hidup penduduk terus membaik, tetapi belum diimbangi dengan persiapan menyongsong masa lansia	Perlu didukung program revitalisasi lansia.
3.2.	Ketersediaan Posyandu	Sudah memadai, tetapi perlu direvitalisasi	Jumlah ketersediaan Posyandu per satuan balita cenderung stagnan. Antara tahun 2010 hingga 2012 hanya terjadi penambahan 1 Posyandu dari 838 menjadi 839	Perlu didukung peran lembaga sosial-keagamaan dan kelompok sekunder di masyarakat lokal
3.3.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Belum memadai	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan penduduk relatif tidak banyak berkembang. Jumlah Puskesmas yang telah menerapkan ISO 9001:2000 hanya 4 sejak tahun 2010 hingga 2012	Perlu didukung peningkatan kualitas tenaga medis
3.4.	Rasio RS per satuan penduduk	Belum memadai	Jumlah RS stagnan hanya 1 RS Umum dan 1 RS Swasta	Perlu dibangun RS yang terjangkau masyarakat
3.5.	Rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk	Belum memadai dan merata	Ketersediaan dokter dan tenaga medis relatif stagnan. Bahkan, untuk tenaga keperawatan justru menurun dari 155 (2010) menjadi 139 (2012)	Perlu penambahan dan persebaran tenaga medis yang lebih merata
3.6.	Cakupan Puskesmas	Belum memadai	Cakupan layanan Puskesmas masih membutuhkan banyak perbaikan.	Perlu didukung program intensifikasi layanan Puskesmas
3.7.	Cakupan Puskesmas Pembantu	Cukup memadai, tetapi kualitasnya terbatas	Cakupan layanan Pembantu Puskesmas meski lebih baik dari Puskesmas, namun relatif stagnan	Perlu didukung program intensifikasi layanan Puskesmas pembantu
4.	Pertanian, peternakan dan Perikanan	Potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum tergarap maksimal, dan posisi bargaining petani/nelayan umumnya lemah, sehingga rawan diperlakukan tidak adil dimana hal itu dibuktikan dari adanya pembagian margin keuntungan yang lebih banyak dinikmati pedagang perantara/tengkulak daripada petani/nelayan sebagai produsen.		
4.1.	Produksi tanaman pangan	Cukup memadai	Jumlah produksi tanaman pangan cenderung meningkat, terutama padi dan jagung. Namun untuk ubi kayu dan kedelai, kacang tanah dan kacang hijau justru menurun	Perlu didukung regulasi untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif

No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
4.2.	Ketersediaan pangan utama	Cukup memadai	Ketersediaan pangan utama, khususnya jagung dan padi cukup memadai	Pengembangan pangan alternatif atau deversifikasi pangan
4.3.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Perlu ditingkatkan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih rendah.	Perlu didukung program revitalisasi sektor pertanian yang berpihak kepada kesejahteraan petani
4.4.	Cakupan Bina kelompok Tani	Cukup memadai	Cakupan Bina Kelompok Tani cenderung meningkat	Perlu didukung program pemberdayaan kelompok tani
4.5.	Nilai Tukar Petani	Masih memprihatinkan	Nilai Tukar Petani meski terus meningkat, namun tidak terlampaui signifikan.	Perlu didukung program perlindungan dan pemberdayaan petani.
4.6.	Perkembangan populasi ternak	Perlu ditingkatkan	Jumlah sapi potong dan domba naik, tetapi sapi perah, ayam ras pedaging, itik, kambing relatif stagnan, bahkan menurun	Perlu didorong perkembangan produksi peternakan
4.7.	Perkembangan sektor perkebunan	Perlu ditingkatkan	Produksi tanaman semusim (tembakau) cenderung naik, tetapi untuk tanaman tahunan justru fluktuatif bahkan menurun. Pendapatan petani dari sektor perkebunan relatif stagnan	Perlu dikembangkan pangsa pasar dan perbaikan harga komoditi perkebunan yang berpihak kepada petani
4.8.	Produksi perikanan	Perlu ditingkatkan	Produksi hasil tangkapan perikanan laut dan tambak cenderung fluktuatif. Pendapatan nelayan cenderung turun (tahun 2011 sebesar 22.032.000 menjadi 18.377.700 di tahun 2012)	Perlu didukung program modernisasi perikanan, dan revitalisasi peran TPI
5.	Kependudukan	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali, tetapi sebagian besar penduduk umumnya belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan administrasi birokrasi kependudukan, dan belum pula menyadari arti penting status kependudukan. Tidak sedikit penduduk masih belum memiliki akte kelahiran dan akte nikah yang sah, serta masih banyak ditemukan pendudukan, khususnya perempuan, menikah dalam usia dini.		

No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
5.1.	Kepemilikan KTP	Masih memprihatinkan	Kepemilikan KTP meski meningkat, tetapi masih jauh dari memadai.	Perlu didukung program KTP on-line
5.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	Masih memprihatinkan	Rasio bayi yang berakte kelahiran tidak banyak mengalami perbaikan, dan cenderung fluktuatif.	Program akte kelahiran gratis
5.3.	Pemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	Perlu ditingkatkan	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk cenderung membaik.	Program akte kelahiran gratis
5.4.	Peserta KB Aktif	Masih perlu ditingkatkan	Jumlah peserta KB aktif masih fluktuatif. Di tahun 2010 sebanyak 120.581, di tahun 2011 sebanyak 117.024, dan tahun 2012 sebanyak 125.359	Perlu sosialisasi program KB yang lebih intensif
6.	Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf kesejahteraan dan kondisi IPM penduduk.		
6.1.	Pertumbuhan PDRB	Masih memprihatinkan	Pertumbuhan PDRB cenderung fluktuatif.	Intervensi program pemerintah pada sektor penyumbang PDRB yang potensial
6.2.	Laju Inflasi	Masih mencemaskan	Inflasi naik-turun karena dipengaruhi kondisi perekonomian nasional.	Stabilitas sosial-politik
6.3.	Perkembangan nilai produksi dan investasi	Cenderung stagnan	Meski investasi naik, tetapi produksi stagnan. Investasi tahun 2010 sebesar 1.258.296 naik menjadi 3.297.296 di tahun 2011. Sementara itu, produksi di tahun 2010 sebesar 17.851.573 cenderung tidak berubah di tahun 2011 yang sebesar 17.866.429	Memperudahkan perijinan usaha dan perluasan pangsa pasar untuk merangsang peningkatan produksi
6.4.	Perkembangan sentra industri kecil	Cenderung stagnan	Jumlah sentra industri kecil stagnan, bahkan ada turun karena mengalami prose pengikisan modal	Bantuan modal usaha
6.5.	Perkembangan usaha perdagangan	Perlu ditingkatkan	Jumlah usaha perdagangan relatif naik, tetapi untuk pedagang golongan ekonomi lemah stagnan	Perlu didukung bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM



No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
7.	Ketenagakerjaan	Industrialisasi dan kesempatan kerja yang tumbuh umumnya tidak ramah tenaga kerja lokal. Jumlah pengangguran relatif masih tinggi, terutama karena belum didukung ketersediaan lapangan kerja yang memadai, dan sesuai dengan profil kualifikasi tenaga kerja yang ada. Dalam konteks hubungan industrial, posisi pekerja/buruh umumnya masih belum berdaya, dan tidak memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan usaha yang sifatnya mandiri.		
7.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Masih kurang	Tingkat partisipasi angkatan kerja masih fluktuatif. Tahun 2010 sebesar 74,72, sedangkan tahun 2011 sebesar 69,94. Tingkat pengangguran terbuka turun, tetapi tidak terlalu signifikan. Di tahun 2011 tercatat sebesar 2,89, sedangkan tahun 2010 sebesar 3,53	Kebijakan yang pro job
7.2.	Kesempatan kerja	Perlu ditingkatkan	Perkembangan kesempatan kerja masih stagnan	Pengembangan lapangan kerja baru yang ramah tenaga kerja lokal
7.3.	Pengangguran	Masih fluktuatif	Penanganan pengangguran masih belum optimal. Di tahun 2010 jumlah pengangguran 15,471, dan di tahun 2011 sebesar 11,559	Kebijakan yang pro job
8.	Pemberdayaan Perempuan dan KB	Kehidupan dan kadar pemberdayaan perempuan telah banyak mengalami perbaikan, meski harus diakui masih terasa adanya dominasi ideologi patriarkhis, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Perempuan umumnya lebih dikondisikan dan terkondisi terlibat dalam pekerjaan di sektor domestik yang tidak menghasilkan uang, sehingga posisi mereka di hadapan kaum laki-laki cenderung diperlakukan kurang adil.		
8.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan lembaga swasta	Belum memadai	Keberdayaan dan partisipasi perempuan umumnya meningkat, namun masih belum optimal.	Perlu didukung program pemberdayaan perempuan miskin
8.2.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Masih memprihatinkan	Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung naik, namun masih belum memperlihatkan kesetaraan yang seimbang bila dibandingkan laki-laki.	Pemberian kesempatan perempuan mengakses modal usaha murah

No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
9.	Koperasi dan UMKM	Sebagai bagian dari perekonomian rakyat, posisi bargaining pelaku UMKM dalam struktur perdagangan dan dunia industri umumnya lemah. Perkembangan UMKM seringkali masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan akses pada pasar yang bisa mereka jadikan modal untuk mengembangkan usaha ekonomi. Iklim persaingan yang makin ketat, ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya produksi seringkali menyebabkan terjadinya proses pengikisan modal yang dimiliki pelaku UMKM.		
9.1.	Persentase koperasi aktif	Perlu ditingkatkan	Jumlah koperasi aktif cenderung stagnan. Di tahun 2011 sebanyak 481 dan tidak berubah di tahun 2012	Perlu didukung dan fokus pada pengembangan Kopwan
9.2.	Jumlah anggota koperasi	Perlu ditingkatkan	Jumlah anggota koperasi cenderung naik, namun potensi masyarakat yang terlibat sebagai anggota koperasi masih sangat besar	Perlu didukung peran Bank Jatim dan subsidi bunga perbankan
9.3.	UMKM	Perlu ditingkatkan	Jumlah UMKM cenderung stagnan	Perlu stimulus paket bantuan modal murah
10.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sumber daya alam yang dimiliki sebetulnya cukup berlimpah, namun upaya eksplorasi yang dikembangkan umumnya masih belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Di sisi lain, upaya untuk menjamin pelestarian lingkungan seringkali masih terhambat kepentingan komersial pelaku ekonomi dan perilaku masyarakat yang belum menyadari arti penting kelestarian lingkungan.		
10.1	Upaya penanganan sampah	Masih memprihatinkan	Sarana untuk penanganan sampah tidak mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan perkembangan volume sampah	Perlu didukung pembangunan TPA yang memadai
10.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	Kurang memadai	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal cenderung meningkat	Perlu didukung tenaga pengawas Amdal yang memadai
11.	Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum	Kondisi ketertiban keamanan di masyarakat relatif kondusif. Namun potensi terjadinya gangguan keamanan dan konflik yang manifest masih tetap ada, terutama berkaitan dengan adanya potensi konflik horisontal, dan belum melembaganya saluran untuk menyampaikan aspirasi sosial-politik masyarakat serta karena makin mudarnya daya kohesi sosial masyarakat.		
11.1.	Angka kriminalitas yang tertangani	Cukup memadai	Angka kriminalitas yang tertangani masih belum maksimal	Perlu didukung peran masyarakat (pemolisian masyarakat)

No.	Bidang Urusan	Interpretasi	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
11.2.	Tindak kejahatan	Perlu penanganan	Tindak kejahatan yang banyak berkembang adalah praktik penipuan, perjudian, dan KDRT	Perlu didukung peran aktif masyarakat sebagai watchdog
12.	Pekerjaan Umum	Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pamekasan cenderung memprihatinkan, dan berpotensi mengganggu kelancaran mobilitas sosial dan mobilitas perekonomian masyarakat.		
12.1.	Kualitas jalan kabupaten	Memprihatinkan	Kualitas jalan kabupaten yang dalam kondisi baik malah menurun, sedangkan yang rusak dan rusak berat cenderung naik. Tahun 2010 jalan kabupaten yang rusak berat 3.000, sedangkan di tahun 2011 naik menjadi 26.012,50. jalan kabupaten yang dalam kondisi baik di tahun 2010 sepanjang 454.883, di tahun 2011 turun menjadi 396.432	Perlu perbaikan kondisi jalan untuk mendukung peningkatan performance perekonomian

### 3.2. Isu Strategis

Isu strategis pada dasarnya adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, dan harus diidentifikasi secara objektif dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik). Bagi Kabupaten Pamekasan, isu-isu strategis yang diidentifikasi, selain sejauh mungkin diupayakan tetap sinkron dengan arah kebijakan jangka panjang nasional dan kebijakan jangka panjang Provinsi Jawa Timur. Isu-isu strategis yang dirumuskan, selain mengacu pada janji politik pimpinan daerah terpilih, juga harus mempertimbangkan daya ungkit yang signifikan bagi pembangunan daerah, memiliki pengaruh yang besar bagi pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional, merupakan tugas pemerintah daerah, dan mempertimbangkan pula dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.

Dalam program pembangunan jangka panjang yang akan diluncurkan di Kabupaten Pamekasan selama 20 tahun ke depan, ada sejumlah isu strategis yang telah berhasil diidentifikasi, dan karenanya perlu mendapat perhatian serius dari seluruh aparat pemerintah Kabupaten Pamekasan. Berbagai isu strategis yang berhasil diidentifikasi, sudah barang tentu adalah isu-isu yang diasumsikan akan

mempengaruhi upaya pemerintah daerah “Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT”.

Berbagai isu strategis yang berhasil diidentifikasi, dan karenanya mendesak untuk ditangani, bukan hanya berkaitan dengan isu-isu di tingkat lokal dan regional, tetapi juga isu-isu strategis di tingkat nasional dan bahkan internasional. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, dan faktor-faktor eksternal yang lain, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Pamekasan harus diakui merupakan tantangan tersendiri yang berat dan membutuhkan dukungan dari seluruh pelaku pembangunan: masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan seluruh stakeholder terkait.

Di tingkat internasional, kita tahu bahwa situasi perekonomian dunia hingga saat ini masih belum juga stabil. Fluktuasi harga minyak dunia yang cenderung naik, dan kondisi perekonomian sejumlah negara adi daya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang terpukul imbas krisis keuangan adalah faktor eksternal yang sedikit-banyak akan mempengaruhi dinamika perekonomian nasional, tak terkecuali kondisi perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Di sisi lain, ekspansi berbagai produk dari sejumlah negara lain, terutama barang-barang dari China yang terkenal murah, sedikit-banyak tentunya akan mempengaruhi prospek pengembangan usaha dan pemasaran produk-produk hasil usaha masyarakat. Sekedar contoh, masuknya batik dari China, misalnya, tentu sedikit-banyak akan mempengaruhi potensi pengembangan industri batik tulis dari Kabupaten Pamekasan. Demikian juga masuknya barang-barang murah dari China, tentu langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dinamika perekonomian para pelaku ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Di tingkat internasional, liberalisasi perdagangan dan pelaksanaan kesepakatan globalisasi perdagangan, langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi prospek perkembangan UMKM dan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Masuknya berbagai produk import dengan harga yang bersaing, sudah barang tentu akan mempengaruhi peluang pemasaran produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Di sisi lain, adanya desakan konsumen internasional yang makin menuntut standarisasi produk, tentu

akan mempengaruhi peluang bagi pelaku UMKM dari Kabupaten Pamekasan untuk dapat menembus pasar ekspor.

Di Tingkat Nasional, faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembangunan di Kabupaten Pamekasan, bukan saja berasal dari implementasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikembangkan pemerintah pusat, tetapi juga dinamika perekonomian nasional secara keseluruhan. Kebijakan pemerintah tentang harga BBM, tarif dasar listrik, dan keseriusan pemerintah memfasilitasi pengembangan kawasan ekonomi khusus Madura, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian dan kondisi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, komitmen dan keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan utamanya pedesaan terpencil, tentu juga akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah, khususnya dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan secara layak. Komitmen pemerintah pusat untuk sesegera mungkin menangani persoalan kemiskinan, dan pengangguran adalah payung dari implementasi kebijakan daerah yang lebih pro poor dan pro job.

Di Tingkat Regional, salah satu faktor yang akan banyak mempengaruhi potensi dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, tak pelak adalah pembangunan dan kehadiran Jembatan Suramadu. Meski di satu sisi, pembangunan Jembatan Suramadu telah memberi kesempatan yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial dan mengembangkan usahanya, tetapi di sisi yang lain harus diakui kehadiran Jembatan Suramadu juga melahirkan berbagai masalah, antara lain masuknya arus modal dari luar dan terjadinya proses penghisapan dana masyarakat ke wilayah urban untuk membiayai kebutuhan konsumsi, pola rekreasi dan perubahan gaya hidup (life style) masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Pembangunan Jembatan Suramadu, bagi Kabupaten Pamekasan adalah peluang, namun sekaligus juga tantangan tersendiri. Ketika mobilitas sosial masyarakat makin meningkat, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah proses marginalisasi masyarakat lokal akibat penetrasi kekuatan modal. Arus modal atau investasi yang masuk ke Kabupaten Pamekasan, bila tidak ramah dengan karakteristik tenaga kerja lokal, niscaya hanya akan melahirkan kesenjangan yang makin terpolarisasi. Sepanjang masyarakat lokal masih mengidap berbagai keterbatasan,

pendidikannya rendah dan tidak didukung penguasaan keterampilan yang spesifik, maka yang terjadi dapat diprediksi adalah proses marginalisasi.

Sebagai salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari kawasan Tapal Kuda, diakui atau tidak, dalam hal kualitas sumber daya manusia (IPM), ketersediaan infrastruktur, dan lain sebagainya, kondisi masyarakat Kabupaten Pamekasan umumnya masih tertinggal bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Tanpa didukung fondasi kualitas sumber daya manusia yang memadai, bukan tidak mungkin kesenjangan antar wilayah akan makin terpolarisasi dan menempatkan Kabupaten Pamekasan pada ranking terendah di jajaran daerah yang memiliki angka IPM, IKM, dan daya saing yang rendah.

Selama ini, proses pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, dalam batas-batas tertentu sebetulnya telah memperoleh dukungan dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengandalkan program Jalin Kesra yang pro poor dan pro job. Namun demikian, akibat keterbatasan dana dan besaran masalah yang acapkali kurang sebanding dengan dana yang tersedia, maka hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program Jalin Kesra seringkali masih belum optimal. Dalam upaya penanganan kemiskinan, diakui atau tidak, seringkali program-program yang dikembangkan belum terlaksana dan memberikan efek yang signifikan, karena kekeliruan dalam cara pandang dan pemahaman para perencana pembangunan terhadap akar masalah dan problema di tingkat lokal. Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial masyarakat sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekadar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya asset produksi untuk mengembangkan sebuah usaha. Kemiskinan yang masih membelenggu sebagian masyarakat Kabupaten Pamekasan, dan proses pendalaman kemiskinan yang terjadi di sebagian masyarakat, selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani.

Tabel III.2  
Isu Strategis Jangka Panjang yang Dihadapi Kabupaten Pamekasan

No.	Isu Strategis Jangka Panjang			
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Regional	Lain-lain
1.	Gejolak harga minyak dunia, krisis perekonomian di AS dan Eropa, serta menguatnya nilai tukar mata uang asing, khususnya dollar AS dan dollar Australia (AUD).	Kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, dan efek domino yang ditimbulkan	Pembangunan Jembatan Suramadu, dan pelaksanaan program Jalin Kesra yang pro poor dan pro job	Program penanganan kemiskinan yang cenderung bersifat amal-karitatif, dan penentuan kelompok masyarakat/keluarga miskin yang masih belum benar-benar akurat
2.	Kesepakatan tentang arti penting standarisasi produk bagi konsumen di tingkat internasional, dan arus masuknya berbagai produk import murah sebagai konsekuensi dari globalisasi perekonomian	Komitmen pemerintah pusat mengembangkan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus, dan komitmen untuk mendorong pengembangan kawasan kepulauan	Kondisi IPM masyarakat Madura yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar-wilayah, dan ketertinggalan Kabupaten Pamekasan dibandingkan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, terutama daerah di wilayah daratan	Keberdayaan para pelaku kegiatan ekonomi kerakyatan, dan akses mereka terhadap sumber-sumber produksi, permodalan, dan pasar yang relatif lemah

Terlepas dari hasil-hasil dan kemajuan yang berhasil dicapai, ada kecenderungan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial makin sulit diwujudkan dengan segera, selain karena keterbatasan dana pembangunan daerah yang ada, juga karena seringkali dipersulit oleh adanya kesenjangan sosial yang terlampau lebar dan bahkan dalam sejumlah kasus diperparah karena adanya perubahan di tingkat nasional dan bahkan di tingkat internasional yang kontra-produktif. Banyak kajian telah membuktikan, bahwa kelemahan dari berbagai program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah bermula dari kebijakan pembangunan nasional yang lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung sentralistik atau

terpusat, sehingga tidak peka pada kebutuhan lokal. Di sisi lain, berbagai program peningkatan kesejahteraan yang digulirkan pemerintah juga acapkali bersifat populis-karitatif, dan cenderung hanya memposisikan masyarakat sebagai objek, sehingga cepat atau lambat justru hanya mematikan potensi swakarsa dan kemampuan self-help masyarakat untuk menolong dirinya sendiri.

Dengan memandang persoalan kesejahteraan sosial hanya dari aspek ekonomi saja, maka yang terjadi kemudian permasalahan kemiskinan di berbagai komunitas seringkali dianggap serba sama (uniform) dan diyakini akan dapat dipecahkan semata-mata hanya dengan mengandalkan pemberian bantuan hibah dan bantuan modal usaha. Padahal, kenyataan di lapangan acapkali berbicara lain. Pemberian bantuan hibah dan bantuan modal usaha, dalam batas-batas tertentu hanya menciptakan ketergantungan baru, dan tidak memberikan hasil atau daya ungkit yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Partisipasi dan kemandirian masyarakat, dalam pelaksanaan program pembangunan yang sentralistik sering justru disisihkan, dan yang lebih banyak dikembangkan adalah program-program pembangunan yang sekedar mentransplantasikan aspek-aspek dari kehidupan masyarakat modern, tanpa melihat lebih jauh apakah pelaksanaan program yang dikembangkan terbukti berhasil memandirikan masyarakat atau malah mematikan potensi swakarsa masyarakat.

Dengan berkaca pada pengalaman dan didukung tekad serta komitmen Kepala Daerah terpilih sebagaimana dinyatakan dalam visi-misi pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan agar program-program pembangunan yang dirancang dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun fondasi sosial yang kuat, mengembangkan program yang saling bersinergi, menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas (*attacking the roots of poverty*), dan sekaligus memastikan semua program benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan berkeadilan. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang maju, sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan memiliki daya saing yang kuat, harus diakui bukanlah hal yang mudah.

Di Kabupaten Pamekasan, agar perkembangan jumlah penduduk miskin bisa dikurangi dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dipercepat,



masyarakat dapat berkembang maju, mandiri dan berdaya saing, maka yang dibutuhkan ke depan adalah model dan upaya-upaya baru yang terfokus pada proses pemberdayaan potensi swakarsa masyarakat, berpihak kepada masyarakat miskin, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan, pengakuan pada potensi lokal, pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, pengembangan kebijakan yang dapat menghasilkan pembukaan lapangan kerja yang sesuai karakteristik para pencari kerja, dan pengembangan industri dan aktivitas ekonomi yang ramah tenaga kerja lokal, manajemen program yang benar-benar solid dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang profesional, kreatif, transparan, serta keberpihakan yang nyata kepada masyarakat di daerah yang tertinggal, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan (\*).

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

Dalam rangka menjamin agar pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan selama kurun waktu 20 tahun ke depan benar-benar berpihak kepada masyarakat, selain harus direncanakan secara bottom-up dan bersifat kontekstual, yang tak kalah penting seluruh proses dan kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi harus menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Di era otonomi seperti sekarang ini, telah disepakati bahwa peran masyarakat dalam pembangunan benar-benar sentral, sehingga merupakan suatu keharusan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan untuk saat ini maupun di masa yang akan datang harus berpusat kepada rakyat, pro poor dan pro job, sehingga pada akhirnya akan dapat diwujudkan kondisi masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

Dalam rangka menjamin dan mengarahkan agar pembangunan yang diagendakan dan tengah berlangsung dapat berjalan dengan efisien dan efektif sebagaimana diharapkan, maka dibutuhkan visi dan misi pembangunan daerah yang jelas, kontekstual dan berpihak kepada rakyat. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan pada dasarnya adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2025. Sebagai daerah yang sedang pada proses transisi dan terus berkembang, selama 20 tahun ke depan Kabupaten Pamekasan bukan saja akan terus berkembang makin makmur, maju dan sejahtera, tetapi juga akan makin berdaya, berkeadilan, nyaman dan aman sesuai Ridho dari Allah SWT. Meski untuk saat ini harus diakui masih ada berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapi Kabupaten Pamekasan. Namun demikian, dengan menyadari kelemahan dan potensi lokal yang dimiliki, niscaya selama 20 tahun ke depan secara bertahap akan dapat diwujudkan tata kehidupan masyarakat yang diinginkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dirumuskan nanti pada dasarnya adalah pilihan jalan (the chosen track) yang akan ditempuh dan diwujudkan pemerintahan daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholder pembangunan secara keseluruhan.

Mengacu pada kebutuhan masyarakat, dan berdasarkan masukan dari seluruh stakeholder, mempertimbangkan aspirasi sosial-politik masyarakat, dan didukung komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, maka visi dan misi yang ditetapkan sebagai acuan dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 adalah:

#### 4.1. Visi

“Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT”

##### Penjelasan Visi:

- Maju, artinya kondisi masyarakat yang secara sosial-ekonomi, budaya, politik dan hukum menuju keadaan yang lebih baik.
- Sejahtera, artinya mencapai taraf kehidupan yang tentram, nyaman, secara sosial-ekonomi dan psikologis tidak kekurangan dan mampu memenuhi paling-tidak kebutuhan dasar seluruh anggota keluarganya.
- Berdaya saing, artinya berkemampuan untuk tumbuh berkembang dan memiliki posisi bargaining yang sejajar (egaliter dan simetris) dengan pihak lainnya, terutama dalam pemasaran produk dan dalam rangka menarik investasi.
- Agropolitan, artinya suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitar.

- Minapolitan, artinya konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
- Berkelanjutan, artinya mampu secara mandiri melanjutkan proses dan perkembangan pembangunan dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki.
- Menuju Ridho Allah SWT, artinya berharap memperoleh petunjuk dan Ridho Allah SWT.

#### 4.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan serta sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, secara garis besar, Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan Ridho Allah SWT dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan prinsip non-diskriminatif.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis pada agropolitan dan minapolitan serta mendorong pengembangan potensi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan infrastruktur dalam mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pengembangan tata ruang sesuai potensi dan sumber daya daerah.
5. Mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif, pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar-wilayah, pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, mandiri.
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional.
7. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik.

9. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas fondasi sosial-ekonomi masyarakat yang benar-benar kuat (\*).

## **BAB V**

### **SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**

Sangat dipahami bahwa upaya untuk mewujudkan visi yang diemban Kabupaten Pamekasan dalam jangka waktu 20 tahun yakni menciptakan "Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT" sesungguhnya bukanlah persoalan mudah. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan secara baik sesuai dengan cita-cita bersama sangat dibutuhkan tekad, semangat dan kerja keras dari seluruh pihak. Selain itu agar proses pembangunan dapat didorong secara lebih akseleratif dan terarah maka dibutuhkan adanya beberapa langkah konstruktif seperti; adanya perencanaan yang baik, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan sebenarnya merupakan upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Ketika dalam proses pembangunan dibutuhkan adanya koordinasi yang baik maka hal ini mengandung makna bahwa dalam pembangunan diperlukan adanya aktivitas perencanaan yang baik. Di samping itu pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini mekanisme yang digunakan harus mengacu pada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Berkaitan dengan upaya mencapai aspirasi yang paling manusiawi, maka pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika.

Selanjutnya selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diharapkan tercipta masyarakat Pamekasan yang maju. Maju artinya bahwa dalam kurun waktu 20 tahun mendatang kondisi masyarakat Pamekasan secara sosial-ekonomi, budaya, politik dan hukum menuju keadaan yang lebih baik. Dengan kemajuan yang berhasil diraih di segala bidang

maka ke depan kondisi masyarakat Pamekasan yang makmur dan sejahtera semakin dapat diwujudkan. Agar masyarakat yang makmur dapat memberikan makna hakiki dalam kehidupan masyarakat secara luas maka terwujudnya masyarakat yang makmur harus diiringi dengan aspek pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan. Sebab tanpa adanya unsur pemerataan dalam pembangunan maka substansi kemakmuran menjadi tereduksi dan kian tak bermakna bahkan bukan mustahil proses pembangunan justru akan memunculkan kondisi kontra produktif yakni kesenjangan dan ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Sebagaimana pengalaman masa lalu yang kerap terjadi di berbagai daerah bahwa pembangunan ekonomi diakui telah berhasil menciptakan angka pertumbuhan yang relative tinggi, namun di saat yang sama berbagai kemajuan di bidang ekonomi ternyata belum sepenuhnya dapat menyelesaikan problematika kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di daerah bersangkutan. Salah satu penyebab munculnya kondisi seperti ini adalah karena orientasi pembangunan yang diselenggarakan cenderung lebih memberikan prioritas pada pusat-pusat pertumbuhan dan kota besar. Tidak jarang terjadi pembangunan di wilayah pedesaan menjadi kurang memperoleh perhatian atau terpaksa ditinggalkan dalam kegiatan pembangunan karena selain dipandang kurang produktif, juga karena secara geografis maupun politis jauh dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu pembangunan jangka panjang yang dilakukan di kabupaten Pamekasan diharapkan kelak akan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang maju dan makmur secara merata dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk hidup secara layak.

Selain masyarakat yang maju visi pembangunan Kabupaten Pamekasan dalam jangka panjang adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat memahami bahwa hakekat dan tujuan pembangunan jangka panjang yang dilakukan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar sejahtera sebagai modal dan investasi sosial untuk mencapai kemajuan dan kemandirian. Kesejahteraan yang diharapkan mengarah pada upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang tentram, nyaman, secara sosial-ekonomi dan psikologis tidak kekurangan dan mampu memenuhi paling-tidak kebutuhan dasar seluruh anggota keluarganya. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat yang hendak dicapai bersifat multidimensional tidak sekedar sosial ekonomi semata

melainkan juga menyangkut kesejahteraan psikologis termasuk di dalamnya terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni melakukan aktivitas keagamaan yang mampu menciptakan ketenangan batin.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia maka masyarakat Kabupaten Pamekasan tidak hanya menghadapi perkembangan ekonomi yang bersifat lokal dan regional melainkan juga harus berhadapan dengan kondisi perekonomian global. Artinya setiap perubahan kondisi perekonomian yang terjadi pada tingkat dunia atau global baik langsung maupun tidak langsung sedikit banyak akan memberikan pengaruh bagi kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Pamekasan. Berkaitan dengan situasi tersebut oleh karenanya sangat relevan jika dalam visi pembangunan jangka panjang kabupaten Pamekasan juga mencantumkan pentingnya masyarakat untuk senantiasa meningkatkan daya saing. Sebagaimana disinggung pada visi pembangunan jangka panjang bahwa dalam kurun 20 tahun ke depan diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk berdaya saing, artinya berkemampuan untuk tumbuh berkembang dan memiliki posisi bargaining yang sejajar (egaliter dan simetris) dengan pihak lainnya, terutama dalam pemasaran produk dan dalam rangka menarik investasi. Untuk dapat memiliki daya saing yang tinggi maka masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan, kemampuan manajerial, ketrampilan atau skill, penguasaan teknologi, peningkatan kualitas produk, penguasaan pasar, kreatif dan inovatif serta segala upaya yang berorientasi pada upaya pemberdayaan. Upaya pemberdayaan menjadi penting sebab pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Secara teoritik konsep pemberdayaan sendiri, dapat diamati melalui tiga dimensi antara lain; (a). pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; (b). pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar; (c). pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta



menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Upaya meningkatkan daya saing bagi masyarakat sangat dibutuhkan sebab dalam proses pembangunan jangka panjang peran serta masyarakat secara luas memang sangat diharapkan. Kabupaten Pamekasan juga memiliki komitmen bahwa pembangunan seyogyanya berpusat pada rakyat. Artinya paradigma pembangunan tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi berorientasi pada potensi manusia. Dengan mengedepankan potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Oleh sebab itu selain berdaya, sifat kemandirian juga merupakan prasyarat penting yang harus dimiliki warga masyarakat sebagai subyek penting yang harus berperan dalam proses pembangunan ke depan. Kemandirian dalam konteks ini dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan, menetapkan tujuan secara sendiri tidak tergantung dan tidak menjadi pihak yang tersubordinasi pihak lain. Kemandirian dan memiliki daya saing yang tinggi merupakan karakter penting yang harus dimiliki sebab dalam konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat dibutuhkan inisiatif kreatif yang datang dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Jika kondisi kemandirian dan masyarakat yang berdaya dapat diwujudkan niscaya tujuan pembangunan yang memberikan kebanggaan bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya akan semakin tumbuh.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi di bidang agropolitan dan minapolitan maka daya saing yang dapat dioptimalkan oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan adalah daya saing yang berbasis agropolitan dan minapolitan, artinya pembangunan yang dikembangkan bertumpu pada potensi pokok yang dimiliki daerah, yaitu di bidang agropolitan dan minapolitan. Sebagaimana dipahami bahwa sampai saat ini sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang masih banyak ditekuni masyarakat Pamekasan. Ke depan sektor pertanian seyogyanya tidak sekedar menjadi lahan untuk bertahan hidup semata melainkan perlu adanya konsep pengembangan yang memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Dengan konsep yang terencana, terpadu dan komprehensif, kawasan pertanian merupakan investasi bisnis yang dapat memberikan kemakmuran masyarakat. Melalui program pembangunan

pertanian terpadu dengan konsep agropolitan maka akan dapat diwujudkan kawasan pertanian terpadu dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sektor pertanian, potensi besar yang dimiliki Kabupaten Pamekasan adalah sektor perikanan dan kelautan. Mengingat Kabupaten Pamekasan memiliki potensi dalam bidang perikanan baik dari aspek sumber daya alam, luas lahan dan iklim yang kondusif, penguasaan teknologi serta ketersediaan sumber daya manusia maka sangat relevan jika dalam kurun waktu 20 tahun ke depan perlu adanya pembangunan dengan konsep minapolitan. Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan (development) merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dalam hal ini pembangunan memiliki relevansi dengan upaya terencana yang berfokus pada pengembangan dan membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat, berkualitas, dan dilakukan secara berkelanjutan. Berkelanjutan, artinya mampu secara mandiri melanjutkan proses dan perkembangan pembangunan dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Pamekasan memfokuskan perhatian dan mengutamakan kepentingan pembangunan jangka panjang dan dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan sendiri merupakan proses jangka panjang yang sengaja direncanakan dan dilaksanakan dengan langkah-langkah yang konsisten, berkelanjutan, sinergis dan terkoordinasi untuk mewujudkan masyarakat yang bukan saja dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, lapangan kerja, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, air bersih, rasa aman serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tetapi, pembangunan juga merupakan proses investasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, akses dan keberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kuncoro dan Todaro (2000) bahwa pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah hendaknya mencakup tiga nilai yakni;

(a). menyangkut soal ketahanan (Sustenance) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup; (b). harga diri (Self Esteem) yakni pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu dan (c). Freedom from servitude bahwa dalam proses pembangunan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan maka dalam proses pembangunan diharapkan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan yang berarti berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang, memberikan kepada yang berhak sesuai dengan pengabdianya. Selain itu kondisi yang tenang, damai, tentram dan terjamin keselamatan jiwa-raga dan terpenuhi hak-haknya serta adanya harapan untuk memperoleh petunjuk dan Ridho Allah SWT merupakan cita-cita pembangunan yang diharapkan dapat diwujudkan secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

#### 5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Dalam menetapkan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan dan mendasarkan pada visi dan misi, tujuan serta berbagai masalah pembangunan atau isu prioritas yang dihadapi oleh Kabupaten Pamekasan selama ini. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025 adalah "Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT"

Melalui visi ini masyarakat Kabupaten Pamekasan akan diposisikan sebagai subyek dan aktor pembangunan yang memiliki kemampuan untuk bangkit dan berdaya dalam memanfaatkan segenap potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki serta mampu mewujudkan kemajuan di segala aspek kehidupan. Dalam hal ini kemandirian dan keberdayaan masyarakat sangat dituntut agar masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara merata dan berkeadilan dapat

terwujud di berbagai wilayah di Kabupaten Pamekasan. Dengan kondisi masyarakat yang makin maju, dan sejahtera lahir dan batin maka masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembangunan serta dapat bersaing secara sehat dengan daerah lain melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki.

Selanjutnya agar visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan dapat diwujudkan secara nyata maka diperlukan sejumlah upaya antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan Ridho Allah SWT dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan prinsip non-diskriminatif;
- 3) Meningkatkan perekonomian berbasis pada agropolitan dan minapolitan serta mendorong pengembangan potensi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan;
- 4) Mengembangkan infrastruktur dalam mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pengembangan tata ruang sesuai potensi dan sumber daya daerah;
- 5) Mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif, pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar-wilayah, pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta memacu perkembangan UMKM dan etos kewirausahaan yang inovatif dan mandiri;
- 6) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional;
- 7) Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN.
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima.
- 9) Serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik;
- 10) Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas fondasi yang benar-benar kuat.

Misi sebagaimana terurai diatas sesungguhnya merupakan respon positif dan strategis yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Langkah ini menjadi sangat krusial dan penting mengingat bahwa saat ini kabupaten Pamekasan tengah dihadapkan pada sejumlah problematika serius terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Merespon situasi tersebut oleh karenanya dibutuhkan kebijakan yang benar-benar terarah dan kontesktual sehingga ke depan dapat meningkatkan harkat martabat serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk kepentingan tersebut maka sasaran pokok dan arah kebijakan yang tepat dan akurat yang mampu mempercepat proses pembangunan sangat diperlukan. Secara ideal penetapan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan selain mengacu pada visi-misi pembangunan, seyogyanya juga bertumpu pada kondisi dan permasalahan nyata yang eksis di Kabupaten Pamekasan. Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat niscaya sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang dirumuskan di Kabupaten Pamekasan akan lebih bersifat kontekstual dan implementatif, sehingga dalam pelaksanaannya nanti benar-benar dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang berhasil dilakukan setidaknya ada 10 (sepuluh) problematika serius yang dihadapi oleh Kabupaten Pamekasan. Permasalahan dimaksud antara lain:

- 1) Upaya penanganan kemiskinan dan pengentasan masyarakat miskin seringkali masih terjebak pada program-program pembangunan yang populis, tidak kontekstual, dan seringkali merupakan program pembangunan yang sifatnya amal-karitatif, sehingga belum mampu menimbulkan daya ungkit yang signifikan;
- 2) Kondisi fasilitas atau infrastruktur pendidikan dan kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Pamekasan umumnya masih belum berkembang secara merata. Kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan umumnya masih rendah dan tidak sedikit anak-anak yang dihadapkan pada pilihan dilematis antara bekerja atau sekolah;

- 3) Layanan kesehatan yang berkembang di masyarakat umumnya masih kurang merata, dan belum didukung kualitas infrastruktur layanan kesehatan yang layak serta akses masyarakat (miskin) terhadap layanan kesehatan umumnya masih belum optimal;
- 4) Meski potensi sektor pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan serta potensi di sektor UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan cukup tinggi, namun potensi yang ada tersebut belum tergarap maksimal, dan nasib petani/nelayan serta pelaku UMKM umumnya belum diperlakukan adil di mana hal itu dibuktikan dari adanya pembagian margin keuntungan yang lebih banyak dinikmati pedagang perantara/tengkulak daripada petani/nelayan dan pelaku UMKM sebagai produsen;
- 5) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengawasan program pembangunan secara umum masih belum berkembang optimal;
- 6) Semangat kewirausahaan dan kemandirian masyarakat dalam pengembangan usaha umumnya belum berkembang optimal. Sikap sebagian besar masyarakat, dalam banyak kasus masih cenderung fatalis dan kurang memiliki keberanian serta kemandirian untuk mengembangkan usaha yang dapat diandalkan untuk menopang kelangsungan kehidupan keluarganya;
- 7) Dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatnya aktivitas perekonomian rakyat di Kabupaten Pamekasan, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf kesejahteraan dan kondisi IPM penduduk secara signifikan;
- 8) Jumlah pengangguran relatif masih tinggi, arus investasi masih tergolong rendah, sementara di saat yang sama masyarakat tidak memiliki modal dan aset produksi yang cukup untuk mengembangkan usaha yang sifatnya mandiri. Industrialisasi yang berkembang, dalam beberapa kasus kurang ramah tenaga kerja lokal, sehingga yang terjadi kemudian mismatch dengan karakteristik tenaga kerja yang tersedia;
- 9) Perkembangan UMKM seringkali masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan akses pada sumber-sumber permodalan maupun pasar. Iklim persaingan yang makin ketat, ditambah lagi dengan adanya kenaikan biaya produksi

seringkali menyebabkan terjadinya proses pengikisan modal yang dimiliki pelaku UMKM;

- 10) Pasca pembangunan Jembatan Suramadu dan penetrasi teknologi informasi, termasuk televisi dan internet, dalam beberapa kasus tentu akan melahirkan pergeseran gaya hidup dan aspirasi sosial-ekonomi masyarakat yang cenderung lebih konsumtif, yang ujung-ujungnya akan dapat menyebabkan terjadinya pengurasan sumber-sumber dana masyarakat ke luar daerah.

Selanjutnya berdasarkan berbagai isu prioritas dan kondisi problematik dihadapi kabupaten Pamekasan pada bagian ini diuraikan berbagai sasaran pokok dan arah kebijakan yang didasarkan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan.

- 5.1.1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Sesuai Petunjuk dan Ridho Allah SWT Dengan Cara Menjalankan dan Memenuhi Kewajiban Menjalankan Syariat Agama Bagi Pemeluknya. Selaras dengan visi pembangunan jangka panjang kabupaten Pamekasan yakni Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Pada Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT, maka nampak jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan senantiasa memperhatikan aspek religi atau pembangunan keagamaan. Keseimbangan kesejahteraan lahir dan batin yang ideal merupakan tujuan sekaligus kondisi yang diharapkan kabupaten Pamekasan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

#### 5.1.1.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan dalam sektor keagamaan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berkaitan dengan semangat tersebut oleh karenanya pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan tujuan mulia yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Melalui peningkatan pelayanan dan pemahaman agama yang baik diharapkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan ridho Allah SWT juga akan mengalami peningkatan dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya.

Dalam proses pembangunan agama hal lain yang juga perlu memperoleh perhatian penting adalah perlunya melakukan peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran berkait dengan realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Kendati masyarakat Pamekasan mayoritas beragama Islam tetapi upaya pembinaan untuk menciptakan kerukunan hidup umat beragama, merupakan agenda pembangunan yang penting dilakukan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Berkaitan dengan tujuan tersebut maka sasaran pokok dalam pembangunan agama sebagaimana tertuang dalam misi pembangunan jangka panjang adalah "Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta keleluasaan untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama sesuai dengan agama yang diyakininya".

#### 5.1.1.2. Arah Kebijakan

Selanjutnya untuk merealisasikan tujuan tersebut dapat ditempuh melalui beberapa langkah yang diwujudkan dengan arah kebijakan antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan serta terpenuhinya sarana dan



prasarana keagamaan yang memadai. Kebijakan ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam meningkatkan kualitas ibadah yang dilakukan;

- 2) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan serta penanaman dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dapat dilakukan melalui berbagai institusi keagamaan, lembaga pendidikan baik yang bersifat formal maupun nonformal;
- 3) Meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan. Kebijakan ini diarahkan pada upaya pembinaan terhadap individu-individu yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama sehingga tercipta masyarakat beragama yang baik. Di samping itu melalui kebijakan ini diharapkan juga tumbuh calon-calon ahli ilmu agama yang kompeten yang akhirnya mampu memberikan pendidikan agama kepada masyarakat secara luas;
- 4) Meningkatkan kerukunan umat beragama. Meningkatnya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama merupakan kondisi yang harus diwujudkan. Melalui upaya ini diharapkan kehidupan agama yang aman, tentram dan damai akan dapat direalisasikan sehingga masyarakat akan kian leluasa dan nyaman dalam menjalankan ibadah agamanya;
- 5) Mengembangkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Kebijakan ini sangat diperlukan terutama untuk mengantisipasi perubahan masyarakat yang terjadi di masa yang akan datang baik karena faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat nilai-nilai keagamaan ketika menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

#### 5.1.1.3. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama baik secara kuantitatif maupun kualitasnya

2. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan.
3. Meningkatnya pendidikan agama dan keagamaan di lingkungan masyarakat.
4. Terwujudnya kerukunan umat beragama.
5. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama merupakan kondisi yang harus diwujudkan.
6. Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan.

#### 5.1.2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Layanan Kesehatan, Serta Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Dengan Prinsip Non-Diskriminatif

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial-ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera. Dalam kegiatan pembangunan perubahan tentu tidak hanya diharapkan terjadi pada aspek fisik dan kelembagaan saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Berseiring dengan kepentingan tersebut maka peningkatan kualitas manusia merupakan prasyarat yang dibutuhkan. Dalam proses pembangunan selain dibutuhkan subyek atau aktor pembangunan yang berkualitas baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun sikap kemandirian, kreativitas, inovatif dan sebagainya. Oleh sebab itu pembangunan kualitas manusia merupakan langkah yang strategis untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kualitas manusia sebenarnya suatu upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk dapat secara aktif menentukan masa depannya, baik melalui perbaikan sistem pendidikan, kualitas layanan kesehatan dan berbagai layanan sosial yang lain. Kapasitas ini mencakup lima aspek yakni: kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuasaan, dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, keberlanjutan, dan kesadaran akan interdependensi antar manusia dan lingkungannya. Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya adalah upaya untuk

mengembangkan inisiatif dan kreatifitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan yang utama dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

#### 5.1.2.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Dalam rangka meningkatkan kualitas manusia maka misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan yakni meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan prinsip non-diskriminatif kiranya merupakan langkah yang sangat relevan dan kontekstual. Sebagaimana dipahami bahwa aspek pendidikan dan kesehatan merupakan indikator penting yang menentukan indeks pembangunan manusia. Dengan memperhatikan pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sekaligus sebagai misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan maka pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan jangka panjang. Selaras dengan misi pembangunan jangka panjang yang memfokuskan perhatian pada aspek pendidikan dan kesehatan maka sasaran pokok yang dapat dirumuskan adalah "Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pamekasan". Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat secara lebih professional dengan mengutamakan prinsip non diskriminatif.

#### 5.1.2.2. Arah Kebijakan

Berkaitan dengan misi sebagaimana terurai diatas dengan maka kebijakan pembangunan terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan lebih diarahkan pada upaya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan daya jangkau dan akses masyarakat terhadap layanan sosial yakni bidang pendidikan dan kesehatan. Secara lebih terinci

arah kebijakan pembangunan aspek pendidikan dan kesehatan yang dirumuskan dalam rangka merealisasikan ikhtiar tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu;
- 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan berkualitas bagi kelompok masyarakat tidak mampu;
- 4) Mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak dan perempuan serta keluarga miskin di berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.

#### 5.1.2.3. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan
3. Berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas hidup bagi anak dan perempuan serta keluarga miskin.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
6. Meningkatnya Indeks Kemiskinan Manusia.

#### 5.1.3. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Serta Mendorong Pengembangan Potensi Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan

Sebagaimana dipahami bahwa salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Pamekasan saat ini adalah sektor pertanian. Sektor pertanian bahkan menjadi salah satu sektor yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Namun dalam kenyataan masih dijumpai adanya masyarakat yang masih menekuni sektor

pertanian sebatas sebagai lahan untuk bertahan hidup sementara jika memperhatikan potensi yang ada sebenarnya sektor masih mampu memberikan nilai lebih melalui pengembangan konsep agropolitan. Jika agropolitan diterapkan dengan konsep yang terencana, terpadu dan komprehensif, maka kawasan pertanian akan menjadi menjadi investasi bisnis yang mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat petani. Pembangunan berkonsep agropolitan bertujuan mewujudkan kawasan pertanian terpadu yang berkelanjutan, berbasis sumberdaya air dan bernuansa wisata. Konsep ini diyakini mampu meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat yang menekuninya. Melalui upaya serius dan konsisten diharapkan tidak sulit untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran masyarakat melalui konsep agropolitan.

Di samping sektor pertanian Kabupaten Pamekasan juga memiliki potensi di sektor perikanan dan kelautan. Potensi yang ada relative besar dalam bidang perikanan baik dari sumber daya alam, luas lahan dan iklim yang kondusif, penguasaan teknologi, serta ketersediaan sumber daya manusia. Melalui optimalisasi sektor minapolitan diharapkan Kabupaten Pamekasan akan menjadi salah satu produsen besar yang mampu bersaing di pasar. Oleh sebab itu agar hasil pembangunan dari sektor agropolitan dan minapolitan dapat dilakukan secara optimal maka sangat dibutuhkan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas terutama dalam penguasaan teknologi, pembenahan serta pemberdayaan potensi-potensi lokal di sektor agropolitan dan minapolitan.

#### 5.1.3.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Selaras dengan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan upaya meningkatkan perekonomian berbasis pada agropolitan dan minapolitan serta mendorong pengembangan potensi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan maka sasaran pokok yang hendak dicapai adalah "Terjadinya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan pada potensi ekonomi yang dimiliki melalui sektor agropolitan dan minapolitan".

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan upaya meningkatkan kondisi ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan melalui sektor

agropolitan dan minapolitan merupakan langkah yang tepat dan strategis mengingat potensi yang dimiliki oleh kabupaten Pamekasan baik dalam sektor pertanian maupun perikanan dan kelautan. Sebagaimana dipahami bahwa Kabupaten Pamekasan memiliki sumber daya alam di sektor pertanian. Konsep pengembangan agropolitan ke depan merupakan konsep yang tepat dalam rangka menggerakkan masyarakat dengan melakukan kegiatan pertanian atau agribisnis baik yang mencakup subsistem hulu (pupuk dan alat pertanian), subsistem usaha tani (KUD), subsistem hilir (agroindustri, pemasaran) dan subsistem penunjang (irigasi pertanian). Berbagai aktivitas tersebut diharapkan akan mampu memberikan berbagai pelayanan sarana produksi, jasa distribusi maupun pelayanan sosial ekonomi yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan pertanian. Melalui layanan dasar tersebut diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya di sektor pertanian secara mandiri. Agar kawasan agropolitan memiliki daya saing yang tinggi maka sektor ini harus didorong untuk mengoptimalkan keunggulan komparatifnya. Oleh sebab itu dalam mengembangkan kawasan agropolitan perlu memperoleh perhatian seluruh pihak terutama insentif dan kebijakan yang dapat mendukung pengembangannya.

Selanjutnya selain kawasan agropolitan Kabupaten Pamekasan juga memiliki potensi sumber daya alam relative besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Memperhatikan kondisi geografis dan potensi Kabupaten Pamekasan yang dimiliki di sektor perikanan dan kelautan tersebut oleh karenanya pengembangan konsep minapolitan merupakan upaya yang sangat relevan dan tepat guna memacu peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya. Pengembangan konsep minapolitan dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sisten manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. Dengan konsep pengembangan kota perikanan maka dibutuhkan berbagai dukungan baik dalam hal fasilitas pelayanan umum, sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan nilai tambah produksi, dan sebagainya, sehingga terwujud

kawasan minapolitan yakni kawasan zona ekonomi terpadu di wilayah pantai di Kabupaten Pamekasan.

#### 5.1.3.2. Arah Kebijakan

Agar sasaran pokok pembangunan di sektor agropolitan dan minapolitan ini dapat diselenggarakan secara maksimal maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah:

- 1) Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mempercepat perkembangan wilayah pedesaan;
- 2) Menyediakan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi yang mampu mendukung pengembangan konsep agropolitan dan minapolitan;
- 3) Meningkatkan akses terhadap aktivitas produksi pertanian, perikanan dan kelautan yang didukung oleh sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kelautan;
- 4) Mengintensifkan sektor pertanian, peremajaan tanaman, serta penerapan prinsip-prinsip agrobisnis agar mampu secara efisien menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi di pasar lokal, nasional atau bahkan di pasar global, serta sebagai bahan baku yang berkualitas untuk proses industri (agro-industri);
- 5) Meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi dan produktivitas serta daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan.

#### 5.1.3.3. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam sektor agropolitan dan minapolitan
2. Meningkatnya kondisi ekonomi atau taraf kesejahteraan masyarakat yang menekuni sektor agropolitan dan minapolitan
3. Semakin berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mempercepat perkembangan wilayah pedesaan

4. Tersedianya prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi yang mampu mendukung pengembangan konsep agropolitan dan minapolitan
5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap aktivitas produksi pertanian, perikanan dan kelautan yang didukung oleh sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kelautan
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta produktivitas dan daya saing, nilai tambah produk di sektor agropolitan maupun minapolitan.

#### 5.1.4. Mengembangkan Infrastruktur Dalam Mendorong Daya Saing Investasi, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan Serta Pengembangan Tata Ruang Sesuai Potensi dan Sumber Daya Daerah

Salah satu prasyarat yang dibutuhkan agar proses pembangunan berlangsung dengan lancar dan wilayah terlepas dari keterbelakangan dan ketertinggalan adalah ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas yang mampu mendukung tumbuhnya investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Ketersediaan infrastruktur pembangunan yang memadai merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dalam rangka mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pengembangan tata ruang sesuai dengan potensi dan sumber daya daerah.

##### 5.1.4.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan untuk mendukung terwujudnya interkoneksi antar kawasan yang ada di Kabupaten Pamekasan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Di samping itu pengembangan infrastruktur juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik bagi pengembangan industri strategis. Apabila pengembangan infrastruktur dapat dilakukan secara optimal maka proses pembangunan yang dilakukan di kabupaten Pamekasan akan mampu mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan wilayah sesuai dengan potensi dan sumber daya daerah yang ada.



Berkaitan dengan misi keempat dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan maka sasaran pokok yang hendak adalah “Terwujudnya/tersedianya infrastruktur yang memadai dalam mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pengembangan tata ruang sesuai potensi dan sumber daya daerah”. Untuk merealisasikan sasaran pokok tersebut maka perlu dilakukan penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi; jalan arteri, angkutan massal, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, jaringan air baku, jaringan air bersih, sanitasi dan sebagainya.

#### 5.1.4.2. Arah Kebijakan

Agar sasaran pokok sebagaimana tersebut diatas dapat dicapai yakni terwujudnya/ tersedianya infrastruktur yang memadai dalam mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pengembangan tata ruang sesuai potensi dan sumber daya daerah maka arah kebijakan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun infrastruktur strategis transportasi darat, laut dan udara yang meliputi; pengembangan jaringan jalan nasional, pengembangan pelabuhan regional, pengembangan dan revitalisasi jalur perkeretaapian, pengembangan terminal dengan berbagai tipe, pengembangan telekomunikasi dengan penyediaan tower;
- 2) Memperluas energi baru dan terbarukan (industry kelistrikan) serta pengembangan kawasan batuan dan mineral non logam dan minyak bumi;

- 3) Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur keseluruhan melalui konsep kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis;
- 4) Mengembangkan infrastruktur yang mendorong pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- 5) Menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan tata ruang sesuai potensi dan sumber daya daerah.

#### 5.1.4.3. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur yang mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan tata ruang sesuai potensi dan sumber daya daerah.
2. Terwujudnya perluasan energi baru dan terbarukan serta pengembangan kawasan batuan dan mineral non logam dan minyak bumi
3. Meningkatnya infrastruktur strategis transportasi darat, laut dan udara yang meliputi; pengembangan jaringan jalan nasional, pengembangan pelabuhan regional, pengembangan dan revitalisasi jalur perkeretaapian, pengembangan terminal dengan berbagai tipe, pengembangan telekomunikasi dengan penyediaan tower
4. Meningkatnya kualitas perumahan bagi seluruh warga kabupaten.
5. Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman kabupaten.
6. Meningkatnya ketersediaan jalan dan sarana perhubungan yang dibutuhkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

5.1.5. Mewujudkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan yang Efektif, Pengurangan Kesenjangan Sosial dan Kesenjangan Antar-Wilayah, Pengembangan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja dan Penyediaan Lapangan Kerja yang Memadai, Serta Memacu Perkembangan UMKM dan Etos Kewirausahaan yang Inovatif dan Mandiri

Apabila disimak lebih seksama sesungguhnya misi kelima dalam pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 sebagaimana telah yang dirumuskan diatas memiliki saling keterkaitan yang sangat kuat. Sebab upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah Kabupaten Pamekasan dapat dilakukan secara maksimal jika permasalahan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja serta pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai akseptor pembangunan ekonomi rakyat dapat direalisasikan. Selama ini diakui atau tidak bahwa permasalahan kemiskinan dan kesenjangan tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal yang dihadapi masyarakat miskin itu sendiri. Masih terbatasnya kesempatan atau lapangan kerja akibat rendahnya investasi yang ada, kondisi ekonomi makro yang kurang kondusif dan fluktuatif serta terbatasnya akses terhadap berbagai aspek dalam membuka dan mengembangkan aktivitas usaha ekonomi mulai dari masalah permodalan, ketersediaan peralatan, produksi, pemasaran dan sebagainya adalah sejumlah problem eksternal yang kerap kali dihadapi oleh keluarga miskin. Sementara itu keterbatasan pendidikan, ketrampilan dan keahlian atau kompetensi tenaga kerja yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri menengah dan besar merupakan kondisi internal yang kerap kali dinilai sebagai kendala keluarga miskin untuk dapat terserap dalam industri formal atau pabrikan.

Diakui bahwa selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, melalui berbagai program yang telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, misalnya dengan terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian berbagai jenis bantuan bahkan juga

membangun infrastruktur di permukiman kumuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, termasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain. Bagi sebagian masyarakat, berbagai bantuan dan program yang telah diupayakan pemerintah memang cukup bermanfaat, tetapi, harus diakui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Memperhatikan kondisi tersebut oleh karenanya melalui perencanaan pembangunan jangka panjang diharapkan dalam proses pembangunan yang terus berjalan eksistensi keluarga miskin dan kesenjangan yang terjadi antar wilayah kian menurun.

Secara teoritik lambatnya perkembangan ekonomi rakyat sesungguhnya juga disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena kurangnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama tanah dan modal. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki surplus pendapatan untuk bisa ditabung bagi pembentukan modal. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok sehari-hari. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi kurang efektif tampaknya adalah berkaitan dengan kurangnya dibangun ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin itu sendiri untuk memberdayakan dirinya. Acap terjadi, kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk miskin justru terjebak menjadi program yang melahirkan ketergantungan baru, dan bahkan mematikan potensi swakarsa lokal. Dalam konteks ini, oleh karenanya perlu dibangun prakarsa baru program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan memandirikan dan memberdayakan komunitas di tingkat lokal untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan menurut kemampuan dan inisiatif mereka sendiri secara terpadu.

Secara teoritik ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan penanggulangan dan memberantas kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu: melakukan pemberdayaan manusia seutuhnya (melalui pendidikan dasar dan jaminan kesehatan), penyebaran dasar-dasar sumber daya dan kemampuan ekonomi (melalui pelatihan, reformasi agrarian

dan akses kredit); serta melakukan kombinasi yang selaras antara campur tangan pemerintah dan mekanisme pasar. Strategi ini diyakini sebagai alternatif solusi yang bisa diagendakan dalam proses pembangunan di berbagai daerah yang berkomitmen menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selanjutnya dalam berbagai kajian juga nampak bahwa salah satu sektor yang mampu berposisi sebagai katup penyelamat kehidupan masyarakat miskin adalah sektor UMKM yang memberikan berbagai kemudahan untuk menyerap tenaga kerja. Memperhatikan peluang dan kesempatan kerja yang luas yang ditawarkan oleh sektor ekonomi UMKM maka adalah sangat beralasan jika dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan memiliki keinginan untuk mendorong dan memacu perkembangan UMKM serta etos kewirausahaan yang inovatif dan mandiri. Dalam proses pembangunan ekonomi kewirausahaan merupakan modal sosial untuk mendorong dan menjaga agar aktivitas perekonomian dan kondisi sektor riil terus berkembang, tetapi di sisi yang lain kewirausahaan juga harus diposisikan sebagai sesuatu tujuan yang harus diwujudkan dan dikembangkan, terutama di kalangan masyarakat luas agar Kabupaten Pamekasan memiliki fondasi SDM yang kuat dalam membangun perekonomian di masa depan. Seorang wirausahawan sesungguhnya adalah seorang inovator revolusioner yang tidak hanya tahu tentang organisasi dan cara produksi, namun karena sifat inovatifnya, ia selalu menciptakan disequilibrium dalam perekonomian yang mendorong dialektika tesis, anti tesis dan sintesis yang berkelanjutan. Kewirausahaan umumnya memiliki karakter antar lain; keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan personal.

Sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 4 Tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, yang dimaksud kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan

efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Seseorang yang memiliki etos kewirausahaan, niscaya mereka tidak akan menjadi pengangguran putus asa atau setengah pengangguran, karena mereka niscaya akan terus terdorong berkreasi dan berkembang secara mandiri meski dalam skala yang mungkin tidak terlampau besar. Di sektor UMKM, masyarakat yang memiliki semangat etos kewirausahaan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan dan mendorong perkembangan UMKM dengan signifikan.

#### 5.1.5.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Selanjutnya berkaitan dengan misi pembangunan jangka panjang kelima yakni mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif, pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar-wilayah, pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta memacu perkembangan UMKM dan etos kewirausahaan yang inovatif dan mandiri maka sasaran pokok pembangunan adalah:

- 1) Terjadinya pengurangan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah yang terjadi;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja kebijakan;
- 3) Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan peningkatan etos kewirausahaan.

#### 5.1.5.2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tersebut diatas maka sesuai dengan sasaran pokok pertama yakni terjadinya pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial serta kesenjangan antar wilayah yang terjadi maka kebijakan diarahkan pada :

- 1) Mendorong pemberdayaan dan pengembangan kegiatan produktif keluarga miskin;

- 2) Mengembangkan diversifikasi usaha bagi masyarakat miskin agar selalu memiliki alternatif dan memiliki keberdayaan yang lebih tinggi;
- 3) Meningkatkan posisi tawar dan mengurangi kerentanan keluarga miskin. Program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogyanya lebih mengedepankan program yang berorientasi pada proses pemberdayaan yang intinya bersifat *people centered*, *participatory empowering* dan *sustainable*;
- 4) Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin; Untuk mencegah agar berbagai kelompok masyarakat miskin tidak menjadi korban tindakan represive, eksploitatif dan intervensi berbagai pihak yang ingin memanfaatkan keberadaan mereka, maka ke depan yang dibutuhkan adalah program perlindungan sosial yang benar-benar efektif;
- 5) Meningkatkan peran lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami penyimpangan dan berjalan secara efektif.

Selanjutnya untuk merealisasikan sasaran pokok kedua yakni terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja maka kebijakan diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme dan daya saing sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Pamekasan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional;
- 2) Mengupayakan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektifitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh dunia industri dan jasa, serta penyediaan tenaga kerja terampil dan professional melalui penyetaraan kualitas baku standar

kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global;

- 3) Menciptakan iklim investasi industri yang kondusif sehingga dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya pada masyarakat.

Untuk merealisasikan sasaran pokok pembangunan yang ketiga yakni terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan peningkatan etos kewirausahaan maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah:

- 1) Peningkatan potensi dan kekuatan ekonomi rakyat, yang diarahkan pada menumbuhkan potensi dan keberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat local. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan dan memantapkan kapasitas kewirausahaan masyarakat serta pengembangan sarana dan pra sarana publik sosial dan ekonomi;
- 2) Peningkatan produktivitas dan inovasi masyarakat dengan memacu peningkatan produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi.

#### 5.1.5.3. Indikator Keberhasilan

1. Semakin menurunnya jumlah penduduk miskin
2. Berkurangnya kesenjangan sosial dan antar wilayah di kabupaten Pamekasan.
3. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja
4. Meningkatnya kesempatan atau lapangan kerja bagi masyarakat miskin
5. Meningkatnya etos kewirausahaan pelaku usaha
6. Meningkatnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam kegiatan produktif khususnya keluarga miskin
7. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja
8. Terwujudnya iklim investasi industri yang kondusif



5.1.6. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Serta Menegakkan Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Transparan, dan Profesional

Upaya untuk mewujudkan misi pembangunan jangka panjang yakni ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain; melalui kebijakan yang berorientasi pada aspek pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban; sistem keamanan dan ketertiban yang terpadu; partisipasi dan tanggung jawab warga kabupaten yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban dan aparat keamanan dan ketertiban yang profesional; Produk hukum yang berkeadilan; penegakkan hukum yang konsisten dan efektif; adanya lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan serta partisipasi dan tanggung jawab warga kabupaten yang tinggi.

5.1.6.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Di era reformasi kebutuhan untuk mewujudkan supremasi hukum yang konsisten, mencerminkan ketertiban dan keadilan, non-diskriminatif, dan menjamin kepastian hukum serta memperoleh legitimasi yang kuat merupakan aktivitas kebijakan yang tidak dapat dihindarkan. Berkaitan dengan misi ini maka sasaran pokok dalam pembangunan di bidang hukum dan ketertiban masyarakat adalah "Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional".

5.1.6.2. Arah Kebijakan

Agar sasaran pokok pembangunan di bidang hukum dan ketertiban ini dapat diselenggarakan secara maksimal maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah:

- 1) Menyusun kebijakan publik yang lebih implementatif dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;

- 2) Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih berkualitas. Agar kinerja dan prosedur aparat yang professional dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat mengalami peningkatan maka ditempuh berbagai cara seperti; intensifikasi upaya pencegahan kejahatan konvensional termasuk kejahatan terorisme, peningkatan kapasitas institusi keamanan, mengurangi potensi konflik horizontal antar masyarakat, dan membangun dan mengembangkan keterpaduan sistem keamanan antarwilayah;
- 3) Menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan;
- 4) Meningkatkan jasa layanan publik di bidang keamanan dan ketertiban agar lebih responsive;
- 5) Melaksanakan revitalisasi dan pembaharuan terhadap peraturan daerah dalam rangka menjamin rasa keadilan masyarakat;
- 6) Melaksanakan Penegakan terhadap peraturan daerah agar mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
- 7) Memperkuat lembaga hukum agar lebih independen, akuntabel dan transparan. Dalam hal ini langkah peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, perbaikan kinerja dan koordinasi antara lembaga hukum dalam penanganan pelanggaran hukum, HAM, dan sesuai dengan perubahan sistem politik, merupakan hal yang penting dilakukan;
- 8) Memberdayakan masyarakat agar melek hukum. Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum menjadi urgen untuk kepentingan peningkatan kontrol masyarakat terhadap integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum.

#### 5.1.6.3. Indikator Keberhasilan

1. Menurunnya angka kejahatan dan kriminalitas.
2. Meningkatnya kepuasan warga kabupaten terhadap pelayanan dalam bidang keamanan dan ketertiban.

3. Meningkatnya penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara swadaya.
4. Meningkatnya produk Peraturan Daerah yang bermanfaat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegakkan hukum.
6. Meningkatnya efektivitas penyelesaian kasus-kasus hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara sesuai asas keadilan.
7. Meningkatnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat

#### 5.1.7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Profesional, Bebas KKN

Salah satu prasyarat penting yang diharapkan mampu menjamin kelancaran proses pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan adalah terwujudnya kinerja birokrasi dan aparatur daerah yang professional. Kinerja birokrasi dan aparat yang professional, amanah dan bersih akan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis secara efektif, efisien dan kontekstual. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu misi yang dirumuskan Kabupaten Pamekasan adalah melakukan reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN. Pembangunan di bidang pemerintahan atau birokrasi ini akan dapat terwujud dan memperoleh hasil yang optimal jika ada dukungan yang positif dari lembaga perangkat daerah. Selain itu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang selalu terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih serta berwibawa merupakan kondisi yang senantiasa dibutuhkan. Sebagai pengabdian masyarakat maka birokrasi diharapkan juga lebih mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan kelompok Berkaitan dengan kondisi tersebut maka kebijakan publik di bidang pemerintahan daerah yang mempertimbangkan kepentingan terbaik rakyat dan dapat diakses oleh warga kabupaten merupakan kebutuhan yang mendesak dilakukan di Kabupaten Pamekasan.

#### 5.1.7.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Memperhatikan kebutuhan sebagaimana tersebut diatas maka sasaran pokok dalam pembangunan di bidang pemerintahan atau birokrasi adalah "Terwujudnya reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN".

#### 5.1.7.2. Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan sasaran pokok tersebut maka ke depan kebijakan dapat diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan kinerja birokrasi dan aparatur pemerintah Kabupaten Pamekasan yang bersih berwibawa dan berorientasi pada kepentingan publik;
- 2) Mengembangkan struktur kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif;
- 3) Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar otonom, transparan, memiliki akuntabilitas yang teruji, dan professional;

#### 5.1.7.3. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya profesionalisme kinerja birokrasi dan lembaga perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat
2. Terselenggaranya pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
3. Menurunnya tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan tata kelola kabupaten.

#### 5.1.8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Benar-Benar Prima, Serta Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Seluruh Lembaga Layanan Publik

Salah satu prasyarat penting yang diharapkan mampu menjamin kelancaran proses pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan adalah terwujudnya kinerja birokrasi dan aparatur daerah yang professional. Kinerja birokrasi dan aparat yang professional, amanah dan bersih akan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah

serta menjawab kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis secara efektif, efisien dan kontekstual. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu misi yang dirumuskan Kabupaten Pamekasan adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik. Pembangunan di bidang pemerintahan atau birokrasi ini akan dapat terwujud dan memperoleh hasil yang optimal jika ada dukungan yang positif dari lembaga perangkat daerah. Selain itu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang selalu terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih serta berwibawa merupakan kondisi yang senantiasa dibutuhkan. Sebagai pengabdian masyarakat maka birokrasi diharapkan juga lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka kebijakan publik di bidang pemerintahan daerah yang mempertimbangkan kepentingan terbaik rakyat dan dapat diakses oleh warga kabupaten merupakan kebutuhan yang mendesak dilakukan di Kabupaten Pamekasan.

#### 5.1.8.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Memperhatikan kebutuhan sebagaimana tersebut di atas maka sasaran pokok dalam pembangunan di bidang pemerintahan atau birokrasi adalah "Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik".

#### 5.1.8.2. Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan sasaran pokok tersebut maka ke depan kebijakan dapat diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor yang dimaksudkan untuk mewujudkan kinerja lembaga dan aparatur birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik;

- 3) Mengembangkan perencanaan program pembangunan dengan melibatkan masyarakat serta mengembangkan potensi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal dan;
- 4) Meningkatkan kerjasama yang sinergis antar daerah dan pemangku kepentingan secara efektif dan efisiensi terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan maupun dalam penanganan berbagai masalah yang melibatkan antar daerah.

#### 5.1.8.3. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, cepat, lancar dan murah serta tidak bersifat diskriminatif;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga kabupaten;
3. Meningkatnya penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam berbagai lembaga layanan publik dan kontrol masyarakat;
4. Meningkatnya akses masyarakat dalam pelayanan publik di segala bidang.

#### 5.1.9. Meningkatkan Keberdayaan dan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Rangka Menyalurkan Aspirasi Sosial-Politiknya, dan Mendorong Perkembangan Kegiatan Ekonomi Kerakyatan Serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Dibangun di Atas Fondasi yang Benar-Benar Kuat.

Sebagaimana dipahami bahwa dalam proses pembangunan seluruh sumber daya manusia memiliki hak untuk berpartisipasi dan mendukung kesuksesan pembangunan yang dilakukan di kabupaten Pamekasan. Seluruh warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk bisa membaca dan menulis, memperoleh kesempatan untuk hidup sehat, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, untuk mendapatkan rumah yang memadai, dan untuk hidup sebagai bangsa yang damai dan aman. Sebagaimana diungkapkan oleh UNDP (1990) bahwa pembangunan manusia ialah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people's choices of people). Melalui pemahaman yang mendalam atas konsep pembangunan manusia, penting kiranya bagi para perencana pembangunan

untuk melihat keseluruhan permasalahan dan kebutuhan pembangunan secara komprehensif, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk terselenggaranya pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Kebijakan yang tepat dalam pembangunan manusia dapat disusun dari mulai proses analisis pembangunan manusia sehingga implikasinya terhadap strategi intervensi dan kebutuhan program-program yang berwawasan pembangunan manusia.

Pembangunan kualitas manusia sebenarnya suatu upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk dapat secara aktif menentukan masa depannya, baik melalui perbaikan sistem pendidikan, kualitas layanan kesehatan dan berbagai layanan social yang lain. Kapasitas ini mencakup lima aspek yakni: kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kekuasaan, dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, keberlanjutan, dan kesadaran akan interdependensi antar manusia dan lingkungannya. Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya adalah upaya untuk mengembangkan inisiatif dan kreatifitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan yang utama dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Seiring dengan uraian diatas maka pembangunan sesungguhnya merupakan keterpaduan aspek fisik dan ekonomi serta menempatkan manusia sebagai subjek yang utama. Dalam konteks ini, warga masyarakat benar-benar ditempatkan sebagai titik pusat dari segenap gerak pembangunan, sekaligus pula sebagai modal dasar, faktor dominan serta sasaran utama. Dengan mendasarkan diri pada pemikiran tersebut diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan tidak akan berjalan timpang dan melahirkan berbagai kesenjangan, tetapi justru akan menciptakan kesejahteraan dan pemerataan serta keadilan bagi masyarakat sesuai dengan misi yang diemban dalam pembangunan jangka panjang 2005-2025.

#### 5.1.9.1. Sasaran Pokok Pembangunan

Salah satu prasyarat agar subyek dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan adalah adanya upaya untuk meningkatkan kadar keberdayaan

dan partisipasi aktif dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya. Keberdayaan masyarakat tidak hanya penting untuk menyalurkan aspirasi sosial politiknya, tetapi yang juga lebih strategis adalah mereka dapat turut berkiprah dan ambil bagian dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu pemberdayaan masyarakat di bidang hukum juga penting terutama untuk kepentingan melakukan kontrol terhadap integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum serta proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hari pembangunan. Untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kontrol, peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan perubahan sistem politik yang mendukung upaya penegakan hukum yang benar-benar konsisten.

Di samping menyangkut problematika sosial politik keberdayaan dan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mengembangkan aktivitas ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dirumuskan dalam misi terakhir dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang ini yakni meningkatkan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas fondasi yang benar-benar kuat maka sasaran pokok pembangunan meliputi:

- 1) Terwujudnya peningkatan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya;
- 2) Terciptanya kondisi perekonomian rakyat dan pelaku ekonomi rakyat yang maju, kuat, mandiri dan adil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### 5.1.9.2. Arah Kebijakan

Sebagaimana dipahami bahwa dalam konteks kehidupan sosial politik memang peningkatan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya merupakan kebutuhan



masyarakat di era reformasi dan otonomi daerah. Penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut hak, kewajiban, dan etika warga seolah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dewasa ini. Arah kebijakan dari sasaran pertama adalah:

- 1) Mengembangkan hak, kewajiban dan etika serta kedewasaan sikap politik masyarakat;
- 2) Mengembangkan berbagai saluran komunikasi politik bagi masyarakat;
- 3) Menyediakan media komunikasi politik yang diarahkan pada upaya mewujudkan media komunikasi politik yang transparan antara masyarakat dan pemerintah;
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.

Sementara itu arah kebijakan bagi sasaran kedua adalah:

- 1) Meningkatkan peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam ekonomi kerakyatan tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator ekonomi kerakyatan;
- 2) Meningkatkan potensi ekonomi lokal dengan mengembangkan dan memantapkan kapasitas kewirausahaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kekuatan ekonomi;
- 4) Meningkatkan produktifitas dan inovasi para pelaku ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pamekasan;
- 5) Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah;
- 6) Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah;
- 7) Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan diluar APBD.

#### 5.1.9.3. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi sosial politik;

2. Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola kabupaten, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan;
3. Semakin berkembangnya saluran komunikasi politik dan media komunikasi politik bagi masyarakat;
4. Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatnya semangat kewirausahaan pelaku usaha ekonomi kerakyatan;
6. Meningkatnya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kekuatan ekonomi;
7. Meningkatnya produktifitas dan inovasi para pelaku ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pamekasan;
8. Meningkatnya pelayanan publik;
9. Menurunnya kerugian negara;
10. Meningkatnya pendapatan asli daerah; serta
11. Meningkatnya peranan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

#### 5.2. Tahapan dan Prioritas

Selaras dengan kebutuhan masyarakat, masukan dari seluruh stakeholder, mempertimbangkan aspirasi sosial-politik masyarakat, dan didukung komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, maka visi dan misi yang ditetapkan sebagai acuan dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 adalah: Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT”

Untuk mewujudkan Visi dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan serta sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, secara garis besar, Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan Ridho Allah SWT dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya;

- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan prinsip non-diskriminatif;
- 3) Meningkatkan perekonomian berbasis pada agropolitan dan minapolitan serta mendorong pengembangan potensi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan;
- 4) Mengembangkan infrastruktur dalam mendorong daya saing investasi, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta pengembangan tata ruang sesuai potensi dan sumber daya daerah;
- 5) Mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif, pengurangan kesenjangan sosial dan kesenjangan antar-wilayah, pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta memacu perkembangan UMKM dan etos kewirausahaan yang inovatif dan mandiri;
- 6) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional;
- 7) Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima, serta penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh lembaga layanan publik;
- 8) Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi sosial-politiknya, dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas fondasi yang benar-benar kuat.

Perwujudan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pamekasan dilaksanakan secara bertahap dengan skala prioritas tertentu yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan pokok yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

Oleh karenanya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun semua urgensi saling terkait secara utuh dan bersifat berkesinambungan dari tahapan ke tahapan berikutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025 .

#### 5.2.1. Tahapan Lima Tahun Ke-1

Pada tahapan lima tahun pertama sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pamekasan, di arahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kemampuan dan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan peningkatan pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik. Tahapan lima tahun pertama ini merupakan tahap persiapan pembentukan modal dasar pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025. Oleh karenanya kebijakan pembangunan akan diarahkan pada;

- 1) Meningkatkan standar hidup dan meningkatkan kapabilitas penduduk melalui penyediaan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, yang dapat diakses secara mudah dan terjangkau oleh seluruh masyarakat;
- 2) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dapat mendukung investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor agropolitan dan minapolitan . Sebagaimana dipahami bahwa investasi dan aktivitas ekonomi suatu daerah akan berkembang jika tersedia infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai. Dalam konteks ini infrastruktur mencakup infrastruktur fisik dan nonfisik. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan, perangkat-perangkat sumber daya manusia, serta penataan kelembagaan pemerintah agar mampu berfungsi secara optimal dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan secara efisien dan efektif;

- 3) Meningkatkan pembangunan keagamaan juga diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan Ridho Allah SWT dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya;
- 4) Mengembangkan asuransi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang diarahkan bukan hanya pada program-program bantuan yang bersifat karitatif, tetapi juga pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan. Asuransi sosial dalam konteks ini dimaknakan sebagai program bantuan yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan warga masyarakat miskin dalam jangka lebih panjang, dan bukan sekadar program darurat yang bersifat karitatif dan habis seketika untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Oleh sebab itu kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap berbagai asset dan sumber daya yang tersedia, seperti jaringan sosial, modal, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

#### 5.2.2. Tahapan Lima Tahun Ke-2

Pada tahapan lima tahun kedua, pembangunan di Kabupaten Pamekasan sasaran pokok di arahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Untuk merealisasikan sasaran pokok tersebut maka dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar, melalui peningkatan aksesibilitas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan, sehingga kualitas dan distribusi pelayanan yang tersedia menjadi semakin baik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi semakin berkualitas,

sehingga sumberdaya pembangunan yang dimiliki pemerintah juga semakin meningkat;

- 2) Meningkatkan akses masyarakat dan pemerataan terhadap pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan sampai ke daerah-daerah perdesaan pelosok dan terpencil maupun masyarakat miskin;
- 3) Mengembangkan potensi ekonomi yang memfokuskan pada bidang-bidang yang diharapkan akan mampu memberikan impact ekonomi yang kuat dan luas pada pembangunan ekonomi terutama dalam pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian dalam tahap kedua pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pamekasan;
- 5) Menangani masalah pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan;
- 6) Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan;
- 7) Meningkatkan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Keberdayaan perempuan akan terlihat jelas dari berkembangnya aspirasi wanita dan kemampuannya dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan peningkatan peran wanita dalam kegiatan sosial, maupun ekonomi produktif, serta terbentuknya berbagai kelompok kegiatan sosial wanita dan unit-unit usaha ekonomi produktif.

### 5.2.3. Tahapan Lima Tahun Ke-3

Pada tahapan lima tahun ketiga ini sasaran pokok pembangunan adalah terwujudnya pengembangan perekonomian rakyat, peningkatan sumber daya

manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien. Agar sasaran pokok pembangunan tersebut dapat dicapai secara optimal maka dibutuhkan berbagai kebijakan yang diarahkan pada:

- 1) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berkualitas yang mendukung perkembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki daya saing baik pada pasar local, regional, nasional maupun pasar internasional;
- 3) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa baik dalam semua aspek kehidupan. Supremasi hukum dan penegakan keadilan perlu mendapatkan perhatian agar pembangunan di bidang hukum dapat diwujudkan secara nyata;
- 4) Mengembangkan SDM yang berkualitas dan professional merupakan bekal pokok dalam upaya menciptakan lembaga pemerintahan yang efektif dan efisien. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi sangat strategis dalam upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek atau aktor pembangunan;
- 5) Mengembangkan kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan dengan disertai oleh pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pembangunan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang sensitif gender, pengembangan program pembangunan berbasis pada komunitas lokal dan nilai-nilai keagamaan, pengembangan program asuransi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta program pemberdayaan kontrol dan prakarsa masyarakat lokal;
- 6) Meningkatkan pelayanan dan akses di sector pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas serta menganut prinsip non diskriminatif;
- 7) Menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah serta dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial yang memfokuskan pada sektor agropolitan dan minapolitan.

#### 5.2.4. Tahap Lima Tahun Ke-4

Pada tahapan lima tahun terakhir dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan pembangunan maka sasaran pokok yang akan dicapai adalah tahapan pemantapan yakni peningkatan akselerasi pembangunan dan penyempurnaan terhadap perjalanan pembangunan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Langkah ini perlu dilakukan guna mengantisipasi adanya agenda pembangunan yang masih belum diperhatikan pada tahapan sebelumnya sementara kebijakan pembangunan tersebut sangat urgen dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025. Kendati fokus perhatian pada tahap terakhir permbangunan jangka panjang lebih pada aspek penyempurnaan tetapi dalam tahapan ini pembangunan juga diarahkan pada berberapa agenda penting yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan sebagaimana telah dicanangkan.

Agar sasaran pokok pada tahapan lima tahun terakhir ini terealisasi dengan baik maka kebijakan diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan akselerasi atau percepatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Pamekasan yang kuat dan mandiri yang mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan baik lahir maupun batin;
- 2) Meningkatkan pembangunan agama agar peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama dapat diwujudkan merupakan langkah yang harus dilakukan pada tahapan ini. Melalui peningkatan pelayanan dan pemahaman agama yang baik diharapkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat sesuai petunjuk dan ridho Allah SWT juga akan mengalami peningkatan dengan cara menjalankan dan memenuhi kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya. Di samping itu dalam proses pembangunan agama peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang dapat mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat juga perlu senantiasa didorong agar ketentraman dan kedamaian dapat direalisasikan. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat



yang memiliki kesadaran berkait dengan realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis;

- 3) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan aparat birokrasi pemerintah yang lebih profesional, bersih dan berwibawa. Dengan kondisi kelembagaan dan aparat yang professional dan berwibawa diharapkan ke depan akan mampu merespon kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan publik secara optimal. Birokrasi pemerintahan diharapkan juga lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. Terwujudnya pranata kehidupan bernegara, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa merupakan kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan jangka panjang;
- 4) Penguatan sektor ekonomi yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya kondisi ekonomi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan dalam dimensi ekonomi merupakan cita-cita bersama yang harus diwujudkan;
- 5) Menyediakan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan senantiasa harus mendapat perhatian pemerintah mengingat sektor ini merupakan sector penentu IPM (Indeks Pembangunan Manusia);
- 6) Menyediakan SPM (standar pelayanan minimal) di seluruh bidang pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya SPM maka pelayanan terhadap publik yang diberikan menjadi semakin profesional, transparan dan akuntabel;

- 7) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, akses serta fungsi kontrol atas fasilitas-fasilitas pelayanan kebutuhan sosial dasar tersebut;
- 8) Meningkatkan pembangunan di bidang hukum yang difokuskan pada perwujudan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat;
- 9) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Upaya mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban merupakan cita-cita bersama yang harus direalisasikan sebab dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap akan dapat menciptakan kenyamanan seluruh warga masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Akhirnya melalui berbagai ihktiar yang dilakukan melalui proses pembangunan dan tahap pembangunan setiap lima tahunan diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan 2005-2025 yakni Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT dapat benar-benar dicapai(\*)).

## **BAB VI**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 pada dasarnya adalah penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Untuk memastikan penjabaran visi-misi dan arah kebijakan pembangunan benar-benar tepat dan efektif, karena itu yang dibutuhkan adalah langkah-langkah pelaksanaan dan evaluasi hasil dari program pembangunan yang benar-benar konsisten, bertahap, dan berkelanjutan.

Pembangunan yang dikembangkan secara accidental dan direncanakan secara reaktif, niscaya hasilnya tidak akan pernah maksimal dan tidak menjadi fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program serta arah pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pembangunan yang dikembangkan di Kabupaten Pamekasan selama 20 tahun ke depan, disadari sejak awal adalah proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang jelas dan terukur. Pembangunan yang direncanakan dan dikembangkan di Kabupaten Pamekasan sesungguhnya adalah sebuah proses sekaligus rangkaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sinergis satu dengan yang lain, sehingga dapat dihasilkan keterpaduan dan daya ungkit, serta dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan semua program pembangunan daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget frame), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram maupun dalam satu dinas dan antardinas, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pelaksanaan semua program pembangunan daerah juga mensyaratkan penting konsistensi dan keberlanjutan program, sehingga efek yang ditimbulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan, fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu yang menentukan strategi, dan arah jangka panjang pembangunan yang ingin dicapai atau diwujudkan. Dengan kata lain,

RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan 2006-2010, RPJMD Kabupaten Pamekasan 2011-2015, dan seterusnya hingga kurun waktu 20 tahun ke depan. Siapa pun Kepala Daerah yang terpilih, semua seyogyanya memanfaatkan dan mengacu pada arah kebijakan serta program pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan agar dapat dicapai hasil yang diharapkan.

Dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ini diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pembangunan daerah tidak berjalan terputus-putus, melainkan dapat berlangsung bertahap, di mana kinerja pembangunan yang berhasil dicapai pada setiap tahap lima tahunan akan dapat berfungsi sebagai fondasi sekaligus modal bagi pelaksanaan dan kinerja pembangunan daerah di tahap berikutnya hingga tercapai visi-misi pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan. Disadari bahwa di era otonomi daerah, sering terjadi Kepala Daerah terpilih lebih berorientasi pada program dan hasil program pembangunan jangka pendek sebatas pada periode 5 tahun kepemimpinan di mana mereka terpilih. Arah dan kebijakan pembangunan yang pragmatis dan hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek kini, niscaya akan menyebabkan pembangunan jangka panjang yang dikembangkan menjadi kurang focus, bahkan tidak menentu kemana arah yang hendak dicapai.

#### 6.1. KAIDAH

RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan

program-program pembangunan daerah yang terencana dan berkesinambungan.

2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan berkewajiban menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Satuan Kerja pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pamekasan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Bupati-Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dinas-dinas, badan-badan, bagian, kantor-kantor dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin kontinuitas serta konsistensi antara Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan selama 4 periode lima tahunan, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Pamekasan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Pamekasan.
5. Dalam kondisi tertentu, ketika di masyarakat muncul problema atau permasalahan sosial-ekonomi yang mungkin berada di luar isu prioritas yang ditangani melalui program-program yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025, namun memiliki relevansi dan signifikansi yang bisa menimbulkan dampak merugikan yang serius bagi masyarakat, maka tetap dibuka kemungkinan memasukkan dan merevisi program jangka panjang yang telah dirumuskan. Menterjemahkan RPJPD ke dalam RPJMD seyogyanya tetap memperhatikan perkembangan isu-isu

terbaru yang muncul di masyarakat, sehingga program yang dirumuskan tetap kontekstual dan relevan.

## 6.2. Langkah Pelaksanaan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025, secara garis besar ada tiga prinsip mendasar yang harus dilaksanakan.

Pertama, secara konsisten pimpinan daerah yang terpilih, termasuk SKPD dan stakeholder yang ada harus memiliki kemampuan dan kreativitas untuk menterjemahkan visi-misi, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pamekasan 2005-2025 ke dalam program, terutama program pembangunan yang merupakan inisiatif daerah. Meski dalam RPJPD telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah setiap tahap lima tahunan, tetapi dalam implementasinya tetap harus mempertimbangkan dinamika perkembangan dan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, program pembangunan yang dikembangkan dalam kurun waktu lima tahunan maupun program pembangunan setiap tahunnya, seyogianya tetap mengacu kepada rujukan data terbaru yang ada, dan harus menghindari kemungkinan terjadinya bias kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.

Kedua, dalam melaksanakan seluruh program pembangunan daerah, seluruh SKPD dan stakeholder terkait harus lebih mengedepankan pada efektifitas capaian hasil pada kelompok sasaran yang telah ditetapkan daripada berorientasi pada hasil-hasil yang sifatnya kuantitatif-administratif, namun tidak memiliki signifikansi dan manfaat yang benar-benar nyata bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program.

Ketiga, secara konsisten melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam RPJPD dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, tiga pilar Good Governance yang mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan adalah : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder.

Di era perkembangan masyarakat yang makin demokratis, transparansi dibutuhkan sebagai bagian dari keterbukaan aparatur pemerintahan dalam menerima berbagai masukan, kritik yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. Transparansi di sini adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya objektivitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dan bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanaan, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan. Akutabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya di mata rakyat.

Sementara itu, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek pembangunan belaka, melainkan merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang setral, strategis dan penting. Dalam paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat atau sentral pembangunan, maka partisipasi mutlak dikembangkan sebagai wahana bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan program yang bersifat bottom-up planning, terlibat dalam pelaksanaan program agar tumbuh sense of belonging, dan terlibat dalam proses pengawasan serta evaluasi program agar dapat dikembangkan mekanisme kontrol yang efektif dalam berbagai level pelaksanaan program.

Tiga pilar Good Governance sebagaimana dikemukakan di atas, adalah "spirit" yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku-kepentingan di Kabupaten Pamekasan dan stakeholder terkait untuk menjamin berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan, yakni mewujudkan : "Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT". Pembangunan, bagaimana pun tidak akan pernah mampu memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi rakyat jika dalam pelaksanaannya tidak dibarengi dengan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada (\*).

Pamekasan, 31 - Oktober - 2013

BUPATI PAMEKASAN

ACHMAD SYAFII



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri dkk., 2008. *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia, Badai Pasti Berlalu?* Yogyakarta: Kanisius.
- Bryant, Coralie & Louise G. White, 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Solikin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Christina, dkk., 2001. *Jaman Daulat Rakyat: Dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.
- Chambers, Robert, 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES.
- Dillon, HS., dan Hermanto, 1993. *Kemiskinan di Negara Berkembang: Masalah Konseptual dan Global*, Prisma No.3 Th. XII/1993, LP3ES Jakarta hal. 11-21.
- Fakih, Mansour, 2003. *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist Press.
- Grand, Guy, 1983. *Development by People*, Praeger Special Studies, Praeger Publishers USA.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Korten, D.C., dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karim, Abdul Gaffar (ed.), 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lewis, John P. dan Valerian Kallab (penyunting), 1987. *Mengkaji Ulang Strategi-strategi Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mudrajad Kuncoro, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Rachbini, Didik, J., 1995. *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Prayitno, Hadi dan Arsyad Lincoln, 1987. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho, 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media.

Sherraden, Michael, 2006. *Aset Untuk Orang Miskin, Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali Press.

Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Rakyat*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sen, Amartya, 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred a. Knoff, Inc.

Yustika, Ahmad Erani, 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yustika, Ahmad Erani, 2007. *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Pasca Krisis*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Wie, Thee Kian. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES.

Walsh, Thomas & Harry Wibowo (Penyunting), 2003. *Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis, Bunga Rampai Makalah Terpilih Konferensi INFID 2002*. Jakarta: INFID.

Waidl, Abdul, Arie Sudjito & Sugeng Bahagijo (eds.), 2008. *Mendahulukan si Miskin, Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: Lkis.

Waidl, Abdul, Yuna Farhan & Diding Sakri (eds.), 2009. *Anggaran Pro Kaum Miskin, Upaya Mensejahterakan Masyarakat*. Jakarta: Prakarsa dan LP3ES.

\_\_\_\_\_, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014*. Bappeprop Jawa Timur.

\_\_\_\_\_, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009*. Bappenas, 2005.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BERDASARKAN ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

NO.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2005	2010	2015	2020	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>						
<b>I.</b>	<b>KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>					
<b>1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1	Pertumbuhan PDRB ADHB (juta rupiah)	2.692.558,35	4.916.530,99	7.140.503,63	9.364.476,27	11.588.448,91
1.2	Pertumbuhan PDRB ADHK (juta rupiah)	1.690.040,76	2.172.261,91	2.654.483,06	3.136.704,21	3.618.925,36
1.3	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,48	5,75	7,02	8,29	9,56
1.4	Laju inflasi (%)	8,15	6,02	5,52	5,02	4,52
1.5	PDRB per kapita (Juta Rp.)	3.503.257,74	6.177.594,53	8.851.931,32	11.526.268,11	14.200.604,90
1.6	Angka Kemiskinan (%)	31,7	20,94	19,84	16,54	12,20
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,42	3,53	2,42	1,62	0,69
1.8	Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) (%)	61,19	64,60	67,75	71,13	74,51
<b>II.</b>	<b>KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>					
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>					
1.1	Angka melek huruf (%)	80	85	90	95	100
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	6	9	12	12	12
1.3	Angka partisipasi kasar (APK)					
	Ø APK SD/MI/Paket A (%)	100	104	110	120	130
	Ø APK SMP/MTs/Paket B (%)	92	94	98	110	120
	Ø APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	80	80	95	100	110
1.4	Angka partisipasi Murni (APM)					
	Ø APM SD/MI/Paket A (%)	95	98	100	120	125
	Ø APM SMP/MTs/Paket B (%)	90	84	90	98	110
	APM SMA/SMK/MA/Paket C (%)	74	75	90	95	100
1.5	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6	12	15	20	25

1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>					
2.1	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran (0/00)	4,14	8,71	23	23	23
2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran (0/00)	108,96	17	102	102	102
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran (0/00)	0,5	0,85	32	32	32
2.4	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	62,17	63,99	65,58	67,28	68,98
2.5	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	-	2,47	1,97	1,47	0,97
2.6	Penduduk Yang Menggunakan Jamban (%)	43,3	53,79	70	75	80
2.7	Rumah Tangga yang Berperilaku Bersih dan Sehat (%)	-	7	16	30	45
2.8	Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (%)	-	32	130	160	189
<b>3.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>					
3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	69,72	74,72	79,72	84,72	89,72
<b>III.</b>	<b>SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA</b>					
<b>1.</b>	<b>Kebudayaan</b>					
1.1	Jumlah grup kesenian/sanggar seni (buah)	120	145	170	195	220
<b>2.</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>					
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	17	17	17	17	17
2.1	Jumlah gedung olahraga (unit)	2	2	2	2	2
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN URUSAN WAJIB</b>					
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Pendidikan dasar SD/MI :</b>					
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah (%)	-	50	100	100	100
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (%)	0,73	0,82	0,88	0,92	0,96
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid (%)	8,35	10,35	12,35	14,35	16,35
1.1.4	Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	-	63	70	85	98
1.1.5	Angka partisipasi murni dan paket A (%)	96	98	100	105	110
1.1.6	Angka partisipasi kasar (%)	101	104	105	108	111
1.1.7	Rasio Kelompok pemukiman permanen yang dilayani	0,7	0,7	0,85	0,9	1

1	2	3	4	5	6	7
	SD/MI dalam jarak kurang dari 3 KM (%)					
1.1.8	Rasio SD/MI memiliki 1 guru untuk setiap 32 peserta didik	1:30	1:28	1:30	1:32	1:35
1.1.9	Rasio SD/MI memiliki 6 guru (%)	1,6	1,5	1,5	1,2	1
1.1.10	Rasio SD/MI memiliki 2 guru dengankualifikasi akademik S1 dan D-IV (%)	0,9	0,9	0,7	0,5	0,3
1.1.11	Rasio SD/MI memiliki 2 guru yang telah lulus sertifikasi (%)	-	1	0,8	0,5	0,4
1.1.12	Rasio kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%)	-	1	0,9	0,7	0,5
1.1.13	Rasio Pengawas SD/MI berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%)	-	1,2	1	0,8	0,6
1.1.14	Rasio SD/MI yang mendapat kunjungan pengawas satu kali sebulan dan tiap kunjungan dilakukan lebih dari 3 jam untuk supervise dan pembinaan (%)	1	1	0,8	0,6	0,4
1.1.15	Rasio siswa dijenjang SD/MI/paket A terhadap penduduk usia 7-12 Tahun SMP/MTs (%)	0,98	0,97	0,80	0,70	0,50
1.1.16	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%)	80	90	100	100	100
1.1.17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs (%)	0,6	0,62	0,72	0,77	0,82
1.1.18	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs (%)	10,54	11,54	15,69	18,94	22,19
1.1.19	Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	-	70%	85%	98%	100%
1.1.20	Angka partisipasi kasar dan paket B (%)	93	94,22	96	100	110
1.1.21	Angka partisipasi murni (%)	82	84	86	90	98
1.1.22	Rasio Kelompok pemukiman permanen yang dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 KM (%)	100	100	100	100	100
1.1.23	Rasio SMP/MTs memiliki 1 guru untuk setiap mata pelajaran (%)	100	100	100	100	100
1.1.24	Rasio SMP/MTs memiliki guru berkualifikasi akademik S1 dan D-IV lebih dari 70 (%)	100	100	100	100	100
1.1.25	Rasio SMP/MTs dengan guru berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan memiliki sertifikat lebih dari 35 (%)	-	80	90	100	100
1.1.26	Rasio SMP/MTs dengan guru berkualifikasi akademik S1 dan D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing	-	80	80	100	100

1	2	3	4	5	6	7
	satu orang untuk mata pelajaran BI, MTK, IPA dan bahasa Inggris (%)					
1.1.27	Rasio kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki memiliki sertifikasi pendidik (%)	-	100	100	100	100
1.1.28	Rasio SMP/MTs yang mendapat kunjungan pengawas satu kali sebulan dan tiap kunjungan dilakukan lebih dari 3 jam untuk supervise dan pembinaan (%)	100	100	100	100	100
1.1.29	Rasio siswa dijenjang SMP/MTs/paket B terhadap penduduk usia 13-15 Tahun (%)	50	70	80	97	98
1.1.30	Rasio siswa tingkat I dijenjang SMP/MTs (%)	80	90	100	100	100
<b>1.2.</b>	<b>Pendidikan menengah</b>					
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah (%)	80	90,0	91,5	100	100
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA (%)	0,25	0,27	0,47	0,67	0,87
1.2.3	Rasio guru terhadap murid (%)	7,28	10,01	12,74	13,74	14,74
1.2.4	Prosentase guru SMA/SMAL B/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	-	60	80	90	100
1.2.5	Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan e-pembelajaran (e- learning) (%)	60	71	80	90	100
1.2.6	Prosentase APK PLB setara SMALB (%)	72	76	80	85	95
1.2.7	Angka partisipasi kasar (%)	75	80	85	90	100
1.2.8	Angka partisipasi murni (%)	71	75	80	85	90
<b>1.3</b>	<b>Fasilitas pendidikan</b>					
1.3.1	Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik (%)	65	68	75	80	90
1.3.2	Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik (%)	58	65	70	78	85
1.3.4	Ruang Kelas SMK/SMK/MA Dalam Kondisi Baik (%)	60	63	71	82	95
1.3.5	Prosentase SD/SMP yang memiliki Komputer dan Bisa di gunakan siswa untuk akses internet (%)	20	25	42	50	70
1.3.6	Rasio SD/MI yang rombongan belajarnya tidak melebihi 32 siswa	1:25	1:28	1:30	1:32	1:35
1.3.7	Rasio SMP/MTs yang rombongan belajarnya tidak	1	1,2	1,5	1,5	1,6

1	2	3	4	5	6	7
	melebihi 36 siswa (%)					
1.3.8	Rasio SMP/MTs yang memenuhi meja, kursi serta papan tulis untuk setiap rombongan belajarnya (%)	30	50	70	80	90
1.3.9	Rasio SMP/MTs yang memiliki ruang lap. IPA dengan meja kursi untuk 36 siswa (%)	40	50	80	100	100
1.3.10	Rasio SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan IPA (%)	50	70	80	100	100
1.3.11	Rasio SD/MI memiliki ruang guru, meja dan kursi untuk guru, kepala sekolah dan staff (%)	60	70	100	100	100
1.3.12	Rasio SMP/MTs memiliki ruang kepala sekolah terpisah dengan ruang guru (%)	40	60	80	100	100
1.3.13	Rasio SD/MI yang memiliki set alat peraga dan bahan IPA secara lengkap (%)	60	60	80	100	100
1.3.14	Rasio SD/MI yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi (%)	60	70	80	95	100
<b>1.4</b>	<b>Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)</b>					
1.4.1	APK PAUD (%)	45	58	65	75	85
1.4.2	APK TK (%)	67	76	80	88	95
<b>1.5</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>					
1.5.1	SD/MI (%)	0,6	0,5	0,4	0,1	0
1.5.2	SMP/MTs (%)	1	0,1	0,01	0,01	0
1.5.3	SMA/SMK/MA (%)	0,1	0,01	0,01	0	0
<b>1.6</b>	<b>Angka kelulusan</b>					
1.6.1	SD/MI (%)	92	95	96	98	100
1.6.2	SMP/MTs (%)	91	98	99	100	100
1.6.3	SMA/SMK/MA (%)	93	99	100	100	100
<b>1.7</b>	<b>Nilai Rata-rata Ujian Nasional</b>					
1.7.1	SD/MI (%)	8,5	9,56	9,6	9,65	9,78
1.7.2	SMP/MTs (%)	8,23	9,25	9,32	9,42	9,56
1.7.3	SMA/SMK/MA (%)	8,01	9,1	9,23	9,46	9,84

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8</b>	<b>Guru Bersertifikasi</b>					
1.8.1	SD/MI (%)	0	63	70	85	98
1.8.2	SMP/MTs (%)	0	70	85	98	100
1.8.3	SMA/SMK/MA (%)	0	60	80	90	100
<b>1.9</b>	<b>Sekolah yang Memiliki Akreditasi Minimal B</b>					
1.9.1	SD/MI (%)	70	85	87	90	95
1.9.2	SMP/MTs (%)	65	71	75	80	91
1.9.3	SMA/SMK/MA (%)	60	68	79	85	94
<b>1.10</b>	<b>Angka Melek huruf usia 15-24 tahun (%)</b>					
1.11	Rasio APM perempuan terhadap Laki-laki pada semua jenjang pendidikan (%)	60	70	80	90	95
1.12	Rasio melek huruf perempuan terhadap Laki-laki pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi (%)	64	67	70	83	91
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>					
2.1	Rasio posyandu per satuan balita (%)	778	778	878	878	878
2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk (%)	0,03	0,03	0,023	0,022	0,021
2.3	Rasio pustu per satuan penduduk (%)	0,065	0,060	0,055	0,052	0,05
2.4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk (%)	0,010	0,007	0,0035	0,0033	0,0031
2.5	Rasio dokter per satuan penduduk (%)	-	0,55	0,061	0,057	0,54
2.6	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (%)	-	0,47	0,57	0,54	0,54
2.7	Prosentase Gizi kurang pada balita (%)	-	13,23	15	15	15
2.8	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (%)	108,96	17	102	102	102
2.9	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (%)	109,54	17	102	102	102
2.10	Prosentase Gizi Buruk pada Balita (%)	1,34	2,47	3,60	3,60	3,60
2.11	Cakupan penemuan dan Perawatan TBC (%)	93	94	95	95	95
2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100
2.13	Penderita DBD yang ditangani (%)	56,12	70,56	85,00	95,00	100
2.14	Kunjungan Puskesmas (%)	10	15	25	30	35
2.15	Cakupan kunjungan Ibu Hamil ke Puskesmas (%)	84,6	94,96	95	95	95
2.16	Cakupan Pelayanan anak Balita (%)	-	71,95	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7
2.17	Cakupan Desa Siaga aktif (%)	58,73	58,73	80,00	100	100
2.18	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup (%)	0,5	0,85	32	32	32
2.19	Anak usia 0-1 tahun yang di Imunisasi Campak (%)	12,32	12,32	100	100	100
2.20	Prosentase kelahiran yang ditolong tenaga Medis (%)	84,6	91,2	95	95	95
2.21	Prevalensi TBC per 100.000 penduduk (0/0000)	113	113	125	140	150
2.22	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani (kasus)	42	46	80	80	80
2.23	Jumlah Linakes (unit)	80	91	95	95	95
2.24	Jumlah Pelayanan nifas (orang)	33	84	95	95	95
2.25	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani (kasus)	41	43	95	95	95
2.26	Jumlah kunjungan bayi (kali)	61	87	90	90	90
2.27	Jumlah desa UCI (desa)	74	74	100	100	100
2.28	Jumlah pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100
2.29	Cakupan penderita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
2.30	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100	100	100	100
2.31	Penemuan Penderita AFP (kasus)	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
2.32	Penemuan dan penangan penderita pneumonia balita (%)	50	60	100	100	100
2.33	Penemuan dan penangan pasien baru TB BTA positif (%)	50	65	90	91	92
2.34	Penemuan dan Penangan DBD (%)	100	100	100	100	100
2.35	Penemuan penderita diare (%)	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin (%)	-	100	100	100	100
2.37	Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan (%)	100	100	100	100	100
2.38	Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam (%)	≥ 75	≥ 85	100	100	100
2.39	Cakupan pelayanan kesehatan remaja (%)	75	80	90	93	95
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>					
3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	561.356	651.255	690.330	731.749	775.653
3.2	Panjang Jaringan Irigasi (Ha)	3.828	3.828	3.878	3.928	3.978
3.3	Proporsi Jembatan Dalam Keadaan Baik (%)	70	75	80	85	90
3.4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	389.529	454.883	484.863	514.500	545.359
3.5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran	17,45	19,85	22,25	27,25	32,25

1	2	3	4	5	6	7
	pembuangan air (Km)					
3.6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)	34.900	39.700	44.500	54.500	64.500
3.7	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	3.062	3.062	3.102	3.142	3.182
3.8	Panjang jalan Kabupaten yang bias dilalui Kendaraan roda 4 (Km)	487.444	497.269	512.359	529.359	545.359
3.9	Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari (%)	40	50	60	70	80
3.10	Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian Rakyat Pada system irigasi yang ada (%)	30	35	40	45	50
3.11	Rasio ketersediaan Jalan yang menghubungkan Pusat-pusat kegiatan (%)	60	70	80	90	100
<b>4.</b>	<b>Perumahan</b>					
4.1	Proporsi Rumah Tangga Yang mendapat sumber air bersih per jumlah Rumah Tangga (%)	-	20	25	30	35
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (Unit)	98.873	118.678	138.483	158.288	178.093
4.3	Proporsi Rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi yang layak (%)	-	25	30	35	40
4.4	Proporsi Rumah sehat (%)	-	5	10	15	20
4.5	cakupan lingkungan Permukiman sehat dan aman yang di dukung dengan PSU (%)	-	10	15	20	25
4.6	Lingkungan Pemukiman (Ha)	-	27.720	28.423	29.133	29.861
4.7	Proporsi Cakupan Pelayanan PDAM per jumlah Rumah tangga (%)	35	40	50	60	65
4.8	Tersedianya drainase skala kawasan daan skala kota (%)	70	75	80	85	90
4.9	Tersedianya pedoman Harga standard bangunan gedung Negara (%)	100	100	100	100	100
4.10	Penerbitan IUJK 10 hari setelah persyaratan lengkap (lembar)	-	282	422	632	947
4.11	Tersedianya system Informasi jasa konstruksi (%)	-	-	10	20	30
<b>5.</b>	<b>Penataan Ruang</b>					
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber	20	25	30	30	35

1	2	3	4	5	6	7
	HPL/HGB (%)					
5.2	Jumlah bangunan ber- IMB (unit)	-	313	473	709	1.063
5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya (unit)	10	15	15	15	15
5.4	Dokumen Tata Ruang Wilayah	-	Ada	Ada	Ada	Ada
5.5	Dokumen Tata Ruang Wilayah Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.6	Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat Melalui konsultasi public dalam proses penyusunan RTR dan Program pemanfaatab Ruang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.7	Terlaksananya transparansi dalam proses pengurusan izin pemanfaatan ruang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.8	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan terkait pelanggaran bidang penataan ruang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
<b>6.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>					
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5	Jumlah dokumen perencanaan SKPD ( Renstra SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (dokumen)	5	5	45	45	45
<b>7.</b>	<b>Perhubungan</b>					
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	71.706	107.706	159.878	196.953	233.758
7.2	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	8.530	9.780	11.030	12.280	13.530
7.3	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	239	239	231	231	231
7.4	Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Buah)	3	3	4	7	8
7.5	Jumlah Dermaga (Buah)	2	2	3	4	5
7.6	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	1	1	2	3	4
7.7	Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit)	8774	9610	10610	62500	62500

1	2	3	4	5	6	7
7.8	Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (hari)	1	1	1	1	1
7.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
7.10	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	50	63	76	91	109
<b>8.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>					
8.1	Perbaiki Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	1	2	3	3
8.2	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah kecamatan)	10	10	10	13	13
8.3	Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	2	2	3	3	4
8.4	Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	3	3	4	4	5
8.5	Penanganan sampah (%)	65	69	73	75	80
8.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,00047	0,00047	0,00116	0,00289	0,00719
8.7	Rasio Kawasan Tertutup Pepohonan yang dilakukan dengan reboisasi dan Hutan Rakyat (%)	0,0162	0,01462	0,02526	0,06284	0,15638
8.8	Jumlah Pelayanan status mutu air (kali)	5	8	10	10	12
8.9	Jumlah Pelayanan status mutu udara ambien (kali)	0	0	2	4	6
<b>9.</b>	<b>Pertanahan</b>					
9.1	Luas Lahan Bersertifikat (Ha)	15.000	27.956	37.800	45.000	55.000
9.2	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>					
10.1	Penduduk berKTP per satuan penduduk (orang)	575.294	602.402	629.510	657.838	687.441
10.2	Bayi berakte kelahiran (orang)	-	5.302	52.117	59.895	67.498
10.3	Pasangan berakte nikah (orang)	-	32	116.123	169.252	227.354
10.4	Kepemilikan KTP (orang)	575.294	602.402	629.510	657.838	687.441
10.5	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran (orang)	237.352	242.691	248.030	253.486	259.062
10.6	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Nasional (orang)	575.294	602.402	629.510	657.838	687.441
10.8	Keluarga Yang Memiliki Kartu KK (orang)	249.901	253.706	257.511	261.373	265.293

1	2	3	4	5	6	7
<b>11.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	37,42	37,81	38,2	39,3	40,5
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	23,4	26,50	29,6	33,5	38,50
11.3	Rasio KDRT (%)	0,00022	0,00021	0,0002	0,00015	0,0001
11.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	40,00	50,00	60,00	73,00	88,00
11.5	Partisipasi Perempuan di Legislatif DPRD (%)	2,21	4,44	6,67	8,89	11,11
11.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas (%)	40,00	50,00	60	73	88,00
11.7	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (kasus)	321	321	321	321	321
<b>12.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>					
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2	2	2	2	2
12.2	Jumlah akseptor KB baru (orang)	16.742	39.148	39.548	40.148	40.548
12.3	Jumlah peserta KB aktif (orang)	115.590	120.600	125.600	137.750	150.750
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (orang)	145.000	150.100	155.200	160.510	175.630
12.5	Pemasangan Kontrasepsi KB (orang)	29.840	34.970	40.100	45.600	60.750
12.6	Jumlah kader Bina Ketahanan Keluarga (orang)	830	775	720	870	1.020
12.7	Prosentase penggunaan alat Kontrasepsi Pada Pasangan Nikah (%)	61,56	68,53	75,50	80,75	93,80
12.8	Prosentase wanita 15-49 tahun yang berstatus Kawin dan menggunakan alat KB (%)	61,56	68,53	75,5	80,75	93,8
12.9	Penggunaan Kondom Pada Pemakai kontrasepsi (%)	0,73	1,49	2,25	4,5	6
12.10	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya berusia di bawah 20 Tahun (%)	7,23	8	8,75	10,5	15
12.11	Cakupan pasangan Usia subur yang menjadi peserta KB aktif (orang)	114,57	121	126,61	130,4	148
12.12	Cakupan pasangan Usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	18,71	16	13,25	10,6	7
12.13	Cakupan anggota Bina keluarga Balita (BKB) berKB (%)	58,55	60,54	62,53	65,75	80,35

1	2	3	4	5	6	7
12.14	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang ber KB (%)	75,12	78,11	81,1	85,3	90,8
12.15	Rasio petugas Lapang KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap desa/kelurahan (%)	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
12.16	Rasio pembantu Pembina Keluarga berencana (PPKBD) satu petugas di setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
12.17	Cakupan penyedia informasi Data Mikro tiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
<b>13.</b>	<b>Sosial</b>					
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	223	228	233	238	243
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan social (Orang)	3	3	15	75	100
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	3	3	15	75	100
13.4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)	70	80	100	100	100
13.5	Prosentase panti sosial yang melaksanakan standard operasional pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100
13.6	Prosentase panti sosial yang yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial (%)	40	40	60	60	80
<b>14</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>					
14.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	55	51	50	36	35
14.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,72	74,72	79,72	84,72	89,72
14.3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,53	3,53	3,03	2,53	2,03
14.4	Persentase Penduduk dengan Tingkat konsumsi dibawah Garis Kemiskinan Nasional (%)	25,14	23,14	18,14	13,14	8,14
14.5	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (orang)	35	55	75	80	95
14.6	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (orang)	60	60	60	75	75
14.7	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	29	30	41	43	45

1	2	3	4	5	6	7
	bersama (kasus)					
14.8	Jumlah buruh yang menjadi peserta Jamsostek (orang)	50	50	50	50	50
14.9	Jumlah pemeriksaan perusahaan (orang)	300	300	300	300	300
14.10	Jumlah Pengujian peralatan perusahaan (kali)	5	5	5	5	5
<b>15.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>					
15.1	Persentase koperasi aktif (%)	55	57	72	77	78
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	1.093	1.127	1.149	1.171	1.206
15.3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	-	55	55	65	65
15.4	Persentase Koperasi Desa aktif (%)	90	92,17	100	100	100
<b>16.</b>	<b>Penanaman Modal</b>					
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	1.067	1.353	1.640	1.960	2.740
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah )	190.847.000	236.654.000	282.461.000	426.381.000	571.421.000
16.3	Jumlah penyerapan tenaga kerja (orang)	1.140	1.000	860	1.480	2.760
16.4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	127.740.333	174.440.667	221.141.000	313.231.000	394.271.000
<b>17.</b>	<b>Kebudayaan</b>					
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	5	8	12	15
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1	1	1	1	1
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	27	27	45	64	82
17.4	Cakupan kajian seni (%)	5	5	5	5	5
17.5	Pelaksanaan Misi Kesenian (kali)	1	1	1	1	1
17.6	Cakupan SDM Kesenian (%)	80	80	80	80	80
17.7	Jumlah organisasi Kesenian (lembaga)	43	60	77	77	77
<b>18.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
18.1	Jumlah organisasi pemuda (lembaga)	530	530	530	530	530
18.2	Jumlah organisasi olahraga (lembaga)	17	17	17	17	17
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	217.928	217.936	217.944	217.953	217.961
18.4	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	2	2	4	5	7

1	2	3	4	5	6	7
18.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
	Keterangan: Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda, Gedung KNPI, Bumi Perkemahan (unit)					
18.6	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	2	2	2	2	2
<b>19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>						
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM)	1	1	2	3	4
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol)	1	1	2	3	4
19.3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (0/00)	-	30,3	33	36	39
19.4	Penegakan PERDA (kali)	-	61	67	74	81
19.5	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kecamatan)	-	13	13	13	13
19.6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	-	100	100	100	100
19.7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (kec.)	13	13	13	13	13
19.8	Terlaksananya sosialisasi, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana (kali)	-	4	10	10	10
19.9	Tersedianya sarana pencegahan bencana (unit)	76	84	92	100	108
19.10	Terbangunnya infrastruktur pencegahan bencana (paket)	2	8	14	20	26
19.11	Terbentuknya desa/kelurahan tangguh bencana (desa)	-	10	17	24	32
19.12	Pembentukan penanggulangan bencana (pena) sekolah	-	-	10	10	10
19.13	Rehabilitasi kondisi sosial masyarakat pascabencana (kali)	-	1	5	5	5
19.14	Pemulihan kondisi lingkungan berbasis pokmas pascabencana (desa/kel)	-	10	50	50	50
<b>20. Pemerintahan Umum</b>						
20.1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,48	5,75	5,75	5,75	5,75
20.2	Kemiskinan (%)	31,7	20,94	19,84	16,54	12,20
20.3	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.4	Sistim Informasi Manajemen Pemda (unit)	1	3	5	7	9
20.5	Rasio jumlah pegawai terhadap penduduk per 1000	10,7	11,6	11,8	12,5	13,5



1	2	3	4	5	6	7
	penduduk (0/00)					
20.6	Opini Audit BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
20.7	Rasio penggunaan e-Proc. (%)	0	0	75	100	100
20.8	Aparatur yang memperoleh pembinaan dan Pengembangan karir tepat Waktu (%)					
	Ø Pejabat Eselon	7,2	6,4	9,5	9,7	10
	Ø PNS Kenaikan Pangkat	18	20	30	35	40
	Ø PNS Kenaikan Gaji Berkala	35	38,1	48	52	57
20.9	PNS yang mengikuti Diklat yang seharusnya diikuti (%)	9	8	10,8	11	12
20.10	SPM yang diterapkan (%)	0	20	50	75	100
20.11	SKPD yang Mencapai target SPM (lembaga)	0	10	30	50	75
20.12	SKPD yang menerapkan Standard SOP (lembaga)	42	42	45	45	45
20.13	Pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	10	20	50	70	100
20.14	Jumlah Pelayanan berstandar Internasional (ISO) (lembaga)	4	6	8	10	12
<b>21.</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>					
21.1	Regulasi ketahanan pangan (Perkada)	-	-	Ada	Ada	Ada
21.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	98.129	105.165	112.371	118.773	125.175
21.3	Ketersediaan lumbung pangan desa (unit)	-	25	70	90	110
21.4	Ketersediaan Informasi, Pasokan, Parga dan Akses Pangan di Daerah (unit)	30	35	50	70	90
21.5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	50	55	65	75	80
21.6	Penanganan Daerah Rawan pangan (%)	-	25	50	75	90
21.7	Ketersediaan energy dan protein perkapita	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.8	Pencapaian Skor pola pangan harapan (SPPH) (%)	60	65	75	80	85
21.9	Stabilitas harga dan Pasokan Pangan (%)	25	30	50	70	90
<b>22.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	53	63	73	83	93
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (lembaga)	33	43	53	63	73
22.3	LPM Berprestasi (lembaga)	162	172	182	192	202
22.4	PKK aktif (Unit)	189	189	189	189	189

1	2	3	4	5	6	7
22.5	Posyandu aktif (Unit)	753	763	773	783	793
22.6	Desa yang telah menyusun RPJM Des (unit)	178	178	178	178	178
22.7	Desa yang telah menyusun RKP Des (unit)	178	178	178	178	178
<b>23.</b>	<b>Statistik</b>					
23.1	Buku " Pamekasan Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2	Buku "PDRB kabupaten Pamekasan"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.3	Buku "IHK Kabupaten Pamekasan"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>24.</b>	<b>Kearsipan</b>					
24.1	Pengelolaan arsip secara baku (Box)	-	3.114,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang) Tenaga Arsiparis	180	120	60	64	65
<b>25.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					
25.1	Prosentase Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) (%)	72	72	72	80	90
25.2	Warung masyarakat Informasi (%)	72	72	72	80	90
25.3	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	3	3	7	10	13
25.4	M-CAP (Mobile Capacity Acces Point) (unit)	1	1	1	2	2
25.5	M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)	3	3	6	9	13
25.6	Data Center (buah)	-	-	1	1	1
25.7	Media Center (buah)	1	1	1	2	2
25.8	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (%)	0,009	0,001	0,04	0,06	0,09
25.9	Jumlah surat kabar nasional/lokal (unit)	15	15	15	20	20
25.10	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	4	4	6	8	8
25.11	Web site milik pemerintah daerah (buah)	5	5	40	40	40
25.12	Proporsi Rumah tangga yang memiliki computer (%)	10	21	30	50	70
25.13	Pemanfaatan system Informasi manajemen dalam Pengelolaan pemerintah (Unit )	6	6	10	15	20
25.14	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media massa (majalah, Radio dan TV ) (%)	100	100	100	100	100
25.15	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media Baru seperti (Web site/ interknit ) (%)	70	80	85	90	100
25.16	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui	-	-	40	45	50

1	2	3	4	5	6	7
	Media tradisional seperti Pertunjukan Rakyat (%)					
25.17	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah atau diskusi (%)	30	38	40	45	50
25.18	Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasiona melalui Media luar ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur dan baliho (%)	75	82	83	83	84
25.19	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan (%)	5	7,7	10	11	20
<b>26.</b>	<b>Perpustakaan</b>					
26.1	Jumlah perpustakaan (Unit)	1	1	5	10	15
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	27.860	28.150	28.440	33.840	38.760
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	-	12.450	42.450	52.700	103.500
<b>II.</b>	<b>PELAYANAN URUSAN PILIHAN</b>					
<b>1.</b>	<b>Pertanian dan Peternakan</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Luas tanam tanaman pangan</b>					
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	10.768	22.248	13.252	13.784	14.473
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	11.790	15.257	11.951	12.430	13.051
1.1.3.	Jagung (Ha)	39.853	46.581	46.722	48.595	51.024
<b>1.2.</b>	<b>Luas Panen tanaman pangan</b>					
1.2.1.	Padi sawah (Ha)	9.986	12.774	12.669	13.177	13.836
1.2.2.	Padi ladang (Ha)	10.020	10.588	11.951	12.430	13.051
1.2.3.	Jagung (Ha)	40.721	78.855	46.722	48.595	51.024
<b>1.3.</b>	<b>Produktivitas tanaman pangan</b>					
1.3.1.	Padi sawah (Kwintal/Ha)	51	62	71	80	86
1.3.2.	Padi ladang (Kwintal/Ha)	40	59	70	78	84
1.3.3.	Jagung (Kwintal/Ha)	23	29	38	43	46

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4.</b>	<b>Produksi tanaman pangan</b>					
1.4.1.	Padi sawah (Ton)	50.435	79.105	89.583	102.295	109.967
1.4.2.	Padi ladang (Ton)	40.453	62.226	83.281	95.098	102.230
1.4.3.	Jagung (Ton)	92.668	141.680	178.114	203.388	218.642
<b>1.5.</b>	<b>Luas Panen Tanaman Hortikultura</b>					
1.5.1.	Buah-Buahan (Ha)					
	Ø Jeruk	8.389	7.500	12.557	13.458	14.131
	Ø Durian	1.555	9.025	1.706	1.828	1.916
	Ø Rambutan	13.409	12.250	27.826	29.824	31.315
1.5.2.	Sayuran (Ha)					
	Ø Bawang Merah	1.662	2.131	1.309	2.475	2.598
	Ø Cabe Rawit	1.350	2.225	5.037	5.399	5.669
	Ø Cabe Besar	361	575	457	490	514
1.5.3.	Tanaman Obat (M2)					
	Ø Jahe	196.847	916.056	506.986	543.398	870.567
	Ø Kunyit	130.053	340.887	520.936	558.350	586.267
<b>1.6.</b>	<b>Produksi Tanaman Hortikultura</b>					
1.6.1.	Buah-Buahan (Ton)					
	Ø Jeruk	53	92	281	321	345
	Ø Durian	71	949	2.339	2.665	2.865
	Ø Rambutan	359	557	9.086	10.374	11.152
1.6.2.	Sayuran (Ton)					
	Ø Bawang Merah	11.532	14.960	17.323	17.755	21.237
	Ø Cabe Rawit	2.252	10.791	28.476	32.517	34.956
	Ø Cabe Besar	981	3.479	3.223	3.681	3.957
1.6.3.	Tanaman Obat (Ton)					
	Ø Jahe	28.737	2.733	987	1.127	1.211
	Ø Kunyit	34.445	1.370	576	658	707

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7.</b>	<b>Populasi Ternak</b>					
1.7.1.	Sapi Potong (Ekor)	43.051	124.780	184.679	266.408	348.137
1.7.2.	Kambing (Ekor)	62.131	62.370	62.609	62.848	63.087
1.7.3.	Domba (Ekor)	21.455	21.475	21.495	21.515	21.535
1.7.4.	Ayam Buras (Ekor)	771.280	771.460	771.640	771.820	772.000
1.7.5.	Ayam Ras (Ekor)	911.221	910.321	909.421	908.521	907.621
1.7.7.	Itik (Ekor)	33.414	45.744	56.704	69.034	81.364
<b>1.8.</b>	<b>Produksi Ternak</b>					
1.8.1.	Sapi Potong (ton)	1.809,06	2.306,73	2.804,40	3.302,07	3.799,74
1.8.2.	Kambing (ton)	565,49	429,49	293,48	157,47	21,46
1.8.3.	Domba (ton)	67,40	67,49	67,57	67,66	67,75
1.8.4.	Ayam Buras (ton)	511,54	511,66	511,78	511,91	512,03
1.8.5.	Ayam Ras (ton)	1.681,84	1.683,84	1.685,85	1.687,85	1.689,85
1.8.6.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	11,33	11,91	12,50	13,08	13,67
<b>1.15</b>	<b>Perkebunan</b>					
1.15.1	Produksi tanaman tembakau ( ton )	1.452	3.836	8.000	9.200	11.500
1.15.2	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	6,10	12,17	12,78	13,42	14,09
1.15.3	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (orang)	113.297	186.220	281.259	351.574	527.361
1.15.4	Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (unit)	3	5	10	15	20
1.15.5	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun)	-	-	5	15	20
<b>3.</b>	<b>Kehutanan</b>					
3.1.	Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen)	31	56	56	65	75
3.2.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)	2	3	5	10	15
3.3.	Pembedayaan masyarakat local di sekitar kawasan hutan (orang)	5.275	9.800	10.780	12.397	14.876
3.4.	Penghijauan dan reboisasi ( jumlah batang pohon bibit)	644.872	966.100	1.062.710	1.594.065	2.337.963
3.5.	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	422	980	1.960	2.352	3.058

1	2	3	4	5	6	7
<b>4.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>					
4.1.	Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton)	1.137,34	1.197,20	1.257,06	1.319,91	1.385,91
4.2.	Peningkatan hasil Tangkapan laut (Ton)	18.610,12	19.589,60	20.569,08	21.597,53	22.677,41
4.3.	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	22,02	23,5	24,98	26,55	28,23
4.4.	Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan (Ton)	8.668,71	9631,9	10.595,09	11.866,50	13.646,48
4.5.	Cakupan Bina kelompok Nelayan (%)	47	59	71	86	100
<b>5.</b>	<b>Pariwisata</b>					
5.1	Kunjungan wisata (orang)	47.482	54.963	62.444	123.666	185.500
<b>6.</b>	<b>Perdagangan</b>					
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	15,31	15,81	16,31	16,81	17,31
6.2	Jumlah Pasar Daerah dan Tradisional (unit)	31	38	45	54	64
<b>7.</b>	<b>Perindustrian</b>					
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2	2,94	3,75	4,78	6,11
7.2	Pertumbuhan Industri (unit)	8.068	11.148	14228	18159	23.176
7.3	Cakupan bina kelompok pengrajin (lembaga)	0	0	21	30	39
<b>8.</b>	<b>Ketransmigrasian</b>					
8.1	Pelaksanaan Sosialisasi Program Transmigrasi (kali)	15	15	15	15	15
8.2	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Transmigrasi (KK)	100	200	300	400	500
8.3	Jumlah Masyarakat yang Mendaftar Sebagai Calon Transmigrasi (KK)	150	150	150	150	150
8.4	pelaksanaan Bimbingan Bagi Calon Transmigrasi (kali)	5	5	5	5	5
8.5	Jumlah Transmigrasi yang diberangkatkan ke Lokasi Penempatan (KK)	50	50	50	50	50
8.6	Prosentase Pemberangkatan Transmigrasi (%)	100	100	100	100	100
8.7	Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan Daerah Lokasi Penempatan Transmigrasi (lokasi)	5	5	5	5	5
8.8	pelaksanaan Survey/Penjajakan ke Lokasi Daerah Penempatan Transmigrasi (kali)	5	5	5	5	5
8.9	Prosentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (%)	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
8.10	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Ketrasmigrasi (lembaga)	4	7	10	15	16
8.11	Tingkat Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (%)	100	100	100	100	100
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>						
<b>I.</b>	<b>Kemampuan Ekonomi</b>					
<b>1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1.	Pendapatan Regional ADHB (Juta Rupiah)	2.449.090,50	4.471.965,97	6.494.841,44	8.517.716,91	10.540.592,38
1.2.	Pendapatan Regional Perkapita ADHB (Rupiah)	3.186.484,42	5.618.626,50	8.050.768,58	10.482.910,66	12.915.052,74
1.3.	Pendapatan Regional ADHK (Juta Rupiah)	1.537.223,05	1.975.840,56	2.414.458,07	2.853.075,58	3.291.693,09
1.4.	Pendapatan Regional Perkapita ADHK (Rupiah)	2.000.063,82	2.482.467,49	2.964.871,16	3.447.274,83	3.929.678,50
<b>II.</b>	<b>Fasilitas Wilayah/Infrastuktur</b>					
<b>1.</b>	<b>Perhubungan</b>					
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	60	70	73	75	80
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang)	71.706	107.706	159.878	196.953	233.758
<b>2.</b>	<b>Penataan Ruang</b>					
2.1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	-	75	80	80	80
2.2	Luas wilayah produktif (Juta Ha)	-	51.204	51.203	51.203	51.202
2.3	Luas wilayah industri (Ha)	-	1.271	1.271	1.271	1.271
2.4	Luas wilayah perkotaan (Ha)	-	25.035	25.035	25.035	25.035
<b>3.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	8	10	12	14	16
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	2	2	4	6	8
3.3	Jumlah penginapan/ hotel (Buah)	10	13	16	19	22
<b>4.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>					

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4.1	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	70	75	80	85	90
4.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	78	81	84	87	90
4.3	Rasio desa berlistrik (%)	100	100	100	100	100
4.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	40	70	80	85	95
<b>III.</b>	<b>IKLIM BERINVESTASI</b>					
<b>1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>					
1.1	Angka kriminalitas (%)	0,033	0,026	0,02	0,015	0,011
1.2	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (jenis)	12	12	13	13	13
1.3	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda)	2	4	6	8	10
<b>IV.</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
<b>1</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>					
1.1	Rasio ketergantungan (%)	53,82	53,32	52,82	52,32	51,82